kerja sama
jerman
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia

Baseline Development on Public and Private Sector Investments in Green Economy

Pengembangan Rona Awal Investasi Sektor Pemerintah dan Swasta dalam Ekonomi Hijau

giz Deutsche Gesellschaft
fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Published by *Diterbitkan oleh:*

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)
Manggala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel : +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax : +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

In Cooperation with *Bekerja sama dengan :*
Ministry of Forestry

Author *Penulis :*
Aaman Sulchan - emik.co.id

Photo Credit *Foto Milik :*
FORCLIME

Layout & Design *Tata letak & Desain :*
sunsetmediastudio.com

Printed & Distributed by *Dicetak dan diterbitkan oleh*:
FORCLIME

Jakarta, October 2014

Baseline Development on Public and Private Sector Investments in Green Economy

Pengembangan Rona Awal Investasi Sektor Pemerintah dan Swasta dalam Ekonomi Hijau

Foreword

Indonesia is blessed with some of the world's most extensive and biologically diverse tropical forests. However, exploitative and unsustainable forest management practices, illegal logging and forest fires have severely depleted the forested area. Every year, around 1.17 million hectares of natural forest fall victim to the expansion of plantations and mining. Deforestation and the degradation of forests are the cause of Indonesia's excessive greenhouse gas (GHG) emissions. The forestry sector therefore plays a key role in the country's climate change mitigation efforts.

In collaboration with Indonesia's Ministry of Forestry, GIZ, through its Technical Module under the Forests and Climate change programme, identified four priority areas by which it approaches green economy, i.e.: good governance and decentralization, climate change, and private sector development. The baseline is one of the objectives of the Strategic Area (#4) that focuses on the mainstreaming of green economy approach, seeking to integrate conservation with development.

The baseline should be considered as a snapshot of the economic activities that can be considered as supportive to a green economy in three districts in Kalimantan that are forest based economies and serve as pilots. I hope the data collected in these three districts and presented in this report through maps and figures can be considered as useful for the decision makers in the districts in seeking the balance between economic welfare, preservation of high conservation values, as well as inclusive social growth.

Kata Pengantar

Indonesia dianugerahi dengan sebagian dari hutan tropis dunia yang paling luas dan beraneka ragam secara biologis. Namun, berbagai praktik pengelolaan hutan yang mengeksploitasi dan tidak berkelanjutan, pembalakan liar dan kebakaran hutan telah menguras wilayah hutan tersebut secara besar-besaran. Setiap tahun, sekitar 1,17 juta hektar hutan alam menjadi korban dari perluasan lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia yang berlebihan. Oleh karenanya, sektor kehutanan memainkan peran utama dalam berbagai usaha mitigasi perubahan iklim negara tersebut.

Dalam kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, GIZ, melalui Modul Teknisnya di bawah program Hutan dan Perubahan Iklim, mengidentifikasi empat bidang prioritas dalam pendekatannya menuju ekonomi hijau, yaitu: tata kelola yang baik dan desentraslisasi, perubahan iklim, dan pembangunan sektor swasta. Rona awalnya merupakan salah satu sasaran Bidang Strategis (#4) yang berfokus pada pengarusutamaan pendekatan ekonomi hijau, suatu usaha untuk memadukan konservasi dengan pembangunan.

Rona awal ini harus dianggap sebagai pandangan sesaat dari berbagai kegiatan ekonomi yang dapat dianggap mendukung terhadap ekonomi hijau di tiga kabupaten di Kalimantan yang memiliki ekonomi berbasis hutan dan menjadi perintis.

Saya berharap data yang dikumpulkan di ketiga kabupaten ini dan disajikan dalam laporan ini dalam bentuk peta dan gambar dapat dianggap berguna untuk para pengambil keputusan di berbagai kabupaten dalam mengusahakan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, pelestarian nilai-nilai konservasi tinggi, dan juga pertumbuhan sosial inklusif.

Rolf Krezdorn
Programme Director FORCLIME

Preface

Green economy is a development approach that seeks the balance between economic prosperity, social inclusiveness, and effective use of natural resources. The concept gained much momentum in 2012 at the Rio+20 UN Conference on Sustainable Development. In Indonesia, this concept is considered not as a new concept, rather a new name for the approach of sustainable development, comprising economic growth, inclusive growth and environment (Salim, 2012).

The challenges Indonesia is facing in mainstreaming the concept of green economy into national planning is the linkage between related policy makers, a philosophic reform among the political elite to change the political system and move the paradigm from material development towards mental development of society, the political will to practice green economy, and massive outreach and campaigns to educate all layers of society, to eventually become a lead instead of a follower in this approach (Pusat Standardisasi dan Lingkungan, 2012).

In more or less the same words, these challenges also emerged as a result of the assignment to develop a baseline on green economy investments in three districts in the Heart of Borneo for 2012. The three districts, Malinau in North Kalimantan, Berau in East Kalimantan, and Kapuas Hulu in West Kalimantan, serve as a pilot to see how forest based economies can prosper through the application of a green economy approach, i.e. by reducing greenhouse gas emissions, improving living standards of marginalized communities and sustaining the condition of the biodiversity. This approach is therefore linked to issues of climate change (how to reduce impacts on climate change) and forest degradation.

Prakata

Ekonomi hijau adalah suatu pendekatan pembangunan yang mencari keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, ketercakupan sosial, dan pemanfaatan sumber daya alam yang efektif. Konsep ini mendapat banyak momentum pada tahun 2012 dalam Konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan PBB di Rio+20. Di Indonesia, konsep ini tidak dianggap baru, tetapi sebagai nama baru untuk pendekatan pembangunan berkelanjutan, terdiri atas pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inklusif dan lingkungan (Salim, 2012).

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengarusutamakan konsep ekonomi hijau ke dalam perencanaan nasional adalah *keterkaitan* antara para pembuat kebijakan yang berhubungan, sebuah reformasi filosofis di antara para elit politik untuk mengubah sistem politik dan mengalihkan paradigma dari pembangunan material menjadi pembangunan mental masyarakat, kemauan politik untuk mempraktikkan ekonomi hijau, dan penjangkauan dan kampanye masif untuk mendidik semua lapisan masyarakat, untuk akhirnya menjadi pemimpin dan bukan pengikut dalam pendekatan ini (*Pusat Standardisasi dan Lingkungan*, 2012).

Dengan kata-kata yang kurang lebih sama, berbagai tantangan ini juga timbul sebagai hasil penugasan untuk membangun rona awal tentang investasi ekonomi hijau di tiga kabupaten di Jantung Kalimantan untuk 2012. Ketiga kabupaten tersebut, Malinau di Kalimantan Utara, Berau di Kalimantan Timur, dan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, menjadi perintis untuk melihat bagaimana ekonomi berbasis hutan dapat makmur melalui penerapan pendekatan ekonomi hijau, yaitu dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan standar hidup masyarakat terpinggirkan dan melestarikan kondisi keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, pendekatan ini terkait dengan isu-isu perubahan iklim (bagaimana mengurangi berbagai dampak dan perubahan iklim) dan degradasi hutan.

GIZ, in collaboration with the Indonesian Ministry of Forestry, and through its Forests and Climate change (FORCLIME) programme, identified four priority areas by which it approaches green economy, i.e.: good governance and decentralization, climate change, and private sector development. The baseline is one of the objectives of the Strategic Area (#4) that focuses on the mainstreaming of this green economy approach, seeking to integrate conservation with development.

In this case, the specific experiences of FORCLIME in developing Forest Management Units, in agroforestry, in ecotourism, in renewable energy (including bio mass) are based on the efficient use of forest resources, giving a value to the forests (TEEB) and are translated into measurable reduction of CO2 emission or carbon stock enhancement, biodiversity conservation, and sustainable livelihood improvement.

Besides developing a baseline on green economy investments in 2012 in the aforementioned districts, this assignment also explored the local understandings and perceptions towards this concept of green economy, while compiling a data base of initiatives that can be considered as green. Of specific interest are data about actual green economy investments (budget allocation) by stakeholders in the district, in 2012, as well as new jobs created in economic sectors and activities that are related to green economy, i.e. agriculture, forestry, fisheries, eco-tourism, non-timber forest products, and renewable energy. These data are collected through interviews with representatives of local government services, local and international ngo's, and companies, who either provided information by word of mouth or referred to official (financial) overviews and reports. Furthermore, focused group discussions were conducted to introduce the purpose of the assignment, to gain understanding about local perceptions on green economy,

Dalam kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, GIZ, melalui program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), mengidentifikasi empat bidang prioritas dalam pendekatannya menuju ekonomi hijau, yaitu: tata kelola yang baik dan desentraslisasi, perubahan iklim, dan pembangunan sektor swasta. Rona awal tersebut merupakan salah satu sasaran Bidang Strategis (#4) yang berfokus pada pengarusutamaan pendekatan ekonomi hijau, berusaha untuk memadukan konservasi dengan pembangunan.

Dalam hal ini, berbagai pengalaman khusus FORCLIME dalam mengembangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam agroforestri (wanatani), dalam ekowisata, dalam energi terbarukan (termasuk biomasa) didasarkan pada pemanfaatan sumber daya hutan yang efisien, memberikan nilai pada hutan (TEEB), dan diterjemahkan menjadi pengurangan emisi CO2 secara terukur atau peningkatan stok karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan peningkatan penghidupan yang berkelanjutan.

Di samping membangun rona awal investasi ekonomi hijau pada tahun 2012 di beberapa kabupaten yang telah disebutkan di atas, tugas ini juga menjajaki pemahaman dan persepsi lokal terhadap konsep ekonomi hijau ini, sambil mengumpulkan basis data tentang berbagai inisiatif yang dapat dianggap sebagai hijau. Yang menjadi ketertarikan khusus adalah data mengenai investasi (alokasi anggaran)ekonomi hijau aktual oleh para pemangku kepentingan di kabupaten tersebut, pada tahun 2012, dan juga terciptanya lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi hijau, dalam hal ini pertanian, kehutanan, perikanan, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan energi terbarukan. Data-data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai perwakilan dinas pemerintah setempat, LSM lokal dan internasional, dan perusahaan, yang telah memberikan informasi secara lisan maupun yang mengacu pada tinjauan dan laporan (keuangan) resmi. Selanjutnya, telah diselenggarakan berbagai diskusi kelompok terarah untuk memperkenalkan tujuan tugas tersebut, mendapatkan pengertian mengenai persepsi lokal mengenai ekonomi hijau, menyampaikan hasil-hasil pendahuluan

to convey preliminary results of the survey, to seek feedback, and to identify next steps and challenges. During each visit to the districts, short field trips have been organized to see the practices of green economy on the ground level.

It needs to be taken into account that this survey is a rapid assessment or a snapshot, of the available information, depending on the availability of the people who participated in the interviews and discussions, and the quality of the data provided, thus, not a scientifically solid research.

As a result, for each district overviews and maps have been developed to showcase the spread within the districts of investments that can be sorted as green economic activities. Furthermore, more understanding is gained about the local perception and challenges in implementing and mainstreaming green economy into all aspects of regional development, starting from planning and programming, to monitoring and evaluation of these practices. Based on these input recommendations are formulated for next steps: this snapshot provides a base for decision makers in the three districts to inspire discussions and determine future developments (short to long term) towards mainstreaming green economy into landuse planning. Eventually, this image can be used to evaluate the development of green economy in a certain time frame, e.g. towards 2016, for future policy considerations.

Furthermore, by putting the results of these surveys in the three pilot-districts next to each other, linkages can be established between the districts to exchange best practices and lessons learned, and inspire the actual mainstreaming of green economy.

survei tersebut, mencari umpan balik, dan untuk mengidentifikasi berbagai langkah dan tantangan selanjutnya. Dalam setiap kunjungan ke beberapa kabupaten tersebut, telah diatur juga kunjungan singkat untuk melihat berbagai praktik ekonomi hijau di tingkat dasar.

Perlu dipertimbangkan juga bahwa survei ini merupakan penilaian cepat atau suatu pandangan sesaat, dari informasi yang tersedia, tergantung dari ketersediaan perwakilan yang berpartisipasi dalam wawancara dan diskusi yang dilakukan, dengan demikian, bukan merupakan penelitian yang absah secara ilmiah.

Sebagai hasilnya, telah dibuat tinjauan dan peta untuk masing-masing kabupaten guna memperlihatkan sebaran investasi di setiap kabupaten yang dapat dipilih sebagai kegiatan ekonomi hijau. Selanjutnya, telah diperoleh lebih banyak pemahaman mengenai persepsi dan berbagai tantangan lokal dalam mengimplementasikan dan mengarusutamakan ekonomi hijau ke semua aspek pembangunan daerah, dimulai dari perencanaan dan pemrograman, sampai pemantauan dan evaluasi dari berbagai praktik ini. Berdasarkan berbagai masukan ini disusun rekomendasi untuk langkah-langkah berikutnya: berdasarkan pandangan sesaat ini, para pembuat kebijakan di ketiga kabupaten dapat menginspirasi berbagai diskusi dan menetapkan perkembangan selanjutnya (jangka pendek sampai panjang) menuju pengarusutamaan ekonomi hijau dalam perencanaan tata guna lahan. Akhirnya, gambaran ini dapat dipergunakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi hijau pada kerangka waktu tertentu, misalnya menuju 2016, untuk berbagai pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Selanjutnya, dengan menempatkan berbagai hasil dari survei ini di ketiga kabupaten tersebut secara berdampingan, berbagai keterkaitan dapat ditetapkan antara kabupaten-kabupaten tersebut untuk saling tukar praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang didapat, dan menginspirasi pengarusutamaan aktual ekonomi hijau.

TABLE OF CONTENTS
DAFTAR ISI

Foreword iii
Kata pengantar iii
Preface iv
Prakata iv
Executive Summary 1
Ringkasan eksekutif 1
Background 1
Latar belakang 1
Local understanding 2
Pemahaman lokal 2
Results of data collection 2
Hasil pengumpulan data 2
Recommendations 6
Rekomendasi 6

1. Introduction 8
1. Pendahuluan 8
2. Theoretical framework 10
2. Kerangka kerja teoretis 10
2.1 Green Economy 10
2.1 Ekonomi Hijau 10
2.1.1 Elements of Green Economy 10
2.1.1 Elemen dalam Ekonomi Hijau 10
2.1.2 International initiatives 11
2.1.2 Inisiatif Internasional 11
2.2 Green Economy and Indonesia 12
2.2 Ekonomi Hijau dan Indonesia 12
2.2.1 National framework 12
2.2.1 Kerangka kerja nasional 12
2.2.2 Provincial frameworks 14
2.2.2 Kerangka kerja provinsi 14
2.2.3 Multilateral framework 17
2.2.3 Kerangka kerja multilateral 17
2.2.4 District frameworks 21
2.2.4 Kerangka kerja kabupaten 21

3. Methodology 22
3. Metodologi 22
3.1 Deliverables 22
3.1 Hasil 22

3.2 Indicators 22
3.2 Indikator 22
3.2.1 Green Economy Investment vs. GRDP 23
3.2.1 Investasi Ekonomi Hijau vs. PDRB 23
3.2.3 Investments 25
3.2.3 Investasi 25
3.2.4 New jobs 27
3.2.4 Lapangan pekerjaan baru 27
3.2.5 Other indicators 27
3.2.5 Indikator lainnya 27
3.2.6 Availability and accuracy of data 28
3.2.6 Ketersediaan dan akurasi data 28
3.3 Methodology and Execution 29
3.3 Metodologi dan Pelaksanaan 29
3.3.1 Literature review 29
3.3.1 Tinjauan Pustaka 29
3.3.2 Stakeholders mapping and profile 30
3.3.2 Pemetaan dan profil pemangku kepentingan 30
3.3.3 Interviews, focused group discussions, and field trips 30
3.3.3 Wawancara, diskusi kelompok terarah dan kunjungan lapangan 30
3.3.4 Reporting 31
3.3.4 Laporan 31
3.3.5 Time frame and effectiveness 32
3.3.5 Kerangka waktu dan efektivitas 32

4. Conclusions, Observations, and Recommendations. 34
4. Simpulan, Observasi, dan Rekomendasi 34
4.1 Elements of Green Economy 34
4.1 Unsur-unsur Ekonomi Hijau 34
4.1.1 Berau 35
4.1.1 Berau 35
4.1.2 Kapuas Hulu 36
4.1.2 Kapuas Hulu 36
4.1.3 Malinau 39
4.1.3 Malinau 39
4.2 Recommendations and Outlook 41
4.2 Rekomendasi dan Pandangan 41
4.2.1 Berau 44
4.2.1 Berau 44
4.2.2 Kapuas Hulu 50
4.2.2 Kapuas Hulu 50

4.2.3 Malinau 55
4.2.3 Malinau 55
4.2.4 Peer review 59
4.2.4 Tinjauan sesama rekan kerja 59
4.2.5 Outlook 60
4.2.5 Pandangan 60
4.3 Observations and Lessons Learned 63
4.3 Observasi dan Pelajaran 63
4.3.1 Berau 63
4.3.1 Berau 63
4.3.2 Kapuas Hulu 64
4.3.2 Kapuas Hulu 64
4.3.3 Malinau 64
4.3.3 Malinau 64

References 67
Referensi 67
General 67
Umum 67
Berau 71
Berau 71
Kapuas Hulu 72
Kapuas Hulu 72
Malinau 72
Malinau 72

Annexes 74
Lampiran 74
Annex 1: Vision and mission statements of governments in the three pilot districts 2010 – 2016 74
Lampiran 1: Pernyataan visi dan misi pemerintah di ketiga kabupaten perintis 2010 – 2016 74
Annex 2. Headline Indicators of Green Economy 75
Lampiran 2. Indikator Utama Ekonomi Hijau 75

LIST OF ABBREVIATIONS
DAFTAR SINGKATAN

APBD	Regional Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APDS	Honey Farmers Association Sentarum Lake Asosiasi Periau Danau Sentarum
Bappeda	Reginal Planning Development Agency Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	National Planning Development Agency Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bestari	Sustainable Berau Berau Lestari
BKNPA	Betung Kerihun National Park Authority Balai Taman Nasional Betung Kerihun
BLH	Environment Agency Badan Lingkungan Hidup
BLHD	Regional Environment Agency Badan Lingkungan Hidup Daerah
BMZ	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/ Federal Ministry of Economic Cooperation and Development Kementerian Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Federal
BPD	Regional Development Bank Bank Pembangunan Daerah
BPK	Financial Audit Agency Badan Pemeriksa Keuangan
BPM	Investment Board Badan Penanaman Modal
BPMD	Village Community Empowerment Agency Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMDPKB	Agency for Village Community Empowerment, Women and Family Planning Support Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
BPPT	Agency for Assessment and Application of Technology Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	Central Statistic Agency Badan Pusat Statistik
BTNBK	Betung Kerihun National Park Authority Balai Taman Nasional Betung Kerihun
BTNDS	Danau Sentarum National Park Authority Balai Taman Nasional Danau Sentarum
BTNKM	Kayan Mentarang National Park Authority Balai Taman Nasional Kayan Mentarang
CBFM	Community-based Forest Management Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
CIFOR	Center for International Forestry Research Pusat Internasional Penelitian Kehutanan

COMDEV	Community Development Pemberdayaan Masyarakat
COP	Conference of the Parties Konferensi Para Pihak
CSR	Corporate social responsibility Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
CU	Credit Union Lembaga Pengkreditan
DBH-DR	Funds from profit sharing and funds for replantation Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi
DeCGG	Decentralization as Contribution to Good Governance Program Desentralisasi sebagai Kontribusi untuk Tata Kelola yang Baik
Disbudpar	Culture and Tourism Service Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dishutbun	Forestry and Plantation Service Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Disnakertrans	Labor Force and Transmigration Service Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Distamben	Mining and Energy Service Dinas Pertambangan dan Energi
DP3K	Agriculture, Livestock, Plantation and Forestry Service Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
DPMU	District Project Management Unit Satuan Pengelolaan Proyek Kabupaten
DSNP	Danau Sentarum National Park Taman Nasional Danau Sentarum
DSNPA	Danau Sentarum National Park Authority Balai Taman Nasional Danau Sentarum
FFI	Flora Fauna International Flora Fauna Internasional
FGD	Focus Group Discussion Diskusi Kelompok Terarah
FMU	Forest Management Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan
FoMMA	Indigenous People Alliance Forum Musyawarah Masyarakat Adat
FORCLIME	Forests and Climate Change Programme Program Kehutanan dan Perubahan Iklim
FORCLIME FC	Forests and Climate Change Programme Financial Cooperation Module Kehutanan dan Perubahan Iklim Modul Kerjasama Finansial
FORCLIME TC	Forests and Climate Change Programme Technical Cooperation Module Kehutanan dan Perubahan Iklim Modul Kerjasama Teknis
GCF	Governors' Climate and Forests Task Force Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur
GDRP	Gross Domestic Regional Product Produk Domestik Regional Bruto
GE	Green Economy Ekonomi hijau

GEI	Green Economy Initiative Inisiatif Ekonomi Hijau
Gerdema	Village Development Movement Gerakan Desa Membangun
GFA	German Financial Advisors Penasehat Keuangan Jerman
GGGI	Global Green Growth Institute Institut Global Pertumbuhan Hijau
GGKP	Green Growth Knowledge Platform Wadah Pengetahuan Pertumbuhan Hijau
GHG	Greenhouse Gas Gas Rumah Kaca
GIS	Geographic Information Systems Sistem Informasi Geografis
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/ German Society for International Cooperation Badan Kerjasama Pembangunan Jerman
GmbH	Gesellschaft mit Beschränkter Haftung/ Limited Liability Company Perseroan Terbatas
GRDP	Gross Regional Domestic Product Produk Domestik Regional Bruto
HHBK	Non-Timber Forest Products Hasil Hutan Bukan Kayu
HoB	Heart of Borneo Jantung Kalimantan
HoBI	Heart of Borneo Initiative Gagasan Jantung Kalimantan
IES	Integrating Ecosystem Services Mengintegrasikan Jasa Ekosistem
I-GEM	Indonesia-Green Economy Model Model Ekonomi Hijau Indonesia
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil Kelapa Sawit Lestari Indonesia
JMHI	Wild Honey Network Indonesia Jaringan Madu Hutan Indonesia
KADIN	Chamber of Commerce and Industry Kamar Dagang dan Industri
KfW	KfW Entwicklungsbank/ KfW Development Bank Bank Pembangunan Jerman
KH	Kapuas Hulu Kapuas Hulu
KMNPA	Kayan Mentarang National Park Authority Balai Taman Nasional Kayan Mentarang
KNPI	Indonesian Youth National Committee Komite Nasional Pemuda Indonesia
KOMPAKH	Kapuas Hulu Environmental Activist Community Komunitas Pencinta Alam Kapuas Hulu
KPDT	Ministry of Remote Areas Development Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

KPH	Forest Management Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPU	Ministry of Public Works Kementerian Pekerjaan Umum
LAKIP	Government Institution Performance Accountability Report Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LIKOS	Conservation Circle Lingkar Konservasi
LP3M	Institutions and Observers of Dayak Punan Malinau Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau
LULUCF	Land Use, Land-Use Change And Forestry Kelompok Kerja Tata Guna Lahan dan Kehutanan
MoU	Memorandum of Understanding Nota Kesepahaman
MP3EI	The Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Musrenbang	Development Planning Meeting Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangdes	Village Development Planning Meeting Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
NGO	Non Government Organisation Lembaga Swadaya Masyarakat
NPMU	National Project Management Unit Unit Manajemen Proyek Nasional
NTFP	Non-Timber Forest Products Hasil Hutan Bukan Kayu
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
PAKLIM	Policy Advice for Environment and Climate Change Program Advis Kebijakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
PDAM	Regional Water Supply Company Perusahaan Daerah Air Minum
PemDa	Regional Government Pemerintah Daerah
PemKab	District Government Pemerintah Kabupaten
PHBM	Forest Management through Community Participation Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
PLN	State Owned Electricity Company Perusahaan Listrik Negara
PNPM Mandiri	National Programme for Community Empowerment Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNPM PISEW	National Program for Community Empowerment in Regional Social Economy Infrastructure Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
pop.	Population Populasi
PRCF	People, Resources and Conservation Foundation Yayasan Manusia, Sumber daya alam, dan Konservasi

PRDB	Gross Regional Domestic Product Produk Regional Domestik Bruto
PT	Limited Liability Company Perseroan Terbatas
RAN-GRK	National Action Plan on Green House Gas Emission Reduction Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RAN-PI	National Action Plan Addressing Climate Change Rencana Aksi Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim
Renstra	Strategic Plan Rencana Strategis
RMA	Rapid Market Analysis Analisa Cepat terhadap Pasar
RPJMD	Medium-Term Regional Development Plans Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDes	Village Medium Term Development Plan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJP	Long Term Development Plan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RTRW	Spatial Plan Rencana Tata Ruang Wilayah
SHS	Solar Home Systems Listrik Rumah Tenaga Surya
SKPD	Regional Working Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
STIPER	Agriculture Academy Sekolah Tinggi Pertanian
TaRu	Directorate General of Spatial Planning Dirjen Penataan Ruang
TEEB	The Economics of Ecosystems and Biodiversity Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
TNC	The Nature Conservancy The Nature Conservancy
TNDS	Danau Sentarum National Park Taman Nasional Danau Sentarum
ToR	Terms of Reference Kerangka Acuan
UKP4	Presidential Working Unit for Supervision and Management of Development Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UN	United Nations Perserikatan Bangsa Bangsa
UNDP	United Nations Development Programme Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa
UNEP	United Nations Environment Programme Program Lingkungan Perserikatan Bangsa Bangsa
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change Convention Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
UNORCID	United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia Kantor PBB untuk Kordinasi REDD+ di Indonesia

UNSDKP	United Nation Sustainable Development Knowledge Platform Forum Pengetahuan PBB tentang Pembangunan Lestari
UU	State Law of Republic Indonesia Undang-Undang
VCA	Value Chain Analysis Analisa Rantai Nilai
WWF	World Wildlife Foundation World Wildlife Foundation
Yakobi	Indonesia Learning Community Foundation Yayasan Komunitas Belajar Indonesia

Executive Summary

Baseline development on public and private sector investments in Green Economy, 2012

Background

This survey was conducted to develop a baseline on investments by public and private sectors in support of Green Economy in three districts with forest based economies in 2012. This baseline serves as a starting point for analysis regarding sustainable development of the district at large, and more specifically sustainable activities in the district's main economic sectors, i.e. agroforestry, ecotourism, renewable energy, and non- timber forest products.

This assignment consists of desk research, data collection through interviews and documents analysis, and workshops. As a result, this report contains the background and methodology of this assignment, as well as a description of the deliverables: local understanding of the concept of Green Economy. The baseline of Green Economy investments for each district can be found in the separate sections.

The main indicator is the amount of investments (rupiah) that is distributed in 2012 over the subdistricts of the three districts through government programs, private sector investments, and community initiatives. Another indicator is the amount of new jobs that were created in support of Green Economy initiatives.

Besides showcasing the current status of Green Economy activities in the district, the baseline is also intended to serve as input for analysis of short term trends up to 2016. This baseline is developed to be able to recognize trends towards a Green Economy. Furthermore, this baseline serves as a tool for decision makers and planners to prioritize developments in support of Green Economy.

Ringkasan eksekutif

Pengembangan rona awal investasi sektor pemerintah dan swasta dalam Ekonomi Hijau, 2012

Latar belakang

Survei ini dilakukan untuk mengembangkan rona awal investasi oleh sektor pemerintah dan swasta dalam mendukung Ekonomi Hijau di tiga kabupaten dengan ekonomi berbasis hutan pada tahun 2012. Rona awal ini berperan sebagai titik mula untuk analisis terkait pembangunan berkelanjutan kabupaten tersebut secara menyeluruh, dan lebih khususnya kegiatan berkelanjutan di sektor-sektor utama ekonominya, yakni wanatani, ekowisata, energi terbarukan dan hasil hutan bukan kayu.

Tugas ini terdiri atas tinjauan pustaka, pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen, dan lokakarya. Sebagai hasil, laporan ini berisi latar belakang dan metodologi untuk tugas ini, dan juga deskripsi hasil yang dapat diperoleh: pemahaman lokal mengenai konsep Ekonomi Hijau. Rona awal Investasi Ekonomi Hijau untuk setiap kabupaten dapat dijumpai pada bagian terpisah.

Indikator utamanya adalah jumlah investasi (rupiah) yang didistribusikan pada tahun 2012 di seluruh kecamatan di ketiga kabupaten melalui berbagai program pemerintah, investasi sektor swasta, dan inisiatif masyarakat. Indikator lainnya adalah jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan dalam mendukung inisiatif Ekonomi Hijau.

Selain memamerkan status kegiatan Ekonomi Hijau saat ini di kabupaten tersebut, rona awal ini juga dimaksudkan untuk berperan sebagai masukan untuk analisis kecenderungan jangka pendek sampai 2016. Rona awal ini dikembangkan untuk dapat mengenali berbagai kecenderungan menuju Ekonomi Hijau. Selanjutnya, rona awal ini berperan sebagai sarana untuk para pembuat keputusan dan perencana untuk memrioritaskan pembangunan yang mendukung Ekonomi Hijau.

Local understanding

The concept of Green Economy can be found back in the vision and missions of the district governments, formulated in its mid-term regional development plan 2011-2015. Moreover, this 'green awareness' is consolidated in two districts that declared themselves as a kabupaten konservasi in 2003. Nevertheless, the current question is how they can earn from that status being a conservation district, after 10 years of conserving their forests for the sake of diminishing the impacts of climate change.

Therefore, when asked during interviews and focused group discussions, participants from different segments of the local society define Green Economy in line with international understandings, but, would add to it that it is now time for real action, instead of just collecting data and campaigning for the concept. Or, how can a remote, border area actually prosper with/from? its green assets?

Results of data collection

The highlights from the data collected in the three districts are presented in table 1.

Pemahaman lokal

Konsep Ekonomi Hijau dapat dijumpai dalam visi dan misi pemerintah kabupaten, dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2011-2015. Terlebih lagi, 'kesadaran hijau' ini dikonsolidasikan di dua kabupaten yang mencanangkan diri mereka sebagai *kabupaten konservasi* pada tahun 2003.

Namun demikian, pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana mereka dapat memperoleh penghasilan dari status tersebut sebagai kabupaten konservasi, setelah 10 tahun mengonservasi hutan-hutan mereka demi mengurangi dampak perubahan iklim.

Oleh karenanya, pada waktu wawancara dan diskusi kelompok terarah, para peserta dari berbagai segmen berbeda dari masyarakat setempat mendefinisikan Ekonomi Hijau sejalan dengan pemahaman internasional, tetapi, akan menambahkan padanya bahwa inilah saatnya untuk melakukan tindakan nyata, bukan hanya mengumpulkan data dan berkampanye untuk konsep tersebut. Atau, bagaimana sebuah daerah terpencil di perbatasan, dapat benar-benar makmur dengan aset hijaunya?

Hasil pengumpulan data

Gambaran dari data yang terkumpul di ketiga kabupaten dikemukakan dalam tabel 1.

Table 1. Green Economy Investments in Berau in 2012

Tabel 1. Investasi Ekonomi Hijau di Berau pada tahun 2012

Highlights	Amount of investments (Rp) based on collected data		
	Berau	**Kapuas Hulu**	**Malinau**
Investments *Investasi*	Rp 154.931.891.599,79	Rp 124.430.157.624,00	Rp 323.877.837.428,73
% of GRDP *% dari PDRB*	1,4	3,7	3
Highest investment in sector: *Investasi tertinggi pada sektor:*	Social Cultural *Sosial Budaya* Rp 41.612.939.370	Infrastructure *Infrastruktur* Rp 42.576.723.900	Capacity Building and Awareness Raising *Pembangunan Kapasitas dan Peningkatan Kesadaran* Rp 199.387.719.050
Lowest investment in sector: *Investasi terendah pada sektor:*	Capacity Building and Awareness Raising *Pembangunan Kapasitas dan Peningkatan Kesadaran* Rp 1.795.105.000	Decision making, *Pengambilan keputusan* Rp 500.000.000	Ecotourism *Ekowisata* Rp 705.800.000
Highest investment by interviewed stakeholder: *Investasi tertinggi oleh pemangku kepentingan yang diwawancarai:*	Culture and Tourism *Kebudayaan dan Pariwisata* Rp 81.964.711.628	Village Support Board *Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa* Rp 25.076.723.900	District Government – Gerdema, *Pemerintah Kabupaten– Gerdema* Rp 139.008.000.000,00
Lowest investment by interviewed stakeholder: *Investasi terendah oleh pemangku kepentingan yang diwawancarai:*	CSR Wood Industries Sector *CSR Sektor Industri Kayu* Rp 1.261.167.113	PRCF, Rp 194.000.000,00	Pemuda Katolik / Remaja Muslim, each 1.000.000 *Pemuda Katolik / Remaja Muslim, masing-masing 1.000.000*
Highest investment in subdistrict: *Investasi tertinggi di kabupaten:*	Segah *Segah* Rp 31.800.113.626	Kalis *Kalis* Rp 10.600.048.600,00	Malinau Utara *Malinau Utara* Rp 76.172.514.471
Lowest investment in subdistrict: *Investasi terendah di kabupaten:*	Batu Putih *Batu Putih* Rp 6.788.127.475	Bunut Hulu *Bunut Hulu* Rp 1.683.692.478,00	Kayan Hulu *Kayan Hulu* Rp 11.209.402.778,00
New jobs *Lapangan pekerjaan baru*	-	87 contract based 71 freelance *87 berbasis kontrak* *71 pekerja lepas*	811 contracts 402 freelancers *811 kontrak* *402 pekerja lepas*
Highest number by stakeholder: *Jumlah tertinggi oleh pemangku kepentingan:*	-	DPMU, 29 contract based (Embaloh Hulu) 24 freelance (Batang Lupar) *DPMU,* *29 berbasis kontrak (Embaloh Hulu)* *24 pekerja lepas (Batang Lupar)*	District Government – Gerdema *Pemerintah Kabupaten– Gerdema* 654 contracts
Highest number in subdistrict by stakeholder: *Jumlah tertinggi di kecamatan oleh pemangku kepentingan:*	-	31,5 in Embaloh Hulu by DPMU (29) and Culture & Tourism (2,5) *31,5 di Embaloh Hulu oleh DPMU (29) dan Kebudayaan & Pariwisata (2,5)*	186 contracts in Malinau Selatan by District Government through Gerdema program *186 kontrak di Malinau Selatan oleh Pemerintah Kabupaten melalui program Gerdema*

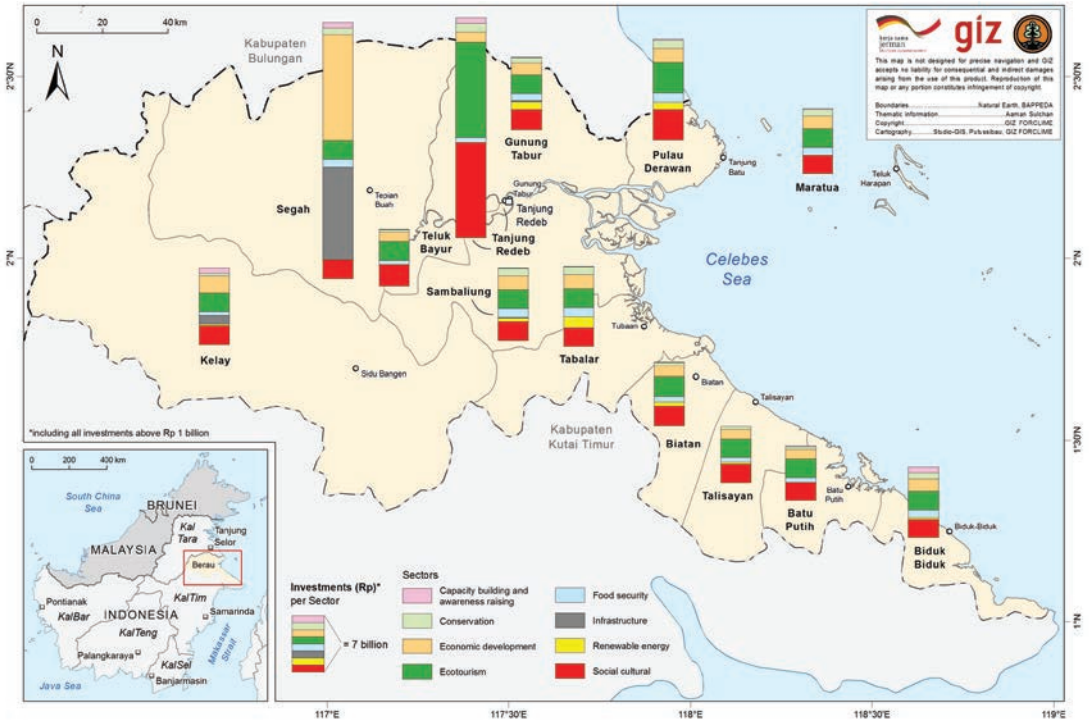

Map I: Investments (%) in support of Green Economy, sector, per stakeholder, per subdistrict, Berau, 2012

Peta I: Investasi (%) yang mendukung Ekonomi Hijau, sektor, per pemangku kepentingan, per kecamatan, Berau, 2012

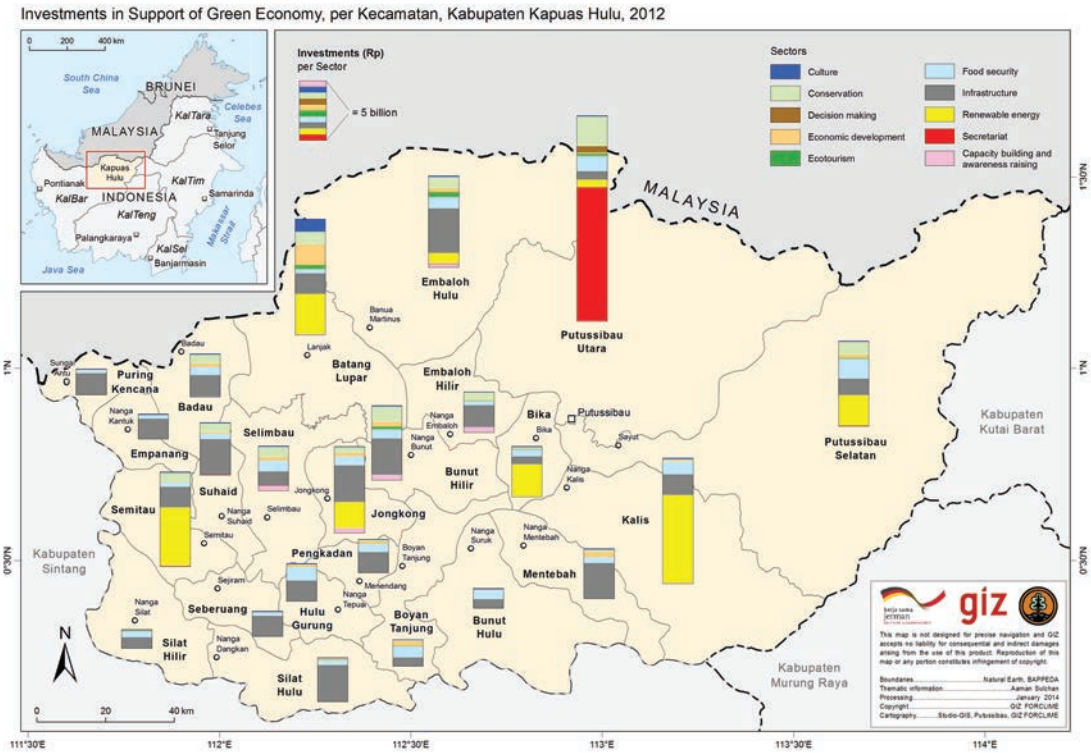

Map II: Investments (%) in support of Green Economy, sector, per stakeholder, per subdistrict, Kapuas Hulu, 2012

Peta II: Investasi (%) yang mendukung Ekonomi Hijau, sektor, per pemangku kepentingan, per kecamatan, Kapuas Hulu, 2012

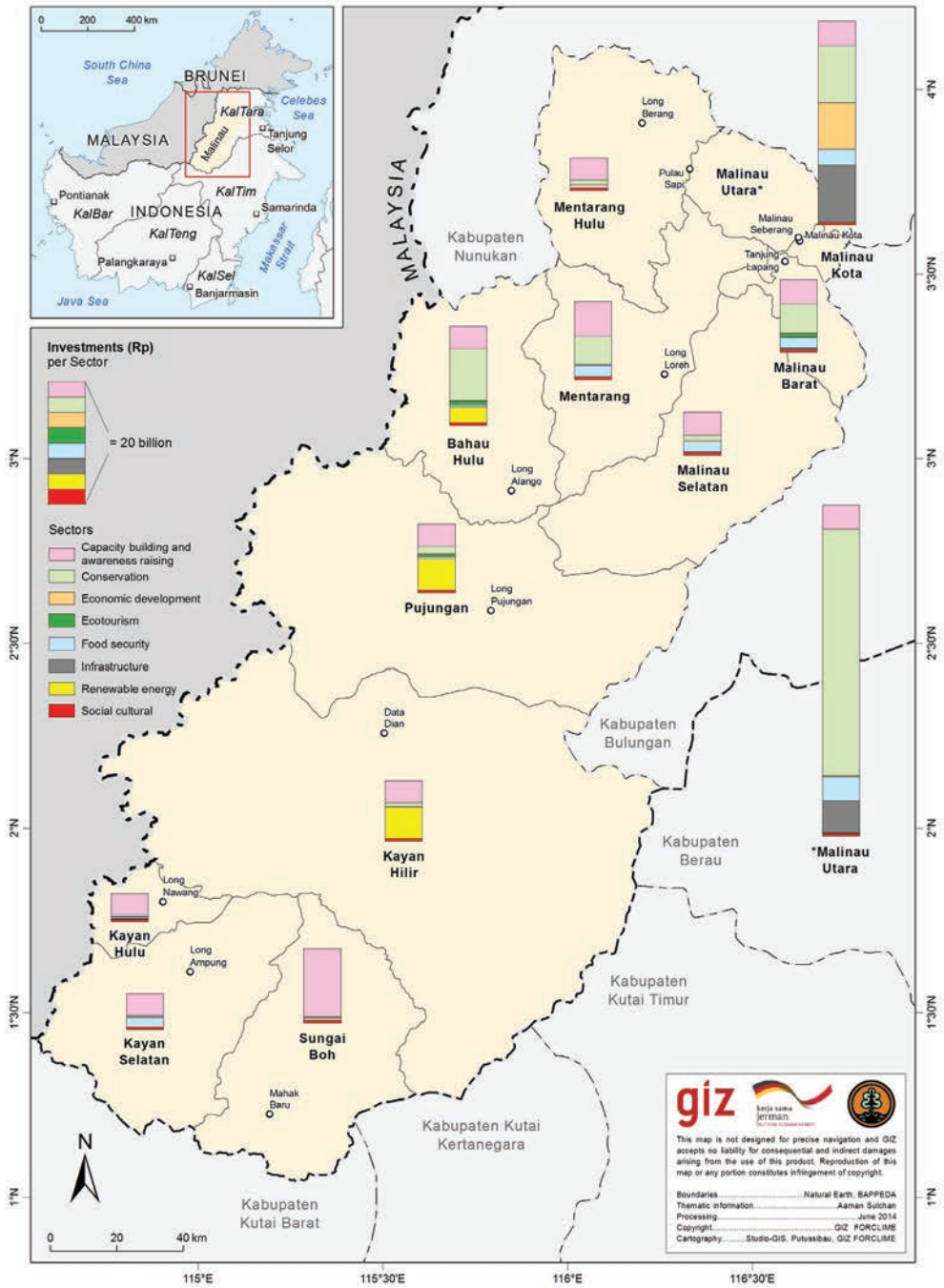

Map III: Investments (%) and new jobs in support of Green Economy, sector, per stakeholder, per subdistrict, Malinau, 2012

Peta III: Investasi (%) dan pekerjaan baru yang mendukung Ekonomi Hijau, sektor, per pemangku kepentingan, per kecamatan, Malinau, 2012

Recommendations

Based on the interviews and discussions during the survey in the three districts, recommendations can be grouped as follows:

1. ***Mainstreaming the Concept into policy making:***
   more awareness should be developed about the concept of Green Economy throughout all levels of governance, and how this should be inserted into policy and applied in practice; district government services should set the example, both in their daily operations as well as in their policy making and application;

2. ***Mainstreaming the Concept through District Marketing:***
   communication should be wide spread about programs and achievements related to Green Economy investments, both between government services as well as to society at large; it should be used as a marketing tool to promote the development of the district towards a Green Economy or, more specifically a district as part of the Heart of Borneo. More importantly in this case is to capitalize the results of these Green Economy investments into earnings for the districts, to answer the urging question of 'what is the benefit of being a kabupaten konservasi', or in more general terms, of the benefits of conservation activities to the welfare of the districts;

3. ***Improve and promote local, non-timber, forest products:***
   inventorize and promote the cultivation of alternative commodities from the forests, other than wood (non-timber forest products), such as wild honey, fish, cocoa, and latex; and develop technologies that are cheap, user friendly, cleaner and energy efficient. Issues that need to be overcome are the diversification of these local products, and the access to markets, both within the districts, as well outside the districts (national and international).

Rekomendasi

Berdasarkan wawancara dan diskusi selama survei di tiga kabupaten, rekomendasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. ***Mengarusutamakan Konsep tersebut dalam pembuatan kebijakan:***
   perlunya dikembangkan lebih banyak kesadaran mengenai konsep Ekonomi Hijau di seluruh tingkat pemerintahan, dan bagaimana hal ini dapat dipadukan dalam kebijakan dan diterapkan dalam praktik; dinas pemerintah kabupaten harus memberi teladan, baik dalam operasional mereka sehari-hari maupun dalam pembuatan kebijakan dan penerapannya;

2. ***Mengarusutamakan Konsep tersebut melalui Pemasaran Kabupaten:***
   komunikasi harus tersebar luas mengenai berbagai program dan pencapaian terkait dengan investasi Ekonomi Hijau, baik antar dinas pemerintahan maupun ke masyarakat secara luas; hal tersebut harus digunakan sebagai sarana pemasaran untuk mempromosikan pembangunan kabupaten menuju Ekonomi Hijau atau, secara lebih khusus, sebuah kabupaten sebagai bagian dari Jantung Kalimantan. Terlebih penting dalam kasus ini adalah untuk memanfaatkan hasil-hasil investasi Ekonomi Hijau ini menjadi pendapatan kabupaten, untuk menjawab pertanyaan yang mendesak tentang 'apakah manfaatnya menjadi sebuah kabupaten konservasi', atau dalam pengertian lebih umum, tentang manfaat kegiatan konservasi bagi kemakmuran kabupaten;

3. ***Meningkatkan dan mempromosikan hasil hutan bukan kayu lokal:***
   menginventarisasi dan mempromosikan pembudidayaan komoditi alternatif dari hutan, selain kayu (hasil hutan bukan kayu), seperti madu hutan, ikan, coklat, dan karet; dan mengembangkan teknologi yang murah, ramah pengguna dan lingkungan setempat, lebih bersih dan efisien energi; isu-isu yang harus diatasi adalah diversifikasi hasil-hasil lokal ini, dan akses ke pasaran, baik dalam kabupaten, maupun keluar kabupaten (nasional dan internasional).

4. ***Greening 'Brown Economy' practices:***
   economic activities that put much pressure on natural resources (e.g. wood industries, coal miningpalm oil plantations), should be reviewed in terms of resource and energy efficiency, waste control and management, and monitoring of actual reclamation of used lands

5. ***Optimizing sources of CSR***
   CSR funds are a source of funding that still needs to be further explored. Therefore, adjustments, good application and translation into local context of article 74 of law on companies no. 40 /2007 and government regulation no 47 / 2012 (3.2.3) are needed. Furthermore, a district regulation needs to be formulated in which is determined the percentage of csr in relation to investments and/or production. And, a distribution system needs to be developed and sustainable field support needs to be provided.

6. ***Building Centers of Excellence:***
   Centers of Excellence related to the cultivation of primary commodities (e.g. rubber, cocoa, agarwood) in each of the districts. With this, a meeting place is created for relevant local and international wisdom, that could become a place for learning among farmers in the districts.

7. ***Connect to existing policy programs and tools***
   to embed follow up on Green Economy initiatives in existing programs with similar objectives, both national (Mid-term Planning, UKP4, MP3EI, and I-GEM), as well as bilateral (such as DeCGG, PAKLIM, and UNORCID).

4. ***Menghijaukan praktik-praktik 'Ekonomi Coklat':***
   kegiatan ekonomi yang memberi tekanan besar terhadap sumber daya alam (misalnya hutan produksi, pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit), harus ditinjau dalam pengertian efisiensi sumber daya dan energi, pengendalian limbah dan pengelolaan, dan pemantauan reklamasi sesungguhnya dari lahan yang telah digunakan.

5. ***Mengoptimalisasikan sumber dana CSR:***
   Dana csr merupakan sumber dana yang masih perlu di tinjau lebih lanjut. Untuk itu diperlukan penyesuaian, penerapan tepat dan penerjemahan ke kondisi lokal daripada pasal 74 undang undang tentang perseroanno. 40 tahun 2007 dan peraturan pemerintah no. 47 tahun 2012 (3.2.3). Selain itu, perlu adanya peraturan daerah dimana diaturnya persentase dana csr dari investasi dan/ atau produksi sebuah perusahaan. Lalu, perlu dibangunkan sebuah system penyaluran dana dan bimbingan lapangan secara langsung dan berkelanjutan.

6. ***Membangun Pusat Unggulan:***
   Pusat Unggulan terkait budidaya komoditas yang menjadi unggulan (misalnya karet, coklat, gaharu) di masing-masing kabupaten. Dengan demikian terwujud tempat titik temu ilmu lokal dan internasional terkait yang dapat menjadi tempat pembelajaran petani di Kabupaten.

7. ***Terhubung dengan program-program kebijakan dan sarana yang ada***
   menanamkan tindak lanjut tentang inisiatif Ekonomi Hijau dalam program yang ada dengan tujuan serupa, baik nasional (RPJM, UKP4, MP3EI, dan I-GEM, maupun internasional (seperti DeCGG, PAKLIM, dan UNORCID).

1. Introduction

This survey was executed in three districts that are forest based economies in Kalimantan: Berau, Malinau, and Kapuas Hulu. The purpose of the surveys is to develop a baseline of public and private investments in Green Economy initiatives, in 2012. Eventually, these districts may serve as pilots in introducing and implementing Green Economy principles in other parts of Indonesia.

This survey is executed as part of the Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), which is a cooperation program between the governments of Indonesia and Germany. The German government, through its Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) commissioned the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, for the Technical Cooperation Module) and the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, for the Financial Cooperation Module) to support Indonesia's efforts through the Ministry of Forestry in the (1) reduction of GHG emissions, (2) conservation of biodiversity and (3) improvement of livelihoods.

The FORCLIME TC (technical cooperation) Strategic Plan has entered its second phase (2013 – 2016) which is to guide immediate actions towards tangible deliverables that contribute to a Green Economy. This report gives insight in the execution of one of the objectives of Strategic Area 4 of this Strategic Plan, i.e. the development of a baseline on investments in 2012, both by government and private sector as well as by community groups that are in line with the concept of a Green Economy.

As a result, and in line with the concept note and tor for this assignment, this report provides an overview of these investments in 2012 through tables, figures, and maps, showing the spread of investments and new jobs throughout the district.

1. Pendahuluan

Survei ini dilaksanakan di tiga kabupaten yang ekonominya berbasis hutan di Kalimantan: Berau, Malinau, dan Kapuas Hulu. Tujuan dari survei ini ialah untuk mengembangkan suatu rona awal investasi pemerintah dan swasta dalam inisiatif Ekonomi Hijau, pada tahun 2012. Pada akhirnya, ketiga kabupaten ini bisa merupakan perintis dalam memperkenalkan dan menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau di bagian-bagian lain Indonesia.

Survei ini dilaksanakan sebagai bagian dari Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), yang merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jerman. Pemerintah Jerman, melalui Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Federal (BMZ) mengutus Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, untuk Modul Kerjasama Teknis) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, untuk Modul Kerjasama Finansial) untuk mendukung usaha Indonesia dalam (1) pengurangan emisi GRK, (2) konservasi keanekaragaman hayati dan (3) peningkatan penghidupan.

Rencana Strategis Kerjasama Teknis FORCLIME (FORCLIME TC Strategic Plan) telah memasuki fase kedua (2013 – 2016) yaitu untuk memandu tindakan segera menuju hasil-hasil yang nyata yang berkontribusi terhadap Ekonomi Hijau. Laporan ini memberikan wawasan mengenai pelaksanaan salah satu sasaran daripada Bidang Strategis 4 dalam Rencana Strategis ini, yaitu pengembangan rona awal investasi pada tahun 2012, baik oleh sektor pemerintah maupun swasta dan juga oleh berbagai kelompok masyarakat yang sejalan dengan konsep Ekonomi Hijau.

Sebagai hasilnya, dan sejalan dengan catatan konsep dan kerangka acuan kerja untuk tugas ini, laporan ini memberikan tinjauan menyeluruh mengenai investasi tersebut pada tahun 2012 melalui tabel, gambar dan peta, menunjukkan penyebaran investasi di seluruh kabupaten.

The main targeted users are decision makers at the district level government, who may use it as a tool to prioritize for investments in sectors supporting Green Economy trends. In addition, community groups and private sector stakeholders can use this to prioritize for their green economy activities, and it can serve as recognition for their efforts and contribution to sustainable development of their district.

The report is divided into two parts. The first part consists of this document that presents the overall framework of the surveys in the three districts: chapter 2 highlights the theoretical framework the concept of Green Economy in different levels of application (global, national, and provincial), chapter 3 elaborates on the methodology of the survey, whereas chapter 4 sums up the conclusions, observations/lessons learned, and recommendations/outlooks based on the surveys in the three districts.

The district specific outcomes of the survey are presented in the second part, in separate sections, describing the context of the district, including the main stakeholders in to the district's economy, followed by the outcomes of each survey activity in the field.

Pengguna yang menjadi target utama adalah para pembuat kebijakan di pemerintahan tingkat kabupaten, yang dapat menggunakannya sebagai sarana untuk memrioritaskan investasi di sektor-sektor yang mendukung tren Ekonomi Hijau. Sebagai tambahan, kelompok masyarakat dan para pemangku kepentingan sektor swasta dapat menggunakan laporan ini untuk memprioritaskan kegiatan Ekonomi Hijau mereka, dan dapat berperan sebagai pengakuan untuk berbagai usaha dan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan di kabupaten mereka.

Laporan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah dokumen ini yang menyajikan kerangka kerja menyeluruh untuk survei ini yang dilakukan di ketiga kabupaten: dalam bab 2, kerangka teoretisnya menyoroti konsep Ekonomi Hijau pada berbagai tingkat penerapan (global, nasional dan provinsi), bab 3 menguraikan metodologi survei, sedangkan bab 4 merangkum simpulan, pengamatan/ pelajaran yang didapat, dan berbagai rekomendasi/pandangan berdasarkan survei ini di tiga kabupaten tersebut.

Hasil survei per kabupaten disajikan dalam bagian kedua, dalam subbagian terpisah, menggambarkan konteks kabupaten, termasuk para pemangku kepentingan utama dalam ekonomi kabupaten tersebut, diikuti dengan berbagai hasil setiap kegiatan survei di lapangan.

2. Theoretical framework

2.1 Green Economy

A Green Economy is defined as one that results in improved human well-being and social equity, whilst significantly reducing environmental risks and ecological scarcities (UNEP).

Keywords in this definition of Green Economy are human wellbeing, equity, and reducing environmental risks and ecological scarcities. It seeks to balance between interests of economic profit, environmental sustenance and social equity.

In other words, a Green Economy is "one which is **low carbon, resource efficient** and **socially inclusive"**

2. Kerangka kerja teoretis

2.1 Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia yang lebih baik dan kesetaraan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP).

Kata-kata kunci dalam definisi Ekonomi Hijau ini adalah kesejahteraan manusia, kesetaraan, dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Ekonomi Hijau berusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan manfaat ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup dan kesetaraan sosial.

Dengan perkataan lain, Ekonomi Hijau ialah "ekonomi yang **rendah karbon, efisien sumber daya dan inklusif secara sosial"**

2.1.1 Elements of Green Economy

In line with abovementioned definition, to integrate conservation and development, GIZ developed its strategy with the objective to identify and implement sustainable economic activities that contribute to the improvement of livelihoods, reduction of GHG emissions and biodiversity conservation (GIZ FORCLIME, 2013). Thus, to develop a baseline presenting the *greenness* of the districts economies, from this objective the following elements can be derived:

- Sustainable economic activities, such as agroforestry, ntfp, eco-tourism, renewable energy

2.1.1 Unsur-unsur Ekonomi Hijau

Sejalan dengan definisi di atas, untuk memadukan konservasi dan pembangunan, GIZ mengembangkan strateginya dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan kegiatan ekonomi berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan penghidupan, pengurangan emisi GRK dan konservasi keanekaragaman hayati (GIZ FORCLIME, 2013). Jadi, untuk mengembangkan rona awal yang mengemukakan *kehijauan* ekonomi ketiga kabupaten tersebut, unsur-unsurnya dapat diturunkan dari tujuan ini:

- Kegiatan ekonomi berkelanjutan, seperti agroforestri (wanatani), HHBK, eko-wisata, energi terbarukan

- Improvement of livelihoods
- Reduction of GHG emissions
- Biodiversity conservation

The focus of this baseline is to provide basic information about public and private investments in support of Green Economy in 2012 in the aforementioned pilot-districts. In other words, the scope of this survey is to collect data related the amounts invested in sustainable economic activities that would have a greening impact on the other elements. This will be further elaborated in 3.2 Indicators.

2.1.2 International initiatives

The Green Economy Initiative is part of an international commitment, initiated by the United Nations and since the RIO+20 conference in 2011 considered as integral part of sustainable development policy to diminish poverty (BAPPENAS, 2013). The Green Growth Knowledge Platform (GGKP), a joint effort by the OECD, UNEP, the World Bank and the Global Green Growth Institute, is bringing together the keywords from about 13 different varieties of definitions to identify indicators that can be used to measure developments related to Green Economy. To capture the aim of a Green Economy to also incorporate the enhancement of human development and the condition of the poor and vulnerable, the element of inclusiveness is introduced to also aim at improved human well-being and social equity (UNSDKP and Worldbank, 2012). Therefore, OECD narrowed down the identified indicators to headline indicators (GGKP, 2013; Annex 3):

- natural assets
- environmental and resource productivity/intensity
- environmental life quality and safety
- policies and opportunities
- socio-economics

- Peningkatan penghidupan
- Pengurangan emisi GRK
- Konservasi keanekaragaman hayati

Fokus dari rona awal ini adalah untuk memberikan informasi dasar mengenai investasi pemerintah dan swasta dalam mendukung Ekonomi Hijau pada tahun 2012 di ketiga kabupaten perintis tersebut. Dengan perkataan lain, lingkup survei ini adalah untuk mengumpulkan data terkait jumlah yang diinvestasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi berkelanjutan yang akan memberi dampak menghijaukan pada unsur-unsur lainnya. Hal ini akan diuraikan lebih jauh pada butir 3.2 Indikator

2.1.2 Inisiatif Internasional

Inisiatif Ekonomi Hijau adalah bagian dari suatu komitmen internasional, diawali oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dan sejak konferensi RIO+20 pada tahun 2011 dianggap sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan (BAPPENAS, 2013). The Green Growth Knowledge Platform (GGKP), suatu usaha gabungan oleh OECD, UNEP, Bank Dunia dan Global Green Growth Institute, menggabungkan semua kata kunci dari kira-kira 13 jenis variasi definisi yang berbeda-beda untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan terkait dengan Ekonomi Hijau. Untuk menangkap tujuan Ekonomi Hijau untuk juga memadukan peningkatan pengembangan manusia dan kondisi kaum miskin dan rentan, unsur inklusivitas (ketercakupan) diperkenalkan untuk juga ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial (UNSDKP dan Bank Dunia, 2012). Oleh karena itu, OECD mempersempit berbagai indikator yang telah teridentifikasi menjadi indikator utama (GGKP, 2013; Lampiran 3).

- aset alami
- lingkungan hidup dan produktivitas/ intensitas sumber daya
- kualitas hidup dan keamanan lingkungan
- kebijakan dan peluang
- sosio-ekonomi

Eventually, these indicators should provide evidence for monitoring, analysis, benchmarking and communication.

2.2 Green Economy and Indonesia

2.2.1 National framework

In the national context of Indonesia, Green Economy is considered a development paradigm based on a resource efficiency approach with strong emphasis on the following components:

- Internalizing cost of natural resources depletion and environmental degradation (including willingness to pay by the actors for the environment recovery and improvement)
- Alleviating poverty
- Creating decent jobs, and
- Ensuring sustainable economic growth.

Green Economy in Indonesia comprises the sectors of: agriculture, construction, city/ urban planning, energy, fisheries, forestry, manufacturing, tourism, transportation, waste management, water.

The Indonesian long term national development planning (RPJP) 2005 -2020 has one vision and eight mission statements. Mission No. 6, realizing an Indonesia that is balanced and sustainable comprises four goals:

a. Improved management of development: maintain the balance among the utilization, sustainability, availability and use of natural resources and environment
b. Increased economic use of natural resources and the environment in a sustainable manner
c. Improved management of natural resources and the environment for supporting the quality of life

Akhirnya, indikator ini harus memberi bukti untuk pemantauan, analisis, perbandingan dan komunikasi.

2.2 Ekonomi Hijau dan Indonesia

2.2.1 Kerangka kerja nasional

Dalam konteks nasional Indonesia, Ekonomi Hijau dianggap sebagai paradigma pembangunan yang didasarkan pada pendekatan efisiensi sumber daya dengan penekanan kuat pada beberapa komponen berikut:

- Menginternalisasi biaya kehilangan sumber daya alam dan degradasi lingkungan (termasuk kesediaan untuk membayar oleh para pelaku untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup)
- Mengentaskan kemiskinan
- Menciptakan pekerjaan yang layak, dan
- Memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekonomi Hijau di Indonesia terdiri atas sektor: pertanian, konstruksi, perencanaan kota/ urban, energi, perikanan, kehutanan, pabrikan, pariwisata, transportasi, pengelolaan limbah, air.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia (RPJP) 2005 -2020 memiliki satu pernyataan visi dan delapan pernyataan misi. Misi No. 6, mewujudkan Indonesia yang seimbang (asri) dan lestari terdiri atas empat sasaran:

a. peningkatan pengelolaan pembangunan: memelihara keseimbangan dalam pemanfaat, keberlanjutan, ketersediaan dan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan
b. peningkatan penggunaan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan cara berkelanjutan
c. peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kualitas hidup

d. Provision of beauty and comfort of life and increased preservation and utilization of biodiversity as the basic asset of national development

The corresponding sectors work along a four track strategy: pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment; leading to a sustainable development policy through internalization and integration of economic, social and environmental concerns and improving the carrying capacity to achieve economic growth, improvement of job opportunities and poverty reduction.

The national Indonesian Development Planning Board considers reducing emission as a key issue to achieve Green Economy (GIZ, 2013).

The Indonesian government has undertaken the following actions related to the application of the Green Economy approach:

- Law no. 17/2007 on mainstreaming Green Economy into long term national development planning: "the green and everlasting Indonesia"
- Law no. 32/2009 on Environmental Protection and Management; the use of economic instrument to achieve sound environmental management without sacrificing economic growth.
- The National Action Plan on Green House Gas Emission Reduction (RAN-GRK); 26%-41% GHG emissions reduction.
- Ratification of international frameworks, i.e.: the *United Nations Framework of Climate Change Convention* (UNFCCC) through Law No. 6/1994; the Kyoto Protocol through Law no. 17/2004.
- The National Action Plan on Climate Change (RAN-PI), 26 November 2007; commitment by the Ministry of Environment to mitigate GHG and climate change.

d. Penyediaan keasrian dan kenyamanan hidup dan peningkatan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai aset dasar pembangunan nasional

Sektor-sektor yang berhubungan bekerja mengikuti strategi empat jalur: pro-pertumbuhan, pro-pekerjaan, pro-orang miskin, pro-lingkungan; menuju pada suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui internalisasi dan integrasi masalah-masalah ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas dukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia menganggap pengurangan emisi GRK sebagai masalah kunci untuk mencapai Ekonomi Hijau (GIZ, 2013).

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa tindakan berikut terkait dengan aplikasi pendekatan Ekonomi Hijau.

- Undang-undang no. 17/2007 mengenai pengarusutamaan Ekonomi Hijau ke dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang: "Indonesia hijau dan lestari"
- Undang-undang no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang baik tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
- Rencana Aksi Nasional tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); pengurangan emisi GRK sebesar 26%-41%.
- Ratifikasi kerangka kerja internasional, yaitu : *Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim* (UNFCCC) melalui Undang-undang No. 6/1994; Protokol Kyoto melalui Undang-undang no. 17/2004.

- Host the13th UN Conference of Parties (COP) on Global Warming in Bali (December 3-14, 2007).
- Presidential commitment in 2009: to reduce emission with 26% by 2020 and with 41% by international support.
- The National Planning Board launched the *Indonesia's Climate Change Trust Fund* in September 2009 (UNDP,2012).

As an additional note, the principles of Green Economy are already formulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Article 33, bullet 3, that declares that:

"The land, the waters and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people.

And bullet 4, that:
"The organization of the national economy shall be conducted on the basis of economic democracy upholding the principles of togetherness, efficiency with justice, continuity, environmental persepective, self-sufficiency, and keeping a balance in the progress and unity of the national economy". (Akib, 2014)

2.2.2 Provincial frameworks

The three pilot districts are located in three different provinces on Kalimantan: Malinau in the newly established North Kalimantan, separated from East Kalimantan since October 2012, Berau in East Kalimantan, and Kapuas Hulu in West Kalimantan (map 2.1).

- Rencana Aksi Nasional tentang Perubahan Iklim (RAN-PI), 26 November 2007; komitmen oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk memitigasi GRK dan perubahan iklim.
- Menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak (COP) ke 23 tentang Pemanasan Global di Bali (3-14 Desember, 2007).
- Komitmen Presiden pada tahun 2009: untuk mengurangi emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dan sebesar 41% dengan dukungan internasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan *Indonesia's Climate Change Trust Fund* (Dana Perubahan Iklim) pada bulan September 2009 (UNDP,2012).

Sebagai catatan tambahan, prinsip-prinsip Ekonomi Hijau sudah tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33, ayat 3, yang menekankan bahwa:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat",

dan ayat 4, bahwa:
"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." (Akib, 2014)

2.2.2 Kerangka kerja provinsi

Ketiga kabupaten perintis terletak di tiga provinsi berbeda di Kalimantan: Malinau di Kalimantan Utara yang baru ditetapkan sebagai kabupaten, dipisahkan dari Kalimantan Timur sejak Oktober 2012, Berau di Kalimantan Timur, dan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat (peta 2.1).

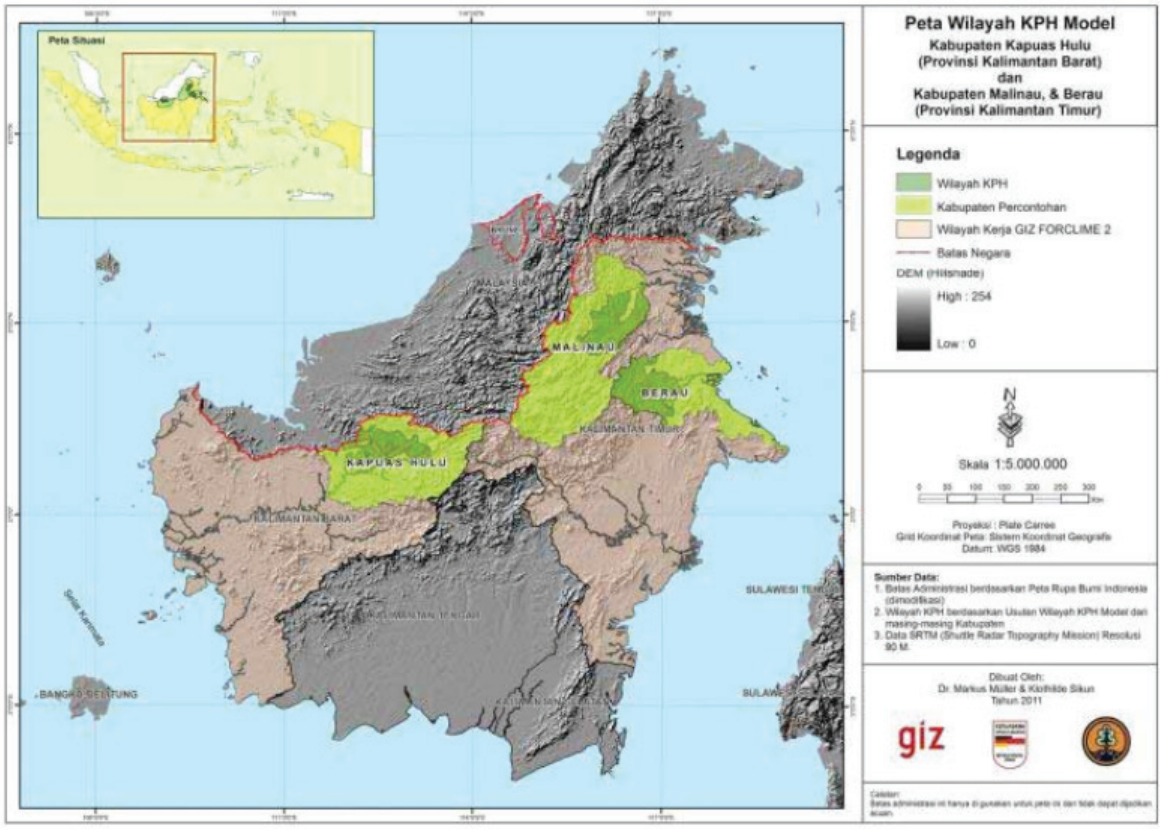

HoB Initiative, __

Inisiatif HoB , __

Map 2.1 Administrative borders of the three pilot-districts, Kalimantan

Peta 2.1 Perbatasan administratif dari ketiga kabupaten perintis, Kalimantan

East Kalimantan

East Kalimantan follows the proceedings from the UN Climate Change Conferences in Bali and Copenhagen. Furthermore, in 2009, the provincial government was involved in the Governors' Climate and Forests Task Force (GCF) in California. This triggered the organization of the first East Kalimantan Summit in 2010 to further design the framework for sustainable development as a means to reduce global warming (Iskak, 2010). During this Summit, the governor of East Kalimantan signed the East Kalimantan Green Declaration that strives to apply green governance in a multi-stakeholders setting that includes social and environmental protection while guaranteeing the welfare development of its society (KADIN Kaltim, 2010). During the second East Kalimantan Summit in 2013, a vision was presented of

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur mengikuti prosiding dari Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali dan Kopenhagen. Selanjutnya, pada tahun 2009, pemerintah kabupaten terlibat dalam Satuan Tugas Iklim dan Hutan Para Gubernur (GCF) di Kalifornia. Ini memicu pengorganisasian Pertemuan Puncak Kalimantan Timur yang pertama pada tahun 2010 untuk merancang lebih jauh kerangka kerja untuk pembangunan berkelanjutan sebagai sarana untuk mengurangi pemanasan global (Iskak, 2010). Disaat Pertemuan Puncak ini, gubernur Kalimantan Timur menandatangani Deklarasi Kalimantan Timur Hijau yang berusaha untuk menerapkan tata kelola hijau dalam latar multi-pemangku kepentingan yang mencakup perlindungan sosial dan lingkungan hidup sembari menjamin pembangunan kesejahteraan masyarakatnya (KADIN Kaltim, 2010). Selama Pertemuan Puncak Kalimantan Timur kedua, suatu

East Kalimantan 2030 as a Green Economy with Equity, that entails an economic transformation from a dependency on oil, gas, coal towards an economy relying on renewable natural resources, e.g. the exploitation of renewable energy, tourism and agriculture (Kaltim, 2013).The concept of Green Growth / Green Economy was further discussed in accordance with the national 4-tracks strategy of pro-growth, pro-poor, pro-job, and pro-environment involving all related sectors, including putting limits to East Kalimantan's primary production sector of oil, gas and mining (Sukadar, 2013). Also, during this Summit, the governor of East Kalimantan signed an MoU with the Global Green Growth Institute, who would partner to support the integration of green growth into the medium-term development plan for the period 2014 to 2018 (GGGI, 2013).

Meanwhile, the Master plan for the acceleration and broadening of the economic development of Indonesia (MP3EI) 2011-2025 considers the Kalimantan Corridor with priority commodities such as oil and gas, coal, palm oil, iron, bauxite, and wood products (Setiawati, 2012). In that, greening the MP3EI master plan, for example at the point of waste management, would contribute to the reduction of greenhouse gas emissions (Hasan, 2013).

Furthermore, Presidential Decree no. 3, 2012 on the spatial planning of the island of Kalimantan (TaRu, 2012), prescribes that at least 45% of Kalimantan is dedicated as conservation area for biodiversity and protected rainforests.

North Kalimantan

On October 25, 2012, Malinau and the districts of Tarakan, Bulungan, Nunukan, and Tana Tidung formed the Province of North Kalimantan, which is a separation from East Kalimantan Province. While still in a transition phase, much of the policy is still

visi mengenai Kalimantan Timur 2030 dikemukakan sebagai Ekonomi Hijau dengan Kesetaraan, yang memerlukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada minyak bumi, gas, dan batu bara ke arah ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam terbarukan, misalnya eksploitasi energi terbarukan, pariwisata dan pertanian (Kaltim, 2013). Konsep Pertumbuhan Hijau / Ekonomi Hijau dibicarakan lebih jauh sesuai dengan strategi nasional empat jalur yaitu pro pertumbuhan, pro kemiskinan, pro lapangan kerja dan pro lingkungan, melibatkan semua sektor terkait, termasuk menetapkan pembatasan pada sektor produksi utama Kalimantan Timur, yaitu minyak, gas dan pertambangan (Sukadar, 2013). Juga, selama Pertemuan Puncak itu, gubernur Kalimantan Timur menandatangani sebuah Nota Kesepahaman (MoU) dengan Global Green Growth Institute, yang akan bermitra untuk mendukung integrasi pertumbuhan hijau ke dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk masa tahun 2014 sampai 2018 (GGGI, 2013).

Sementara itu, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 menganggap Koridor Kalimatan dengan komoditi prioritas seperti minyak bumi dan gas, batu bara, kelapa sawit, besi, bauksit dan produk kayu (Setiawati, 2012). Dengan itu, menghijaukan rencana induk MP3EI, misalnya pada titik pengelolaan limbah, akan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (Hasan, 2013).

Selanjutnya, Peraturan Presiden no. 3, 2012 mengenai rencana tata ruang pulau Kalimantan (TaRu, 2012), menetapkan bawha paling sedikit 45% dari pulau Kalimantan diabdikan sebagai wilayah konservasi untuk keanekaragaman hayati dan hutan hujan tropis yang dilindungi.

Kalimantan Utara

Pada tanggal 25 Oktober 25, 2012, Malinau dan kabupatan Tarakan, Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung membentuk Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan pemisahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Sementara masih dalam fase peralihan, sebagian besar

relying on the provincial government of East Kalimantan (see previous section).

West Kalimantan

In the context of the province of West Kalimantan, in 2012 WWF has conducted a seminar on 'Membangun Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat dan Wilayah Perbatasan Heart of Borneo' (WWF, 2012) to address Green Economy as an approach to promote local capacity, both human and natural, and problems of regional planning (tenurial issues).

The provincial government of West Kalimantan expresses its attention for a Green Economy, in its long term planning 2007 – 2027 formulated in 9 mission statements, among which are the management of natural resources and quality improvement of its human resources (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2008).

2.2.3 Multilateral framework: Heart of Borneo Initiative

The Heart of Borneo Initiative is a trans boundary collaboration among Brunei, Indonesia, and Malaysia, initiated by a joint Declaration by the respective governments, covering an area of 22 million hectares. The aim of the initiative is to enable conservation and sustainable development that improves the welfare of those living on the island while minimizing deforestation, forest degradation and the associated loss of biodiversity and ecosystem services.

dari kebijakannya masih bergantung pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur (lihat bagian sebelumnya).

Kalimantan Barat

Dalam konteks provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2012 WWF telah menyelenggarakan sebuah seminar mengenai 'Membangun Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat dan Wilayah Perbatasan Heart of Borneo' (WWF, 2012) untuk membahasa Ekonomi Hijau sebagai suatu pendekatan untuk meningkatkan kapasitas lokal, baik manusia dan alam, dan berbagai masalah perencanaan regional (masalah tenurial).
Pemerintah provinsi Kalimantan Barat menyatakan perhatiannya untuk Ekonomi Hijau, dalam perencanaan jangka panjangnya 2007 - 2027 yang dirumuskan dalam 9 pernyataan misi, di antaranya adalah pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2008).

2.2.3 Kerangka kerja multilateral: Inisiatif Jantung Kalimantan (Heart of Borneo)

Inisiatif Heart of Borneo merupakan kerja sama lintas perbatasan antara Brunei, Indonesia, dan Malaysia, diawali dengan Deklarasi bersama oleh masing-masing pemerintah, mencakup daerah seluas 22 juta hektar. Sasaran dari inisiatif tersebut ialah untuk memampukan konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan mereka yang hidup di pulau tersebut sembari meminimalisir deforestasi, degradasi hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati terkait dan layanan lingkungan.

HoB Initiative, 2014

Map 2.2: Valuing HoB's Natural Capital

HoB Initiative, 2014

Peta 2.2: Menilai Modal Alam HoB

The importance of the Green Economy approach to the Heart of Borneo Initiative lies in that the initiative strives to develop an economy in which the area's natural capital is sustained and, where possible, restored – with improved human well-being and social equity among the main results Therefore, this initiative aims to draw the attention of policy- and decision-makers to the importance and value of HoB natural capital (map 2.2) and to underscore the economic necessity of sustaining it through policies, regulations, incentives, investments and on -the-ground solutions Moreover, the approach is not limited to the heart of Borneo itself, which is home to approximately 6% of world's biodiversity, it also takes into account the areas that are impacted or have an impact on this core, or in other words, *hilirisasi*, or from

Pentingnya pendekatan Ekonomi Hijau terhadap inisiatif Heart of Borneo yaitu bahwa inisiatif tersebut berusaha membentuk ekonomi yang mempertahankan modal alam daerah tersebut dan, bilamana mungkin, memulihkan -- dengan kesejahteraan manusia yang lebih baik dan kesetaraan sosial di antara hasil-hasil utamanya. Oleh karenanya, inisiatif ini bertujuan untuk menarik perhatian para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan mengenai kepentingan dan nilai modal alam HoB (peta 2.2) dan untuk menggarisbawahi kebutuhan ekonomi untuk melestarikannya melalui berbagai kebijakan, peraturan, insentif, investasi, dan solusi di lapangan. Terlebih lagi, pendekatan tersebut tidak hanya terbatas pada heart of Borneo saja, yang merupakan rumah bagi kira-kira 6% keanekaragaman hayati dunia, pendekatan ini juga memperhitungkan daerah-daerah yang terdampak oleh atau berdampak

the upstream to the downstream areas (Van Paddenburg et al., 2012).

Figure 2.1 shows the connection between services provided by nature and economic activities that make use of and impact nature.

terhadap kawasan ini, atau dengan perkataan lain, *hilirisasi*, atau daerah dari hulu ke hilir (Van Paddenburg et al., 2012).

Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara layanan yang diberikan alam dan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan dan memberi dampak pada alam.

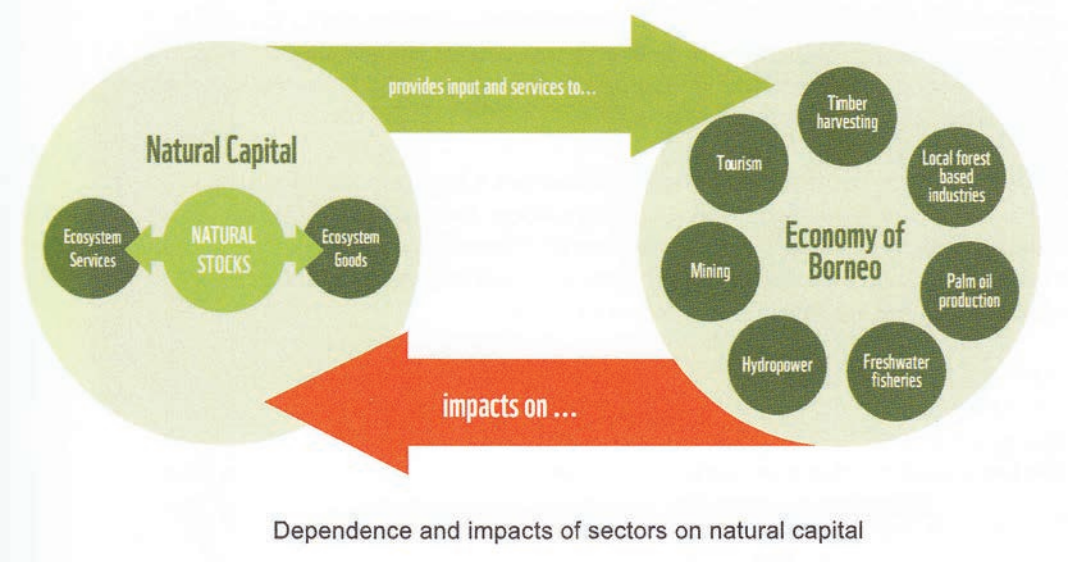

Van Paddenburg et al., 2012

Van Paddenburg et al., 2012

Figure 2.1: Dependence and impacts of sectors on natural capital

Gambar 2.1: Ketergantungan dan dampak berbagai sektor pada modal alam

The following objectives of the Heart of Borneo Initiative have been formulated:

1. To support sustainable natural resources management in conservation areas, protected areas network as well as production forest and other land uses;
2. The implementation of policy and law enforcement that supports sustainable HoB area management with consideration to both multilateral and bilateral existing agreements;
3. The implementation of sustainable development based on scientific

Berikut telah dirumuskan sasaran dari Inisiatif Heart of Borneo:

1. Mendukung pengelolaan sumber daya berkelanjutan di daerah-daerah konservasi, jejaring daerah lindung, dan juga hutan produksi dan tata guna lahan lainnya;
2. Implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang mendukung pengelolaan daerah HoB berkelanjutan dengan pertimbangan terhadap kesepakatan multilateral maupun bilateral yang sudah ada.
3. Implementasi pembangunan berkelanjutan berdasarkan metode ilmiah dan kearifan

methods and local wisdom for community's welfare improvement. This will include application of sustainable management, protection, education and training initiatives, as well as other activities relevant to cross boundary management activities, conservation and responsible production in the HoB area;

The Initiative develops programs in trans-boundary management, protected areas management, sustainable natural resources management, ecotourism development, and capacity building (HoB, 2014)

Figure 2.2 shows HoBI's policy package towards a Green Economy. With this approach, valuing natural services becomes an important part in planning, policy, and decision making of this area.

lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini akan termasuk penerapan pengelolaan berkelanjutan, perlindungan, pendidikan dan inisiatif pelatihan, dan juga kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan pengelolaan lintas perbatasan, konservasi dan produksi bertanggung jawab di daerah HoB.

Inisiatif ini mengembangkan berbagai program dalam pengelolaan lintas perbatasan, pengelolaan daerah lindung, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pengembangan ekowisata, dan pembangunan kapasitas (HoB, 2014)

Gambar 2.2 menunjukkan paket kebijakan HoBI yang mengarah menuju Ekonomi Hijau. Dengan pendekatan ini, penilaian layanan alam menjadi bagian penting dalam perencanaan, pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah ini.

Source: Van Paddenburg et al., 2012

Figure 2.2: Heart of Borneo – Green Economy policy package to deliver sustainable development and conservation

Sumber: Van Paddenburg et al., 2012

Gambar 2.2: Paket kebijakan Heart of Borneo--Ekonomi Hijau untuk menghasilkan pembangunan berkelanjutan dan konservasi

2.2.4 District frameworks

The district frameworks for a Green Economy approach can be found in the respective sections. Based on their vision and mission statements of each of the pilot districts, the tendency and readiness towards Green Economy are analyzed. Annex 1 gives an overview of the vision and mission statements of all three pilot-districts.

2.2.4 Kerangka kerja kabupaten

Kerangka kerja kabupaten untuk pendekatan Ekonomi Hijau dapat dijumpai pada subbagian masing-masing. Berdasarkan pernyataan visi dan misi dari masing-masing kabupaten perintis, telah dilakukan analisis kecenderungan dan kesiapan menuju Ekonomi Hijau. Lampiran 1 memberikan tinjauan sekilas dari pernyataan visi dan misi ketiga kabupaten perintis tersebut.

3. Methodology

3.1 Deliverables

In accordance to the ToR for this assignment, the agreed milestones and outputs are as follows:

- Identification of local understanding related to the Green Economy
- Database of investments as a tool for priority setting for future investments
- Map visualizing distribution and amount of investments
- Trends of investment by 2016: business as usual trend vs Green Economy innovation trend as recommendation
- Workshop on preliminary results and feedback
- Report and publication of findings
- Workshop on final results and follow up

Matrices of investments by various stakeholders should be the outcome of further discussions with the stakeholders in the districts upon reception of the final results of this survey, i.e. the baseline in their respective districts. Together with these stakeholders, further modes for data collection to analyze trends in the coming years will be determined.

3.2 Indicators

As mentioned under 2.1.1 (Elements of Green Economy) and in accordance to the objective under strategic area 4, the focus of this baseline is to provide basic information about public and private investments in support of Green Economy in 2012 in the aforementioned pilot-districts. In other words, the scope of this survey is to collect data related the amounts invested in sustainable economic activities that would have a greening impact on the other elements. In addition, new jobs that may have been created as a result of these investments, serve as another

3. Metodologi

3.1 Hasil

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja untuk tugas ini, langkah-langkah yang disepakati dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- Identifikasi pemahaman lokal terkait Ekonomi Hijau
- Basis Data investasi Ekonomi Hijau sebagai sarana untuk penetapan prioritas untuk investasi di masa depan.
- Peta yang memvisualisasikan penyebaran dan jumlah investasi
- Tren investasi sampai tahun 2016: tren/kecenderungan bisnis seperti biasa vs tren inovasi Ekonomi Hijau sebagai rekomendasi
- Lokakarya tentang hasil-hasil pendahuluan dan umpan balik
- Laporan dan publikasi temuan
- Lokakarya tentang hasil akhir dan tindak lanjut

Matriks investasi oleh para pemangku kepentingan harus menjadi keluaran diskusi lanjutan dengan para pemangku kepentingan di ketiga kabupaten setelah diterimanya hasil akhir survei ini, yaitu rona awal di masing-masing kabupaten. Moda lanjutan untuk pengumpulan data untuk menganalisis tren dalam tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan bersama dengan para pemangku kepentingan ini.

3.2 Indikator

Sebagaimana disebutkan dalam 2.1.1 (Unsur-unsur Ekonomi Hijau) dan sesuai dengan tujuan dalam bidang strategis 4, fokus dari rona awal ini adalah untuk menyediakan informasi dasar mengenai investasi pemerintah dan swasta yang mendukung Ekonomi Hijau pada tahun 2012 di ketiga kabupaten perintis tersebut. Dengan perkataan lain, cakupan survei ini adalah untuk mengumpulkan data terkait jumlah yang diinvestasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi berkelanjutan yang akan memberi dampak menghijaukan

indicator to measure the condition of Green Economy in these pilot-districts. In summary:

- Financial investments (Rp):

  the amounts invested by government, private sector and community groups into sectors that support Green Economy-principles, e.g.: agroforestry (comprising of sustainable forestry, agriculture and horticulture), eco-tourism, non-timber forest products, and renewable energy.

- New jobs (contract / freelance):

  the amount of new jobs, directly or indirectly due to these investments, taken up by workforce of people between the age of 15 to 64 years who are capable to work and willing to work even though there is no immediate offer to work (Indonesian Law UU No. 13 / 2003). In the case of this survey, the new jobs may consist of those with a contract limited to a timeframe and those contracted on a not-determined time frame (Ministry of Labor Force).

3.2.1 Green Economy Investment vs. GRDP

With regards to the earlier mentioned headline indicators as presented by the OECD (annex 3), these indicators (financial investments and new jobs) are part of the socio- economic headline (5), looking into the themes of macro-economy, trade and regulation and the labor market. At the same time, a general indicator to measure the size of an economy is the growth and composition of GDP of the districts, or GRDP. Therefore, to compare, the investments in support of Green Economy are set against the total Gross Regional Domestic Product (GRDP).

It needs to be noted that, although, not all activities found during this survey are covered under the sectors that comprise the

pada unsur-unsur lainnya. Sebagai tambahan, pekerjaan baru yang mungkin telah diciptakan sebagai hasil investasi ini, menjadi indikator lain untuk mengukur kondisi Ekonomi Hijau di ketiga kabupaten perintis ini. Sebagai ringkasan:

- Investasi Keuangan (Rp):

  jumlah yang diinvestasikan oleh pemerintah, sektor swasta dan berbagai kelompok masyarakat ke sektor-sektor yang mendukung prinsip Ekonomi Hijau, misalnya: agroforestri (terdiri atas kehutanan berkelanjutan, pertanian dan hortikultura), eko-wisata, hasil hutan bukan kayu, dan energi terbarukan.

- Pekerjaan baru (kontrak/pekerjaan lepas)

  jumlah pekerjaan baru, langsung atau tidak langsung akibat investasi ini, dilakukan oleh tenaga kerja manusia antara usia 15 sampai 64 tahun yang mampu bekerja dan bersedia bekerja walaupun belum ada penawaran pekerjaan langsung (UU No. 13 / 2003). Dalam kasus survei ini, pekerjaan baru tersebut mungkin terdiri atas mereka yang terikat kontrak terbatas pada suatu kerangka waktu dan mereka yang terikat kontrak dengan kerangka waktu tidak ditentukan (Kementerian Tenaga Kerja).

3.2.1 Investasi Ekonomi Hijau vs. PDRB

Dengan memerhatikan indikator utama yang disebutkan sebelumnya sebagaimana dikemukakan oleh OECD (lampiran 3), indikator ini (investasi dana dan pekerjaan baru) merupakan bagian dari judul sosio-ekonomi (5), meninjau pada tema- tema makro-ekonomi, perdagangan dan peraturan dan pasaran tenaga kerja. Pada saat yang sama, sebuah indikator umum untuk mengukur besaran sebuah ekonomi adalah pertumbuhan dan komposisi PDB kabupaten, atau PDRB. Oleh karenanya, untuk perbandingan, maka investasi ke dalam Ekonomi Hijau dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total.

GRDP as stated in the statistics of the districts, these activities are still considered in the comparison with the GRDP, as they would have an indirect impact on the economy, such as Capacity Building and Awareness Raising, Conservation, and Decision Making activities. Table 3.1 shows the sets of sectors of economic activities, respectively, GRDP as determined by BPS, the Central Office for Statistics, and GEI, Green Economy Investments, as found during this survey.

Perlu dicatat bahwa, meskipun, tidak semua kegiatan yang dijumpai dalam survei ini tercakup dalam sektor yang menjadi unsur PDRB sebagaimana disebutkan dalam statistik kabupaten, kegiatan ini masih dipertimbangkan dalam perbandingan dengan PDRB, karena kegiatan tersebut akan berdampak secara tidak langsung pada ekonomi, seperti misalnya kegiatan Pembangunan Kapasitas dan Peningkatan Kesadaran, Konservasi, dan Pengambilan Keputusan. Tabel 3.1 menunjukkan set sektor kegiatan ekonomi, masing-masing, baik PDRB sebagaimana ditentukan oleh BPS, Biro Pusat Statistik, dan IEH, Investasi Ekonomi Hijau, yang dijumpai selama survei ini.

Table 3.1: Overview of sectors from BPS

Tabel 3.1. Tinjauan sekilas sektor dari BPS

GRDP (BPS) *PDRB (BPS)*	**GEI (Survey) activities that match to GRDP sectors** *Kegiatan IEH (Survei) yang sesuai dengan kategori PDRB*	**GEI (Survey) activities that are not mentioned under GRDP sectors** *Kegiatan (Survei) IEH yang tidak disebutkan dalam kategori PDRB*
Food Crops *Tanaman Pangan*	Economic Development (Agriculture, Agroforestry, Carbon Counting, Plantations, NTFP, Ecotourism) *Pembangunan Ekonomi* *(Pertanian, Agroforestri, Penghitungan Karbon, Hortikulturan, HHBK, Ekowisata)*	Capacity Building and Awareness Raising (Trainings, Workshops, Outreach Organization building Publication) *Pembangunan Kapasitas dan Peningkatan Kesadaran* *(Pelatihan, Lokakarya, pembangunan Publikasi Organisasi Penjangkauan)*
Estate Crops *Perkebunan*	Food security (Livestock, Clean Water Service) *Ketahanan pangan* *(Peternakan, Layanan Air Bersih)*	Conservation (Law Enforcement, Survey) *Konservasi* *(Penegakan Hukum, Survei)*
Livestock and Products *Peternakan dan Produknya*		Decision making (Mapping, Tools, Zoning) *Pengambilan keputusan* *(Pemetaan, Perangkat, Zonasi)*
Forestry *Kehutanan*		Culture / Social *Budaya / Sosial*
Fishery *Perikanan*		
Electricity, Gas and Water Supply *Kelistrikan, Gas dan Pasokan Air*	Renewable Energy *Energi Terbarukan*	
Construction *Konstruksi*	Infrastructure *Infrastruktur*	
Trade Restaurant Hotel *Perdagangan Restoran Hotel*		
Financial Services *Layanan Keuangan*		
Secretariat services *Layanan Sekretariat*	Secretariat (Operational, Coordination) *Sekretariat (Operasional, Koordinasi)*	

On the other hand, in the division of activities into subsectors, there is some overlap, e.g. non-timber forest products may also comprise agroforestry products, or ecotourism also includes handicrafts taken from the forests as non-timber forest products. Therefore, the categorization of Green Economy activities into different sectors should be reviewed and sharpened.

3.2.3 Investments

Considered as investments are expenses by government services, private sector investments, and budget allocation by community groups into sectors that can be assorted as supportive to Green Economy-principles are taken into consideration, foremost: agroforestry, eco-tourism, and renewable energy, but also those sectors or government services that improve community capacities etc..

Planned versus actual investments

The survey focused on actual expended funds for investments by the end of 2012, rather than looking at the planned budgets for investments at the beginning of 2012. The rationale for using actual expenses is that the resulting baseline for 2012 should show real investments in 2012 as a basis to determine needs and priorities in future planning and prioritization. In the survey in Malinau and Kapuas Hulu, the Laporan Realisasi Anggaran, or Budget Realization Report,was much used as reference; in Berau it was the LAKIP document, or the Performance Accountability Report of Government Institutions. Nevertheless, for example in the case of Malinau's Gerdema programme, the data on actual expenses were not available at the time of the survey, except for the initial budget, which is still considered to illustrate the impact of this program.

Pada sisi lain, dalam pembagian kegiatan menjadi subsektor, ada beberapa ketumpangtindihan, misalnya hasil hutan bukan kayu mungkin juga terdiri atas produk agroforestri, atau eko-wisata mungkin juga termasuk kerajinan tangan yang (bahannya) berasal dari hutan sebagai hasil hutan bukan kayu. Oleh karenanya, pengkategorian kegiatan Ekonomi Hijau menjadi sektor-sektor berbeda harus ditinjau ulang dan dipertajam.

3.2.3 Investasi

Yang dianggap sebagai investasi ialah pengeluaran oleh satuan kerja dinas pemerintah(SKPD), investasisektorswasta,dan alokasi anggaran oleh kelompok-kelompok masyarakat yang dapat dianggap sebagai mendukung prinsip Ekonomi Hijau: wanatani, eko-wisata, hhbk dan energi terbarukan, tetapi juga sektor atau layanan pemerintah yang meningkatkan kapasitas masyarakat dll.

Investasi terencana vs aktual

Survei ini berfokus pada dana yang telah dibelanjakan secara aktual untuk investasi pada akhir tahun 2012, dan bukan memandang pada anggaran yang direncanakan untuk investasi pada awal tahun 2012. Dasar pemikiran untuk menggunakan pengeluaran aktual ialah bahwa rona awal yang dihasilkan terkait investasi pada tahun 2012 harus memperlihatkan investasi yang sebenarnya pada tahun 2012 sebagai dasar untuk menetapkan kebutuhan dan prioritas dalam perencanaan dan pemrioritasan di masa depan. Dalam survei di Malinau dan Kapuas Hulu, Laporan Realisasi Anggaran banyak digunakan sebagai acuan, sementara di Berau dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Namun demikian, misalnya dalam hal program Malinau Gerdema, data mengenai pengeluaran riil belum tersedia disaat survei, kecuali anggaran awal, yang tetap digunakan untuk mengilustrasikan dampak dari program ini.

Indirect investments into Green Economy

Also taken into consideration are investments that have an indirect impact on and enable green development, for example:

- training and capacity building of communities related to GE
- provision of hardware material (e.g. tools, seedlings, infrastructure) in support of GE-related initiatives
    - infrastructural investments
    - operational investments of departmentservices
    - staffing of departmentservices
    - transportation costs

These costs may not contribute directly to a Green Economy, but shape the enabling condition in which a Green Economy can flourish. For example: a center of production of latex needs good road access to transport the harvest to the market. Taking into account the indirect effects of enabling sectors, more stakeholders should be involved in this process, e.g. the services of Public Works and of Spatial Management.

Voluntary Investments

When taking into consideration the Genuine Progress Index (Schumacher, 2013), explicit value is assigned to 'environmental quality, population health, livelihood security, equity, free time, and educational attainment'. Moreover, 'it values unpaid voluntary and household work as well as paid work'. In this survey, although the focus was on financial investments in support of a Green Economy, voluntary initiatives from community and private sector investing time, energy and money beyond a fixed program, should also be highlighted somehow, as they also contribute to awareness raising about and improvements in the environment, economy and social structures.

Investasi tidak langsung untuk Ekonomi Hijau

Juga dimasukkan dalam pertimbangan adalah investasi memberi dampak tidak langsung namun memampukan pembangunan hijau, misalnya:

- pelatihan dan pembangunan kapasitas masyarakat terkait EH
- penyediaan material perangkat keras (misalnya, peralatan, benih, infrastruktur) dalam mendukung inisiatif terkait EH.
    - investasi infrastruktur
    - investasi operasional dari berbagai dinas
    - penyediaan staf
    - biaya angkutan

Biaya ini mungkin tidak berkontribusi secara langsung pada Ekonomi Hijau, tetapi membentuk kondisi yang memungkinkan bagi Ekonomi Hijau untuk berkembang. Contohnya: suatu pusat produksi karet memerlukan akses jalan yang baik untuk mengangkut hasil panen ke pasar. Mengingat dampak tidak langsung dari sektor pendukung, maka lebih banyak pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini, misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengelolaan Tata Ruang.

Investasi Sukarela

Bila menganggap Indeks Kemajuan Asli (Schumacher, 2013), nilai jelas diberikan kepada 'kualitas lingkungan, kesehatan penduduk, keamanan pangan, kesetaraan, waktu bebas, free time, dan hasil pendidikan'. Selebihnya, 'index ini menilai pekerjaan sukarela yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga sebagaimana pekerjaan dibayar'. Pada survei ini, meskipun titik perhatian terhadap investasi finansial dalam mendukung Ekonomi Hijau, gagasan sukarela dari masyarakat dan perusahaan yang menanamkan waktu, tenaga dan uang diluar program tersusun, seharusnya juga disoroti bagaimanapun, karena juga berkontribusi kepada penyadaran tentang dan perbaikan dalam struktur lingkungan, ekonomi dan masyarakat.

On another note, initiatives related corporate social responsibility are also considered as voluntary initiatives, as the mandatory character of article 74 of law no. 40 / 2007 on csr by limited liability companies is not explicit. The related government regulation No. 47 / 2012 even prescribes an internal regulation of csr into the company's annual work plan, to be agreed upon by its board of commissariats or shareholders' meeting. With this, any government influence is diminished (Kamal, 2012).

3.2.4 New jobs

The second indicator is the amount of new jobs through investments that contribute (direct or indirect) to green development, appealing to a workforce of people between the age of 15 to 64 years who are capable to work and willing to work even though there is no immediate offer to work (Indonesian Law UU No. 13 / 2003). In this case, the labor force consists of those with a contract limited to a timeframe and those contracted on a not-determined time frame (Ministry of Labor Force). Unfortunately, this data is not (well) documented by all stakeholders. Ideally, the district services for labor should have complete data set related to this. Instead, in the case of Berau, the service expects the companies to register their employees, while there is no controlling mechanism to force these companies to do so.

3.2.5 Other indicators

As indicated in 2.1.1 elements of Green Economy have been identified, while the focus of this survey is the element of sustainable economic activities, and not in specific to other elements of improvement of livelihoods, reduction of GHG emissions, and biodiversity conservation, except, in conclusion, for mentioning shortly how sustainable economic activities impact these elements (4.1).

Pada catatan lain, gagasan terkait tanggung jawab terhadap masyarakat (CSR) juga dianggap sebagai gagasan sukarela, karena sifat kewajiban daripada pasal 74 undang-undang no. 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan CSR oleh persereon terbatas tidak jelas. Peraturan Pemerintah terkait, yaitu no. 47 tahun 2012 bahkan menentukan csr diatur secara internal perencanaan perusahaan, yang disetujui komisariat atau rapat pemegang saham. Dengan demikian, pengaruh pemerintah sangat dibatasi (Kamal, 2012).

3.2.4 Lapangan pekerjaan baru

Indikator kedua ialah jumlah lapangan pekerjaan baru melalui investasi yang berkontribusi (langsung atau tidak langsung) pada Ekonomi Hijau, yang merujuk tenaga kerja antara usia 15 sampai 64 tahun yang mampu bekerja dan bersedia bekerja walaupun belum ada penawaran pekerjaan langsung (UU No. 13 / 2003). Dalam kasus ini, tenaga kerja terdiri atas mereka yang terikat kontrak terbatas pada suatu kerangka waktu dan mereka yang terikat kontrak dengan kerangka waktu tidak ditentukan (Kementerian Tenaga Kerja). Sayangnya, data ini tidak terdokumentasi (dengan baik) oleh semua pemangku kepentingan. Idealnya, dinas tenaga kerja kabupaten harus memiliki set data lengkap terkait hal ini. Sebaliknya, dalam kasus Berau, dinas mengharapkan perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan karyawan mereka, sementara tidak ada mekanisme pengendalian untuk memaksa perusahaan untuk melakukan hal tersebut.

3.2.5 Indikator lainnya

Sebagaimana pada 2.1.1, unsur-unsur Ekonomi Hijau telah diidentifikasi, sementara fokus survei ini adalah unsur kegiatan ekonomi berkelanjutan, dan menyoroti angka terkait dengan unsur lainnya secara khusus, yaitu peningkatan penghidupan, pengurangan emisi GRK, dan konservasi keanekaragaman hayati, kecuali, dalam simpulan, akan menyebutkan secara singkat bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi yang berkelanjutan berdampak terhadap unsur-unsur ini (4.1).

Meanwhile, Sukhdev (2013) further elaborated on the aforementioned indicators of investments and new jobs in the strategy for 'Indonesia's Green Economy Model', or I-GEM, and added a third indicator of inclusiveness: 1) Green GDP, or in this case G*R*DP, 2) Decent Green Jobs, 3) GDP for the Poor.

In a discussion with Mr. Sukadri (November 2013), Secretary to the Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF) Working Group of the Indonesia National Council on Climate Change, he underlined that it is worth looking at the actual reduction of emission levels, either directly or indirectly due to these investments. According to him, this baseline could cast a broader prospect beyond the function of the forests in carbon emission reduction, as presented in his assessment on the role of forestry in materializing the concept of Green Economy in Indonesia (Sukadri et al., 2014). In relation to this, Mr. Buyung (Bappeda Malinau) described this as not only looking at the *hulu* area (upstream/ inland), but also at the *hilir* area (downstream) including urban/village areas.

3.2.6 Availability and accuracy of data

The data is taken from desk researches and interviews with representatives of regional government services as well as community groups and private companies. In some cases printed documentation is provided in the form of *Laporan Realisasi Anggaran* (Budget Realization Report) in Malinau and Kapuas Hulu, in Berau it was the *LAKIP* document, or the Performance Accountability Report of Government Institutions.

In some cases representatives make estimations by heart during the interviews.

Furthermore, the amounts of investments for a certain activity per sub district, is determined by the total amount invested through that activity, divided over the number of subdistricts that are involved in that activity.

Sementara itu, Sukhdev (2013) menguraikan lebih lanjut mengenai berbagai indikator investasi dan pekerjaan baru dalam strategi untuk 'Indonesia's Green Economy Model (Model Ekonomi Hijau Indonesia)', atau I-GEM, dan menambahkan faktor ketiga mengenai ketercakupan: 1) PDB Hijau, atau dalam hal ini PDRB, 2) Pekerjaan Hijau yang Layak, 3) PDB untuk Kaum Miskin.

Dalam diskusi dengan Bapak Sukadri (November 2013), Sekretaris Kelompok Kerja Tata Guna Lahan, Perubahan Tata Guna dan Kehutanan (LULUCF) Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia , beliau menggarisbawahi perlunya melihat pengurangan tingkat emisi aktual, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat investasi ini. Menurut beliau, rona awal ini dapat menebarkan prospek yang lebih luas, melampaui fungsi hutan dalam pengurangan emisi karbon, sebagaimana dipresentasikan dalam penilaiannya mengenai peran hutan dalam mewujudkan konsep Ekonomi Hijau di Indonesia (Sukadri et al., 2014). Dalam kaitan dengan hal ini, Bapak Buyung (Bappeda Malinau) menggambarkan hal ini sebagai bukan hanya memandang pada daerah *hulu* (pedalaman), tetapi juga pada daerah *hilir* termasuk kawasan perkotaan/pedesaan.

3.2.6 Ketersediaan dan akurasi data

Data terkait investasi dalam Ekonomi Hijau diperoleh dari tinjauan pustakadan wawancara dengan para perwakilan dinas pemerintah kabupaten dan juga kelompok masyarakat dan perusahaan swasta. Dalam beberapa kasus dokumentasi tercetak disediakan dalam bentuk *Laporan Realisasi Anggaran* di Malinau dan Kapuas Hulu, di Berau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) merupakan acuan.

Dalam beberapa kasus, staf dinas hanya memberi perkiraan di saat wawancara.

Selanjutnya, jumlah investasi untuk kegiatan tertentu per kecamatan, ditetapkan oleh jumlah investasi total dalam kegiatan tersebut, dibagi dengan jumlah kecamatan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

As a result, the data collected bear a varied level of accuracy, from a variety of sources, and therefore should be approached accordingly, i.e. 'just to build an image' of the situation in 2012 on Green Economy investments.

As for the private sector, specifically the companies in wood, palm oil and mining, this would need an adjusted approach, as most of their offices are not in the related districts, or are difficult to trace. Although the related district services have some data about these companies, they are not complete and insufficiently administered to be used for this survey. Moreover, these companies should not only be asked about their CSR programs, but also about their efforts 'to green their brown activities'.

3.3 Methodology and Execution

The surveys in the three pilot districts have been very rapid screenings of the economic conditions in 2012. For this purpose, both quantitative and qualitative methods of data collection have been applied. On the one hand, quantitative data is collected about actual investments in Green Economy sectors, and the number of new jobs. On the other hand, qualitative data is collected about local perceptions related to the concept of Green Economy, as well as insights about how to mainstream this concept into district land use planning and decision making.
The following steps have been undertaken in the collection of data related investments in Green Economy in 2012 in the three pilot-districts:

3.3.1 Literature review

Besides literature that feed into the theoretical framework related to Green Economy and Indonesia, the districts' statistics and mid-term plans for the period of 2010-2015 of the three districts were looked into. As the gist of this analysis, focus is on the statements of the vision and mission of the district governments, and how they relate to the aspects of Green

Alhasil, data yang terkumpul terdiri atas berbagai tingkatan akurasi, dari sumber yang beragam, dan dengan demikian harus dilakukan pendekatan yang sesuai, yaitu 'sekadar membentuk gambaran' dari situasi tersebut pada tahun 2012 tentang investasi Ekonomi Hijau.

Untuk sektor swasta, khususnya perusahaan kayu, minyak kelapa sawit dan pertambangan, ini akan memerlukan penyesuaian pendekatan, karena sebagian besar kantor mereka tidak berlokasi di kabupaten terkait, atau sulit untuk dilacak. Meskipun dinas kabupaten terkait memiliki sejumlah data mengenai perusahaan-perusahaan tadi, data tersebut tidak lengkap dan tidak cukup terkelola untuk dapat digunakan dalam survei ini. Selain itu, berbagai perusahaan tadi tidak hanya perlu ditanya mengenai program CSR mereka, tetapi juga tentang usaha mereka untuk 'menghijaukan aktivitas coklat' mereka.

3.3 Metodologi dan Pelaksanaan

Survei yang dilakukan di ketiga kabupaten perintis tersebut adalah skrining sangat cepat dari kondisi ekonomi pada tahun 2012. Untuk tujuan ini, telah diterapkan metode pengumpulan data secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada satu sisi, data kuantitatif dikumpulkan mengenai investasi aktual di berbagai sektor Ekonomi Hijau, dan jumlah pekerjaan baru. Di sisi lain, data kualitatif dikumpulkan mengenai persepsi lokal terkait konsep Ekonomi Hijau, dan juga wawasan tentang bagaimana mengarusutamakan konsep ini ke dalam perencanaan tata guna lahan kabupaten dan pengambilan keputusan.

Beberapa langkah berikut telah diambil dalam pengumpulan data terkait investasi dalam Ekonomi Hijau pada tahun 2012 di ketiga kabupaten perintis.

3.3.1 Tinjauan pustaka

Selain pustaka yang menjadi masukan untuk kerangka kerja teoretis terkait Ekonomi Hijau dan Indonesia, terhadap statistik dan rencana pembangunan jangka menengah

Economy, i.e. natural resources, human resources, and economy (Annex 1). In each separate district section these vision and mission statements are further elaborated, as an entry point to link Green Economy principles to existing concepts.

3.3.2 Stakeholders mapping and profile

Maps of stakeholders in each district were developed to identify the scope and size of the target audience. The maps also gave an indication of the composition of the team needed to cover all target audiences in interviews and data delivery. The stakeholders can be categorized in government bodies, community groups, and private sector. Based on this mapping it could be concluded that the target audience would be too wide to cover in a relatively short time span of two to three weeks, and would require a solid team of local experts that knows how to approach the different stakeholders.

3.3.3 Interviews, Focused Group Discussions, and field trips

Interviews

In order to obtain relevant data, introductory talks were held with relevant heads of Services of the district government. The meetings provided insights in their understanding about the concept of Green Economy and were an opportunity to gain their support in collecting data. In most cases they referred to subordinates to disseminate the requested data, either by word of mouth, in printed form, or in soft file format.

untuk periode 2010-2015 di ketiga kabupaten tersebut ditinjau. Sebagai inti dari analisis ini, fokus diarahkan pada pernyataan visi dan misi pemerintah ketiga kabupaten, dan bagaimana visi dan misi ini berhubungan dengan berbagai aspek Ekonomi Hijau, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ekonomi (Lampiran 1). Pernyataan visi dan misi ini diuraikan lebih jauh dalam bagian kabupaten masing-masing, sebagai titik masuk untuk mengaitkan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dengan konsep yang sudah ada.

3.3.2 Pemetaan dan profil pemangku kepentingan

Peta pemangku kepentingan di masing-masing kabupaten dikembangkan untuk mengidentifikasi lingkup dan ukuran audiens sasaran. Peta tersebut juga memberi petunjuk mengenai komposisi tim peneliti yang dibutuhkan untuk meliput semua audiens sasaran dalam wawancara dan penyampaian data. Para pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai: badan pemerintah, kelompok masyarakat, dan sektor swasta. Berdasarkan latihan pemetaan ini dapat disimpulkan bahwa audiens sasaran akan terlalu luas untuk diliput dalam jangka waktu yang relatif singkat selama dua sampai tiga minggu, dan akan memerlukan tim yang kokoh yang paham bagaimana mendekati pemangku kepentingan yang berbeda-beda.

3.3.3 Wawancara, Diskusi Kelompok Terarah, dan kunjungan lapangan

Wawancara

Untuk dapat memperoleh data relevan, dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan para kepala Dinas pemerintah Kabupaten terkait. Pertemuan-pertemuan ini memberi wawasan mengenai pemahaman mereka tentang konsep Ekonomi Hijau dan menjadi kesempatan untuk mendapatkan dukungan mereka dalam mengumpulkan data. Dalam sebagian besar kasusnya mereka mengacu pada bawahan mereka untuk memberikan data yang diminta, baik secara lisan, dalam bentuk tercetak, atau dalam format berkas lunak (softcopy).

Focused Group Discussions

The focused group discussions (FGD) at the beginning of the field survey were meant to introduce the target audience to the concept of Green Economy and the purpose of the survey. It was also an opportunity to ask for support during the data collection.

A second FGD was to present preliminary results of the survey, discuss prioritization of identified issues and identify possible follow up activities.

Field trips

Field trips were organized based on recommendations during interviews with the variety of stakeholders, taken into account the destination, Green Economy activities at the place of destination, distance and schedule, and budget.

3.3.4 Reporting

The reporting consisted of three parts: data processing and analysis, narration of process, mapping of outcomes.

Data processing and analysis

A main part of the time after the field visit was dedicated to following up data collection of data that were promised by respondents, data that raised questions or that were considered not complete yet, by telephone and e-mail. Then, the collected data was prepared for analysis and maps, while translated into English, and highlighting a variety of aspects based on the two indicators (3.2) as follows:

- Investments (Rp) per sector
- Investments (Rp) per stakeholder
- Investments (Rp) per subdistrict
- Investments (Rp) per stakeholder per subdistrict
- New jobs (contract/freelance) per stakeholder per subdistrict

Diskusi Kelompok Terarah

Diskusi kelompok terarah (FGD) pada awal survei lapangan dimaksudkan untuk memperkenalkan audiens sasaran yang teridentifikasi selama sesi pemetaan, dengan konsep Ekonomi Hijau dan tujuan survei tersebut. Diskusi ini juga bertujuan untuk menggalang dukungan selama pengumpulan data.

FGD kedua diselenggarakan untuk mempresentasikan hasil-hasil pendahuluan survei, mendiskusikan pemrioritasan hal teridentifikasi dan mengidentifikasi kegiatan tindak lanjut.

Kunjungan lapangan

Kunjungan lapangan diatur berdasarkan rekomendasi yang diperoleh selama wawancara dengan beragam pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan tujuan perjalanan, kegiatan Ekonomi Hijau di tempat tujuan, jarak dan jadwal, dan anggaran.

3.3.4 Pelaporan

Pelaporannya terdiri atas tiga bagian: pemrosesan data dan analisis, narasi proses, pemetaan hasil.

Pemrosesan data dan analisis

Sebagian besar waktu setelah kunjungan lapangan digunakan untuk menindaklanjuti pengumpulan data terkait data yang sudah dijanjikan oleh responden, data yang menimbulkan pertanyaan atau yang dinilai masih kurang lengkap, lewat telepon dan email. Selanjutnya data yang terkumpul diproses untuk dapat dianalisis dan dipetakan, dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, dengan menyoroti berbagai aspek berdasarkan dua indikator (3.2) sebagai berikut:

- Investasi (Rp) per sektor
- Investasi (Rp) per pemangku kepentingan
- Investasi (Rp) per kabupaten
- Investasi (Rp) per pemangku kepentingan per kecamatan

- New jobs (contract/freelance) per subdistrict

Narration of process and Mapping of outcomes

Besides a narration that clarifies the collected data, the narration also gives a description of the process, especially in the field.

For each district, the collected data was input to the production of maps, following the above mentioned subjects. An attempt to involve local GIS-specialists from the District government failed, as they were occupied with their main activities. Therefore, the maps were produced by GIZ's GIS specialist, in accordance to GIZ's guidelines. One of the challenges encountered was to integrate all aspects into one overview map: the subdistricts are too small to insert all icons and figures related to the subdistricts.

After integrating the final outcomes into reports for each of the districts, the results were presented to the stakeholders in the districts for feedback and follow up.

3.3.5 Time frame and effectiveness

The surveys in the three districts were executed in the following time sequence:

Malinau	8/9 – 22/9/2013
Kapuas Hulu	18/11 – 12/12/2013
Berau	14/01/2014 – 23/01/2014 and 09/02/2014 – 21/02/2014

The final round of feedback related the survey results, was executed between June and July 2014, including a peer presentation in Jakarta. The main obstacles during the field visits were:

- A clarification letter written and signed by the most appropriate person at the local government, without which

- Pekerjaan baru (kontrak/pekerjaan lepas) per pemangku kepentingan per kecamatan
- Pekerjaan baru (kontrak/pekerjaan lepas) per kecamatan

Narasi proses dan Pemetaan hasil

Disamping narasi yang menerangkan data yang terkumpul, narasi juga memberi gambaran tentang proses yang dilalui, khususnya saat di lapangan.

Untuk setiap kabupaten, data yang dikumpulkan dimasukkan dalam pembuatan peta, sesuai berbagai subjek yang disebutkan di atas. Suatu usaha untuk melibatkan spesialis GIS pemerintah Daerah tidak berhasil, karena mereka sibuk dengan kegiatan utama masing-masing. Jadi, peta-peta tersebut dibuat oleh spesialisasi GIS GIZ, sesuai panduan GIZ. Salah satu tantangan yang dijumpai ialah untuk memadukan semua aspek ke dalam satu peta ringkasan: kecamatan yang ada terlalu kecil untuk dapat disisipi semua ikon dan angka terkait dengan kecamatan tersebut.

Setelah memasukkan hasil akhir kedalam laporan setiap kabupaten, hasil akhir ini disampaikan kembali kepada pemegang peran di kabupaten untuk masukan dan tindak lanjut.

3.3.5 Kerangka waktu dan efektivitas

Survei di ketiga kabupaten dilakukan dalam urutan waktu berikut:

Malinau	8/9 – 22/9/2013
Kapuas Hulu	18/11 – 12/12/2013
Berau	14/01/2014 – 23/01/2014 and 09/02/2014 – 21/02/2014

Putaran terakhir untuk masukan terkait hasil survei dilaksanakan antara Juni dan Juli 2014, termasuk presentasi *peer* di Jakarta.
Rintangan utama yang dihadapi dalam kunjungan lapangan:

- Adanya surat keterangan yang ditulis dan ditandatangani oleh orang yang

data collection does not go smooth. Although GIZ already provided a letter clarifying the purpose of this survey, it was considered not sufficient to get the head of relevant services provide the requested data. This could become a quest for days, going from one service to another, moreover when the destined person to sign the letter would be away for a few days for reasons in the private sphere.

- The same administrative issue relates to invitation letters for the two focused group discussions, added the logistics of distributing the letters to dispersed offices of services (in the case of Kapuas Hulu and Berau), or companies that could not be located based on the information from the services.

- District wide events that made representatives less available, such as provincial elections, a general assembly on district's budget, and preparations and execution of a marching contests (Malinau), end of year seminars and festival preparations (Kapuas Hulu), and annual subdistrict planning development meetings (Berau).

This takes away much of the data collecting time at the services, as it is advised not to approach services without any letter. Suggested is that such a letter could be prepared before arrival of the consultant, through the GIZ representatives that are present. The clarification letter from GIZ FORCLIME should be addressed to the head of Forestry Service requesting him or her to draft the letter to be signed by him- or herself as head or the secretary of the service, accompanied with an acknowledgement letter from the Planning Bureau of the Ministry of Forestry. Even better would be a clarification letter from the Planning Bureau of the Ministry of Forestry.

paling tepat dari pemerintahan setempat, yang mana tanpa surat tersebut pengumpulan data tidak berjalan lancar. Meskipun GIZ sudah memberikan surat yang menjelaskan tujuan survei ini, surat tersebut dianggap tidak cukup agar kepala dinas terkait bersedia memberikan data yang diminta. Keadaan ini dapat menjadi pencarian selama berhari-hari,terlebih bila yang dituju untuk menandatangani surat tersebut tidak berada di tempat selama beberapa haridikarenakan urusan pribadi.

- Masalah administratif yang sama terkait surat undangan bagi kedua acara diskusi kelompok terarah, selain logistik pengiriman surat-surat tersebut ke berbagai dinas yang tersebar (dalam kasus Kapuas Hulu dan Berau), atau perusahaan yang tidak dapat dijumpai berdasarkan informasi dari dinas.
- Berbagai acara tingkat kabupaten yang menjadikan perwakilan dinas tersebut tidak mudah dijumpai, seperti misalnya pemilihan (pejabat) tingkat kabupaten, rapat umum untuk anggaran kabupaten, dan persiapan dan pelaksanaan pertandingan baris-berbaris (Malinau), berbagai seminar dan persiapan festival akhir tahun (Kapuas Hulu), dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan (Berau).

Hal ini banyak mengurangi waktu untuk pengumpulan data di berbagai dinas, karena disarankan untuk tidak mendekati dinas tanpa surat apa pun. Diusulkan bahwa surat semacam itu dapat dipersiapkan sebelum tibanya konsultan, melalui perwakilan GIZ yang berada di lapangan. Surat keterangan dari GIZ FORCLIME ditujukan kepada kepala Dinas Kehutanan untuk memintanya membuat surat keterangan tersebut untuk ditandatangani oleh beliau sendiri sebagai kepala dinas atau sekretarisnya, beserta surat pernyataan dari Biro Perencanaan Kementrian Kehutanan. Akan lebih baik lagi bila surat keterangannya berasal dari Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan.

4. Conclusions, observations, recommendations

Although the results of this survey show much heterogeneity in resources and accuracy, as stated in 3.2.6 (Availability and Accuracy of Data), nevertheless, this initial attempt of data collection already gives an impression, or snapshot, of the size and composition of a Green Economy in the three pilot-districts.

In this chapter, a closer look at elements of Green Economy as stated in each district are considered, recommendations and outlooks, and observations and lessons learned during the field surveys are shared. The more detailed results can be found in the separate documents for each district.

4.1 Elements of Green Economy

Following is an elaboration of each element of the definition of Green Economy that have been identified under 2.1.1 (Elements of Green Economy), and a brief description of the situation and condition in these districts based on the results of the data collection, i.e.: sustainable economic activities.that comprise activities in the sectors of agriculture, agroforestry, horticulture, fisheries, and ecotourism and non-timber forest products.

As for the improvement of livelihoods, the indicator for this element is the creation of new jobs. Unfortunately, this only counts on a larger scale for the district of Malinau, and on a smaller scale for Kapuas Hulu and Berau.

For figures on rise of income or welfare, there have been no accurate accounts quantifying this trend, due to absence of administration, research and analysis on this matter from the side of the district government.

Nevertheless, during interviews respondents attempted to extrapolate what impact their programs may have on the livelihoods and welfare of local communities. Observations

4. Simpulan, pengamatan, rekomendasi

Meskipun hasil survei menunjukkan banyak keragaman dalam sumber dan akurasi data, sebagaimana diterangkan pada 3.2.6 (Ketersediaan dan Akurasi Data), namun, usaha awal pengumpulan data ini telah memberikan sebuah kesan, atau pandangan sesaat, terhadap besaran dan komposisi sebuah Ekonomi Hijau di tiga kabupaten pelopor ini.

Dalam bab ini, sebuah tatapan lebih dekat pada elemen Ekonomi Hijau pada setiap kabupaten, rekomendasi dan pandangan kedepan, dan observasi dan pelajaran yang didapat selama survei lapangan, dibagi. Hasil lebih terperinci dapat ditemukan pada dokumen terpisah bagi setiap kabupaten.

4.1 Unsur-unsur Ekonomi Hijau

Berikut adalah uraian masing-masing unsur dalam definisi Ekonomi Hijau yang telah diidentifikasi dalam 2.1.1 (Unsur-unsur Ekonomi Hijau), dan deskripsi singkat situasi dan kondisi di ketiga kabupaten tersebut berdasarkan hasil pengumpulan data, yaitu: kegiatan ekonomi berkelanjutan atau lestari yang meliputi kegiatan pada sektor pertanian, agroforestri, perkebunan dan perikanan, dan ekowisata dan hasil hutan bukan kayu.

Terkait peningkatan penghidupan, indikator untuk unsur ini ialah penciptaan pekerjaan baru. Sayangya, ini hanya berlaku secara luas pada Kabupaten Malinau, dan pada skala lebih kecil pada Kapuas Hulu dan Berau.

Untuk angka peningkatan pendapatan atau kesejahteraan, belum ada catatan yang akurat untuk mengkuantifikasikan tren ini, karena belum adanya administrasi, penelitian dan analisis tentang hal ini dari sisi pemerintah kabupaten.

Namun demikian, pada saat wawancara berbagaipararespondenmengekstrapolasikan dampak apa yang akan ditimbulkan program

of improved living conditions, e.g. from semi- to permanent houses, were mentioned as indicator.

Reduction of GHG emissions; the application of alternative energy generators can be considered as GHG emissions reducing.

and Biodiversity conservation, e.g. through the presence of national parks, in Malinau and Kapuas Hulu.

4.1.1 Berau

Sustainable economic activities
As for sustainable economic activities all related sectors are more or less represented. The category of economic development (including the sectors of agriculture, agroforestry, horticulture and fisheries) comprises 21% of Green Economy investments, whereas ecotourism, including ntfp, comprises 27%.

Improvement of livelihoods
The CSR program of the company Berau Coal is an example of a corporate's sense of responsibility towards society at a larger scale that can be considered as contributing towards the creation of jobs and alternative sources of income. Berau Coal developed a cultivation program of cacao, rubber, oranges, and cattle, in 11 villages in Segah and 1 in Kelay subdistricts, in 2012, with a total amount of IDR 25 billion.

Reduction of GHG emissions
The electricity division of the Mining and Energy service provided micro-hydro installations and solar household systems in villages throughout the District.

Biodiversity conservation
Although there is no presence of a national park in this district, the district's Environment Agency (BLH) is actively involved in awareness raising on the importance of biodiversity conservation.

mereka pada penghidupan masyarakat setempat. Pengamatan mengenai kondisi hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat yang lebih baik, misalnya dari rumah yang semi permanen menjadi permanen, juga telah disebutkan sebagai indikator.

Pengurangan emisi GRK; penggunaan generator energi alternatif dapat dianggap sebagai pengurangan emisi GRK.

dan Konservasi keanekaragaman hayati, misalnya melalui keberadaan taman nasional, di Malinau dan Kapuas Hulu.

4.1.1 Berau

Kegiatan ekonomi berkelanjutan
Untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan semua sektor terkait sedikit banyak sudah terwakili. Sektor pengembangan ekonomi (termasuk sektor pertanian, wanatani, perkebunan dan perikanan) terdiri atas 21% investasi Ekonomi Hijau, sementara ekowisata, termasuk HHBK, sebesar 27%.

Peningkatan penghidupan
Program CSR perusahaan Berau Coal merupakan contoh program tanggung jawab terhadap masyarakat pada skala besar yang dapat dianggap berkontribusi terhadap penciptaan lahan kerja atau alternatif sumber penghidupan. Berau Coal telah mengembang program pembudidayaan coklat, karet, jeruk, dan ternak, di 11 desa di kecamatan Segah dan satu desa di kecamatan Kelay, pada tahun 2012, dengan jumlah keseluruhan IDR 25 miliar.

Reduksi emisi GRK
Bagian Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi telah menyediakan instalasi mikro-hidro dan sistem pembangkit listrik tenaga matahari kepada desa tersebar di Kabupaten.

Konservasi keanekaragaman hayati
Meskipun tidak dijumpai taman nasional di kabupaten ini, Badan Lingkungan Hidup

4.1.2 Kapuas Hulu

Sustainable economic activities
Some examples are:

- Rice barns placed by Food Resilience Division of District Secretariat in subdistricts Batang Lupar, Embaloh Hulu, and Hulu Gurung for village communities to store the residuals of their harvest and sell them to the market;
- Kebun Desa program by Food Resilience Division of District Secretariat to promote gardening of commodities on household level.
- Promotion of organic farming in Batang Lupar supported by WWF; also by PRCF Kapuas Hulu.
- Rejuvenation of rubber trees by the Forestry Service in Boyan Tanjung, Bunut Hilir, Hulu Gurung, Kalis, Mentebah, Selimbau, Suhaid;
- Forest restoration by WWF through planting rubber trees and other local trees (Belian and Tengkawang) in Batang Lupar;
- Community Based Forest Management (CBFM) by PRCF through tenun handicrafts, Tengkawang and fish production in Boyan Tanjung, Hulu Gurung, Mentebah
- Restocking of fish in the rivers of Kapuas Hulu by Fisheries Service
- Ecotourism programs by the Culture and Tourism Service and the two National Parks, as well as by WWF in collaboration with Kompakh.
- The APDS / Wild Honey project in Sentarum Lake by the Forestry Service.

Taking that into account, interestingly, only 1 percent of total collected data about investments in support of Green Economy

(BLH) kabupaten ini secara aktif terlibat dalam pembangkitan kesadaran mengenai pentingnya konservasi keanekaragaman hayati.

4.1.2 Kapuas Hulu

Kegiatan ekonomi berkelanjutan
Berikut beberapa contoh:

- Lumbung-lumbung padi yang ditempatkan oleh Divisi Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah di kecamatan Batang Lupar, Embaloh Hulu, dan Hulu Gurung untuk menyimpan sisa hasil panen masyarakat desa dan menjualnya ke pasar;
- Program Kebun Desa oleh Divisi Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah untuk mendorong penanaman komoditas pada tingkat rumah tangga.
- Promosi pertanian organik di Batang Lupar didukung oleh WWF; juga oleh PRCF Kapuas Hulu.
- Peremajaan pohon karet oleh Dinas Kehutanan di Boyan Tanjung, Bunut Hilir, Hulu Gurung, Kalis, Mentebah, Selimbau, Suhaid;
- Restorasi hutan oleh WWF melalui penanaman pohon karet dan pepohonan lokal lainnya (Belian dan Tengkawang) di Batang Lupar;
- Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM) oleh PRCF melalui kerajinan tenun , Tengkawang dan produksi ikan di Boyan Tanjung, Hulu Gurung, Mentebah
- Stok ulang ikan di sungai-sungai di Kapuas Hulu oleh Dinas Perikanan
- Program ekowisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan kedua Taman Nasional, dan juga oleh WWF dalam kerja sama dengan Kompakh.
- Proyek APDS / Madu Hutan di Danau Sentarum oleh Dinas Kehutanan.

Menariknya, dengan memperhitungkan hal tersebut, hanya 1 persen dari keseluruhan data yang dikumpulkan mengenai investasi yang mendukung Ekonomi Hijau telah dimasukkan dalam ekowisata pada tahun

has been put in ecotourism in 2012, while ecotourism is one of the main pillars in the midterm regional plan for 2010-2015.

Improvement of livelihoods

In 2012, 87 people signed a contract with one of the services of the district government of Kapuas Hulu, of which 64 as village facilitators under the DPMU of the Forestry Service, and 15 as staff to a cultural heritage site under the Culture and Tourism Service.

At the same time, 71 people took up a free-lance position of which 48 in the village organization to apply programs launched by Forestry's DPMU.

Infrastructure should be mentioned here as the sector that provides the means and infrastructure for economic development and livelihood improvements. In Kapuas Hulu, this sector takes up the biggest part of investments (36 %) in support of Green Economy in 2012, based on the collected data. Of this share, the National Program for Village community Empowerment Independence (PNPM Mandiri) takes up 57%, while another 36% of this share is taken up by the specific program Development of Regional Social Economic Infrastructure (PISEW) for remote districts, also under PNPM Mandiri. Both programs focus on concrete improvements of living conditions, such as building a pathway for farmers or improved housing.

As for electricity, there have been no special programs by PLN in connecting remote areas or lower income families. Clean water provision by PDAM still covers only 16 of 23 subdistricts.

Reduction of GHG emissions

In 2012, three organizations invested in renewable energy installations.

1. Renewable Energy Division of the Mining and Energy Service:

2012, sementara ekowisata adalah salah satu pilar utama rencana pembangunan jangka menengah untuk 2010-2015.

Peningkatan penghidupan

Pada tahun 2012, 87 orang menandatangani kontrak dengan salah satu dinas pemerintah kabupaten Kapuas Hulu, 64 orang di antaranya sebagai fasilitator desa di bawah DPMU dari Dinas Kehutanan, dan 15 orang sebagai staf di lokasi warisan budaya di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada waktu bersamaan, 71 orang menempati posisi pekerjaan lepas, 48 di antaranya di lembaga desa untuk menerapkan berbagai program yang diluncurkan oleh DPMU Dinas Kehutanan.

Infrastruktur perlu disebut disini sebagai sektor yang menyediakan sarana prasarana untuk perkembangan ekonomi dan peningkatan penghidupan. Di Kapuas Hulu sektor ini mengambil bagian terbesar investasi (36 %) yang mendukung Ekonomi Hijau selama tahun 2012, berdasarkan data yang terkumpul.Dalam bagian ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pedesaan Mandiri (PNPM Mandiri) mengambil 57% dan 36% lainnya dari bagian ini diambil oleh program khusus di bawah PNPM Mandiri untuk Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk kabupaten terpencil. Kedua program menitik beratkan kepada peningkatan konkret kondisi kehidupan, seperti membangun jalan petani atau perbaikan permukiman.

Untuk listrik, tidak ada program khusus dari PLN dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil atau keluarga dengan penghasilan lebih rendah. Penyediaan air bersih oleh PDAM masih hanya mencakup 16 dari 23 kecamatan.

Reduksi emisi GRK

Pada tahun 2012, tiga organisasi berinvestasi dalam instalasi energi terbarukan.

- Micro-Hydro Power: Rp 65 mln/kW (estimate), not yet included transport

  10 KW: Batang Lupar

  5 KW: fiber, terapung dicelupkan kedalam sungai, ditampung dalam baterai, Sadap, Embaloh Hulu

  2 x 20 KW: Tanjung Lokang dan Beringin Jaya, Putussibau Selatan

  115 KW: Sumintang, Kalis
- Solar Home System, SHS, per household Rp 7 mln per unit (perkiraan), transport around 6 mln (rata2), not yet included price of inverter
  - 170 units, Semitau
  - 50 units, Putussibau Utara
- Centralized SHS; Rp 2,75M per unit (average), transport not yet included
  - Ds. Kapar, 10 kW, Batang Lupar
  - Ds. Penyeluang, 15 kW, Bika
  - Ds. Sekedan 2, 15 kW, Semitau

2. GIZ installed 2 micro hydro installations in traditional village of Sadap, Embaloh Hulu. The model, which is to be inserted in the river, was not found to be suitable, according to the villagers. The installations are out of order.

3. WWF placed a Micro Hydro Power in the Luh river.

Besides the application of renewable energy technologies, there should also be a note on the application of more environment friendly technologies in the conventional mining industry. The head of the Mining and Energy Service mentioned this during the first FGD, stating that, every activity results in change, though it depends on the method what impact that will bring.

1. Bagian Energi Terbarukan dari Dinas Pertambangan dan Energi:
   - Pembangkit Mikro-Hidro: Rp 65 jt/kW (perkiraan), belum termasuk transpor

     10 KW: Batang Lupar

     5 KW: fiber, terapung dicelupkan kedalam sungai, ditampung dalam baterai, Sadap, Embaloh Hulu

     2 x 20 KW: Tanjung Lokang dan Beringin Jaya, Pu tussibau Selatan

     115 KW: Sumintang, Kalis
   - Sistem pembangkit listrik tenaga surya rumahan (SHS), per rumah tangga Rp7 juta per unit (perkiraan), transpor sekitar 6 juta (rata2), belum termasuk harga inverter
     - 170 unit, Semitau
     - 50 unit, Putussibau Utara
   - SHS Tersentralisasi; Rp2,75 miliar per unit (rata-rata), belum termasuk transpor
     - Ds. Kapar, 10 kW, Batang Lupar
     - Ds. Penyeluang, 15 kW, Bika
     - Ds. Sekedan 2, 15 kW, Semitau

2. GIZ memasang 2 instalasi mikro hidro di desa tradisional Sadap, Embaloh Hulu. Model yang dicelup kedalam sungai ternyata tidak cocok menurut penduduk desa. Instalasi tersebut tidak berfungsi.

3. WWF menempatkan Pembangkit Mikro Hidro di sungai Luh.

Selain penggunaan teknologi energi terbarukan, harus juga ada catatan mengenai penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan lainnya dalam industri pertambangan konvensional. Kepala dinas Pertambangan dan Energi mengemukakan hal ini pada FGD pertama, menyatakan bahwa, setiap kegiatan menghasilkan perubahan, meskipun tergantung pada metodenya dampak apa yang akan ditimbulkannya.

Biodiversity conservation
Although the district has two national parks (which is unique in Indonesia), and the district has set conservation as a high priority in their planning, data collected about investments in conservation only count for 10% of total collected data, ranking fourth after infrastructure, renewable energy.

Both national park authorities (Betung Kerihun and Danau Sentarum) have a more or less similar program, consisting of investigations and security, conservation area and protected forest development, Forest Fires Control, Conservation of Biodiversity.

GIZ supported the national parks with biodiversity monitoring in partnership with NGO's.

Other examples of initiatives in biodiversity conservation are Fisheries Service's Inhouse Training on Semah fish; WWF's initiatives in the conservation of the Orang Utan population, and FFI's Ecosystem restoration and Lakes Protection programs.

4.1.3 Malinau

Sustainable economic activities
In 2012, much has been invested in village development foremost through the dedicated program of Gerdema, supported by funds from the Village Development Support Unit, BPMD, mounting up to Rp 185.808.000.000. Furthermore, through other services of the Malinau District, incentives have been distributed that contribute to economic activities for local communities, e.g. at Forestry, Agriculture, Livestock and Fisheries, and Horticulture. The incentives of these services are mostly in the form of planting of seedlings that have an economic value, e.g. fruit trees and agar wood. The yields of these trees are meant for the direct and indirect benefit of the local communities. This is also the case in the awareness raising

Konservasi keanekaragaman hayati
Meskipun kabupaten ini memiliki dua taman nasional (yang unik di Indonesia), dan kabupaten ini telah menetapkan konservasi sebagai prioritas tinggi dalam perencanaan mereka, data yang dikumpulkan dalam konservasi hanya berperan sebesar 10% dari keseluruhan data yang terkumpul, menduduki peringkat keempat setelah infrastruktur, energi terbarukan, dan ketahanan pangan.

Otoritas kedua taman nasional (Betung Kerihun dan Danau Sentarum) memiliki program yang kurang lebih serupa, terdiri atas penyelidikan dan keamanan, pengembangan daerah konservasi dan hutan lindung, Pengendalian Kebakaran Hutan, Konservasi Keanekaragaman Hayati.

GIZ mendukung kedua taman nasional dalam pemantauan keanekaragaman hayati dalam kemitraan dengan berbagai LSM.

Contoh-contoh lain upaya konservasi keanekaragan biodiversitas adalah Pelatihan Inhouse tentang ikan Semah oleh Dinas Perikanan, inisiatif WWF dalam konservasi populasi Orang Utan, pemulihan ekosistem dan program Perlindungan Danau oleh FFI.

4.1.3 Malinau

Kegiatan ekonomi berkelanjutan
Pada tahun 2012, banyak yang telah diinvestasikan dalam pembangunan desa terutama sekali melalui program khusus Gerdema, didukung oleh dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPMD, meningkat sampai Rp 185.808.000.000. Selanjutnya, melalui berbagai dinas lain di Kabupaten Malinau, telah dibagikan insentif yang berkontribusi pada kegiatan ekonomi masyarakat setempat, msialnya di Kehutanan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Hortikultura. Insentif berbagai dinas ini sebagian besar dalam bentuk penanaman benih yang memiliki nilai ekonomi, misalnya pohon buah-buahan dan gaharu. Hasil pepohonan ini dimaksudkan untuk manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat setempat. Ini juga kasusnya

program of the Credit Union. Furthermore, the development of the fisheries sector in Malinau Utara serves the same intention.

On another note, PLN sold small scale solar panels for house hold purposes to 823 families.

At the same time, economic activities through the development of eco-tourism have been led by WWF Malinau and the National Park authority. Both have been focusing on the improvement and strengthening of local communities that drive these eco-tourism units. At the same time, the Tourism Service is only at the start to position itself with this concept of eco-tourism, thus has no relevant achievements in 2012 related to Green Economy.

Improvement of livelihoods

In 2012, 811 new jobs on a contract base under the district of Malinau have been created, consisting of 654 village officials, 152 village support officers and 5 outreach officers for the Agriculture service.

402 jobs were created on a free-lance base. 152 free-lancers were recruited by the Village Development Support to assist the earlier mentioned village support officers in areas not yet covered. Another 109 were recruited for outreach activities by the Plantations Service. The subsection on renewable energy created 24 part time jobs for the operation and management of 5 micro-hydro installations.

Attempts that may have indirect impact are the building of roads, more specific by the Plantations Service to farmer production areas. On a wider scale, the initiatives from the Public Works service in building roads to the more remote areas, may need to be considered for further impact analysis related Green Economy.

PLN Malinaudistributed and installed electricity installations among 523 poorer families, as part of their community development program.

dengan program pembangkitan kesadaran Koperasi. Selanjutnya, pembangunan sektor perikanan di Malinau Utara berperan dengan tujuan serupa.

Dalam catatan lain, PLN menjual panel solar skala kecil untuk kebutuhan rumah tangga kepada 823 keluarga.

Pada waktu bersamaan, kegiatan ekonomi melalui pengembangan eko-wisata telah dipimpin oleh WWF Malinau dan otoritas Taman Nasional. Keduanya telah berfokus pada peningkatan dan penguatan masyarakat setempat yang mendorong satuan-satuan ekowisata ini. Pada waktu bersamaan, Dinas Pariwisata tengah memulai memosisikan diri dengan konsep ekowisata tersebut, dengan demikian tidak memiliki pencapaian yang relevan pada tahun 2012 terkait dengan Ekonomi Hijau.

Peningkatan penghidupan

Pada tahun 2012, 811 pekerjaan baru dengan basis kontrak telah diciptakan di kabupaten Malinau, terdiri atas 654 pejabat desa, 152 petugas pendukung desa dan 5 petugas penyuluh lapangan untuk departemen Pertanian.

402 pekerjaan diciptakan dengan basis kerja lepas. 152 pekerja lepas direkrut oleh BPMD untuk membantu para petugas pendukung desa yang disebutkan sebelumnya di daerah-daerah yang belum dicakup. 109 orang lainnya direkrut untuk kegiatan penyuluhan oleh dinas Perkebunan. Bagian Energi Terbarukan dari dinas Pertambangan dan Energi menciptakan 24 pekerjaan paruh waktu untuk operasi dan pengelolaan 5 instalasi mikro-hidro.

Berbagai usaha yang mungkin menimbulkan dampak tidak langsung adalah pembangunan jalan-jalan, lebih khusus oleh Dinas Perkebunan ke daerah-daerah produksi para petani. Pada skala yang lebih lebar, inisiatif dari dinas Pekerjaan Umum dalam membangun jalan-jalan ke daerah yang lebih terpencil, mungkin perlu lebih dipertimbangkan untuk analisis dampak lebih jauh terkait Ekonomi Hijau.

Reduction of GHG emissions
The section on renewable energy under the Mining and Energy service installed 5 micro-hydro installations, 94 solar driven street lights by the province, and sold 823 micro solar panels.

Another way to reduce the emission of GHG is by adhering to the status of land as conservation forest, as in the example of PT Adindo Inhutani Lestari. A minimum estimated Rp 46.800.000.000,00 could have been gained if the concession was in production, thus it could be considered as a loss. On the other hand, how much worth the sequestration of the 28.599 hectares of land is in carbon credits still needs to be counted.

Overall, the efforts of both the Kayan Mentarang National Park Authority and WWF in designing and applying a buffer-/zoning system also contribute to the reduction of GHG emissions, although this is not quantified.

Biodiversity conservation
As this is one of the six priority programs of National Park, it can be quantified with Rp 337.022.000,00 spent on monitoring of the bull population, pre-survey of the orangutan, and the identification of orchids.

4.2 Recommendations and Outlook

Based on the data collection through documents analysis, and interviews, focused group discussions and field visits, the following general recommendations can be made, before going into detail per district:

1. ***Mainstreaming the Concept into policy making:***
   more awareness should be developed about the concept of Green Economy throughout all levels of governance, and how this should be inserted into policy and applied in practice; district government services should set the example, both in their daily

PLN Malinau mendistribusikan dan memasang instalasi listrik di antara 523 keluarga yang lebih miskin, sebagai bagian dari program pembangunan masyarakat mereka.

Reduksi emisi GRK
Bagian energi terbarukan telah melakukan pemasangan 5 instalasi mikro-hidro, 94 lampu jalan bertenaga surya oleh provinsi, dan penjualan 823 mikro panel surya.

Cara lain untuk mengurangi emisi GRK adalah dengan tetap berpaut pada status lahan sebagai hutan konservasi, sebagaimana dicontohkan oleh PT Adidno Inhutani Lestasri. Diperkirakan paling sedikit Rp 46.800.000.000,00 bisa diperoleh bila konsesi ini berproduksi, dengan demikian ini dapat dianggap sebagai kerugian. Pada sisi lain, seberapa besar nilainya sekuestrasi dari 28.599 hektar lahan dalam kredit karbon masih perlu dihitung.

Secara menyeluruh, usaha oleh Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dan WWF dalam merancang dan menerapkan sistem penyangga/penzonaan juga berkontribusi pada pengurangan emisi GRK, meskipun belum dikuantifikasi.

Konservasi keanekaragaman hayati
Karena ini merupakan satu dari keenam program prioritas Taman Nasional, ini dapat dikuantifikasi dengan Rp337.022.000,00 yang dikeluarkan untuk pemantauan populasi banteng, survei pendahuluan terhadap orang utan, dan identifikasi anggrek.

4.2 Rekomendasi dan Pandangan

Berdasarkan pengumpulan data melalui analisis dokumen, dan wawancara, diskusi kelompok terarah dan kunjungan lapangan, rekomendasi umum berikut ini dapat diberikan, sebelum membahas lebih terperinci untuk masing-masing kabupaten:

1. ***Mengarus utamakan Konsep tersebut ke dalam pembuatan kebijakan:***
   perlu dikembangkan lebih banyak kesadaran mengenai konsep Ekonomi Hijau di seluruh tingkat tata kelola, dan

practice as well as in their policy making and application. Therefore, determination is needed related activities of each district service that is formulated in the District Budget and Core Plan of the Services, to which activities can be accounted as in support of the development of a Green Economy.

2. ***Mainstreaming the Concept through District Marketing:***
   communication should be wide spread about programs and achievements related to Green Economy investments, both between government services as well as to society at large; it should be used as a marketing tool to promote the development of the district with a Green Economy or, more specifically, a district as part of the Heart of Borneo. More importantly in this case is to capitalize the results of these Green Economy investments into earnings for the district, to answer the urging question of 'what is the benefit of being a kabupaten konservasi', or of the benefit of these conservation activities in general;

3. ***Improve and promote local, non-timber, forest products:***
   inventorize and promote the cultivation of alternative commodities from the forests, other than wood (non-timber forest products), such as wild honey, fish, cocoa, agarwood, fruits, and rubber; and develop technologies that are cheap, user and context friendly, cleaner and energy efficient; issues that need to be overcome are the diversification of these local products, and the access to markets, local, national, as well as international).

4. ***Greening 'Brown Economy' practices:***
   economic activities (e.g. mining and palm oil) that put much pressure on natural resources, should be reviewed in terms of resource (e.g. wood industries, mining

bagaimana hal ini sebaiknya dipadukan dalam kebijakan dan diterapkan dalam praktik; dinas pemerintah kabupaten perlu memberi contoh, baik dalam praktik mereka sehari-hari maupun dalam pembuatan kebijakan dan penerapannya. Untuk itu diperlukan ketentuan terhadap kegiatan setiap SKPD yang tertuang dalam APBD dan Rencana Induk Dinas, kegiatan apa saja yang bisa dicatat sebagai penunjang perkembangan Ekonomi Hijau ini;

2. ***Mengarusutamakan Konsep tersebut melalui Pemasaran Kabupaten:***
   komunikasi perlu tersebar luas mengenai berbagai program dan pencapaian terkait investasi Ekonomi Hijau, baik di antara dinas maupun ke masyarakat luas; komunikasi ini perlu digunakan sebagai sarana pemasaran untuk mempromosikan pembangunan kabupaten secara Ekonomi Hijau atau, lebih khususnya, sebuah kabupaten yang sebagai bagian Heart of Borneo. Lebih penting dalam hal ini adalah untuk menhitung hasil-hasil investasi Ekonomi Hijau ini sebagai pendapatan kabupaten, untuk menjawab pertanyaan yang mendesak tentang 'apakah manfaatnya menjadi sebuah kabupaten konservasi', atau tentang keuntangan kegiatan konservasi pada umumnya;

3. ***Meningkatkan dan mempromosikan hasil hutan bukan kayu lokal:***
   menginventarisasi dan mempromosikan pembudidayaan komoditi alternatif dari hutan, selain kayu (hasil hutan bukan kayu), seperti madu hutan, ikan, coklat, gaharu, buah dan karet; dan mengembangkan teknologi yang murah, ramah pengguna, dan sesuai konteks, lebih bersih dan efisien energi; isu-isu yang harus diatasi adalah diversifikasi hasil-hasil lokal ini, dan akses ke pasar, baik lokal, nasional maupun internasional.

4. ***Menghijaukan praktik-praktik 'Ekonomi Coklat':***
   kegiatan ekonomi (misalnya hutan

and palm oil) and energy efficiency, waste control and management, and monitoring of actual revitalization of used lands. At the same time, a closer look should be given to the potential of accurate implementation of the law on corporate social responsibility.

5. ***Optimizing CSR funds***
CSR funds are a source of funding that still needs to be further explored. Therefore, adjustments, good application and translation into local context of article 74 of law no. 40 /2007 and government regulation no 47 / 2012 (3.2.3) are needed. Furthermore, a district regulation needs to be formulated in which is determined the percentage of csr in relation to investments and/or production. And, a distribution system needs to be developed and sustainable field support needs to be provided. The independent Berau Chapter of the National Committee of Indonesian Youth (KNPI) has developed a system concept that is being tested at the moment.

6. ***Building Centers of Excellence:***
Centers of Excellence related to the cultivation of primary commodities (e.g. rubber, cocoa, agarwood) in each of the districts. With this, a meeting place is created for exchange of related local and international wisdom, that could become a place for learning among farmers of the districts.

7. ***Connect to existing policy programs and tools***
to embed follow up on Green Economy initiatives in existing programs with similar objectives, both national (Mid-term Planning, UKP4, MP3EI, and I-GEM), as well as bilateral (such as Decentralisation as Contribution to Good Governance, DeCGG, Policy Advice for Environment and Climate Change, PAKLIM, Regional Economic Development, RED, and

produksi kayu, pertambangan dan kelapa sawit) yang memberi tekanan besar terhadap sumber daya alam, harus ditinjau dalam pengertian sumber daya dan efisiensi energi, pengendalian limbah dan pengelolaan, dan pemantauan revitalisasi aktual dari lahan yang telah digunakan.

5. ***Mengoptimalisasikan sumber dana CSR:***
Dana csr merupakan sumber dana yang masih perlu di tinjau lebih lanjut. Untuk itu diperlukan penyesuaian, penerapan tepat dan penerjemahan ke kondisi lokal daripada pasal 74 undang undang no. 40 tahun 2007 dan peraturan pemerintah no. 47 tahun 2012 (3.2.3). Selain itu, perlu adanya peraturan daerah dimana diaturnya persentase dana csr dari investasi dan/atau produksi sebuah perusahaan. Lalu, perlu dibangunkan sebuah sistem penyaluran dana dan bimbingan lapangan secara langsung dan berkelanjutan. Cabang independen Berau daripada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sudah mengembangkan sebuah konsep sistem yang sedang diuji coba.

6. ***Membangun Pusat Unggulan:***
Pusat Unggulan terkait budidaya komoditas yang menjadi unggulan (misalnya karet, coklat, gaharu) di masing-masing kabupaten. Dengan demikian terwujud tempat titik temu pertukaran ilmu setempat dan internasional terkait yang dapat menjadi tempat pembelajaran petani Kabupaten.

7. ***Terhubung dengan program-program kebijakan dan sarana yang ada***
menanamkan tindak lanjut tentang inisiatif Ekonomi Hijau dalam program yang ada dengan tujuan serupa, baik nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, UKP4, MP3EI, dan I-GEM), dan juga bilateral (seperti Desentralisasi sebagai Kontribusi untuk Tata Kelola yang Baik, DeCGG, Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim,

Renewable Energy Program), to tailor proposals to further involve, e.g. the Ministry of Forestry, the National Planning Agency, the directorate general for Regional Development under the Ministry of Internal Affairs, and Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT). Furthermore, the connection with tools such as HoB´s Green Economy policy package, The Economics of Environments and Biodiversity, TEEB, and Integrating Ecosystem Services, IES should be further crystalized.

4.2.1 Berau

The survey resulted in a data base of public and private investments in support of a Green Economy of Rp 154.931.891.599,79 in the district of Berau, in 2012. Compared to the size of Berau's economy in 2012 (Rp 10.761.680.820.000,00), these Green Economy investments take up 1,4% of total.

Based on figures collected, interviews, and focused group discussions during the visits to Berau (see separated report chapter 3), the following findings can be summarized:

- Investments in sectors such as Conservation, Renewable Energy, and Capacity Building were still relatively small (respectively 6%, 3% and 1% of total collected figures) compared to other sectors. Stakeholders such as the Mining and Energy Service (specifically related to renewable energy), Forestry Service and Plantations Service, and the Environment Agency, each held a share under 5% from total collected investments into Green Economy in Berau. They should be the main players in promoting principles of sustainable development, such as Green Economy, to mainstream these principles into policy development,
- Specifically related to non-timber forest products and tourism development, more (scientific) analysis is needed to

PAKLIM, Pembangunan Ekonomi Daerah, RED, dan Program Energi Terbarukan), menyusun proposal untuk keterlibatan lebih jauh, misalnya Kementerian Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, direktorat jenderal untuk Pembangunan Daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Terlebih jauh, hubungan dengan berbagai perangkat seperti paket kebijakan Ekonomi Hijau Jantung Kalimantan, Ekonomi Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, TEEB, dan Pengintegrasian Layanan Ekosistem, IES harus dijajak lebih jauh.

4.2.1 Berau

Survei tersebut menghasilkan basis data tentang investasi pemerintah dan swasta atau inisiatif yang mendukung Ekonomi Hijau yang melibatkan perkiraan biaya sebesar Rp. 154.931.891.599,79 di kabupaten Berau, pada tahun 2012. Dibandingkan dengan ukuran ekonomi pada tahun 2012 (Rp 10.761.680.820.000,00), investasi Ekonomi Hijau (IEH) ini merupakan 1,4% dari total jumlah pendapatan daerah. Bagian ini dapat bertumbuh selama kepercayaan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan sudah pasti.

Berdasarkan angka yang terkumpul, wawancara dan diskusi terarah selama kunjungan ke Berau (lihat laporan terpisah, bab 3), penemuan berikut dapat diringkas:

- Investasi dalam sektor Konservasi, Energi Terbarukan, dan Pengembangan Keahlian, terdapat nilai investasi terhadap Ekonomi Hijau yang relatif masih kurang (masing-masing 6%, 3% dan 1% dari seluruh investasi terkumpul) dibandingkan sektor lain. Pemegang peran seperti Dinas Pertambangan dan Energi (khususnya dalam hal energi terbarukan), Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, dan Badan Lingkungan Hidup, masing-masing masih dibawah 5% dari seluruh investasi dalam Ekonomi Hijau di Berau yang

add more value to these ntfp's at a higher (international) market rate.

- The share of CSR as a component of Green Economy only reached 1%. Specific attention should be paid to the still uncovered potentials of managing CSR streams in function of the district's development;
- The spread of investments in Green Economy over the Berau District shows a focus in subdistricts Segah (on renewable energy) and Tanjung Redeb (center of government), with an investment rate far above the district's average (i.e. Rp 12 M). The subdistricts of Batu Putih, Talisayan and Teluk Bayur were the lowest receivers, along with seven other subdistricts who received slightly more. Therefore, a better spread of these Green Economy investments need to be accomplished.
- Tourism development should not be massive, but focus on handicrafts instead of just natural elements, not just marine, but also land/forest.
- Village governance: smarter use of decision making tools in land use and spatial planning, such as Musrenbangdes, or the annual congregation for village development planning; development without waiting for input from investors; learning network for village communities.
- Conceptual understanding of Green Economy principles, in order to better design programs and link initiaitves from different stakeholders with each other: cross government, both higher level as well as lower level.

Looking into program development for each of these priority areas, linked to the general recommendations and to the main elements of a Green Economy (4.1):

terkumpulkan. Yang seharusnya menjadi pemeran utama dalam mempromosikan prinsip perkembangan berkelanjutan, seperti Ekonomi Hijau, untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip ini dalam pengembangan kebijakannya.

- Khususnya terkait hasil hutan bukan kayu dan pengembenangan pariwisata dibutuhkan lebih banyak kajian (ilmiah) untuk dapat menambah menilai hasil ini pada harga pasar (internasional) hhbk yang lebih tinggi.
- Bagian CSR sebagai komponen dari Ekonomi Hijau hanya mencapai 1%. Dibutuhkan perhatian khusus terhadap potensi yang belum terungkap dari pengelolaan arus CSR dalam perkembangan daerah.
- Sebaran investasi Ekonomi Hijau di seluruh Kabupaten Berau menunjukkan pemusatan investasi di kecamatan Segah (energi terbarukan) dan Tanjung Redeb (pusat pemerintahan) jauh diatas rata-rata kabupaten (yaitu Rp 12M). Kecamatan Batu Putih, Talisayan dan Teluk Bayur penerima investasi terendah, bersama dengan tujuh kecamatan lain yang menerima sedikit lebih banyak. Untuk itu perlu ada pemerataan lebih jauh terhadap penyebaran investasi terkait Ekonomi Hijau.
- Pengembangan Pariwisata sebaiknya tidak masif, fokus pada kerajinan tangan selain keindahan alam, bukan hanya kelautan, tetapi juga daratan/hutan;
- Tata kelola desa: penggunaan lebih cerdas dari perangkat pengambilan keputusan dalam tata guna lahan dan perencanaan tata ruang, seperti Musrenbangdes, atau musyawarah untuk perencanaan pembangunan desa, pembangunan tanpa menunggu masukan dari para investor; jejaring pembelajaran untuk masyarakat desa;
- Pemahaman konseptual mengenai prinsip-prinsip Ekonomi Hijau, agar dapat merancang program dengan lebih baik dan saling menautkan inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda: lintas pemerintah, baik tingkat yang lebih tinggi maupun tingkat yang

1. ***Mainstreaming the Concept into policy making***

   - The general notion that this concept should be understood throughout all layers of governance should be strengthened with the notion that it is necessary to identify what exactly is considered as Green Economy, within each district government service. It is suggested that with this, services can better design, execute and monitor their programs. Therefore, a common local understanding and definition of the concept of economy should be agreed upon, as a starting point for concretizing Green Economy in regional development. Furthermore, it would be good to provide incentives to motivate the implementation of Green Economy initiatives.
   - Specific attention should be given to decision making, related to development issues, at the micro level, i.e. village development through planning based on data. TNC has already developed approaches towards village development planning, and establishes a network of villages to learn from and share with each other.
   - Related to this is to optimize zonation of land use in area planning to be coordinated by the district's planning agency, Bappeda.
   - With the coming to end of period of the current head of district, this would be a good momentum to raise awareness about Green Economy, and insert these principles into program development for the future district government.

2. ***Mainstreaming the Concept through District Marketing***

   - Through the priority area of Tourism, the district should be able to present

lebih rendah.

- Ketika meninjau pengembangan program untuk masing-masing bidang prioritas ini, terkait dengan rekomendasi umum dan unsur-unsur utama Ekonomi Hijau (4.1):

1. ***Mengarusutamakan Konsep tersebut dalam pembuatan kebijakan***

   - Gagasan utama bahwa konsep ini harus dipahami oleh seluruh lapisan tata kelola harus diperkuat dengan gagasan bahwa perlu untuk mengidentifikasi apa tepatnya yang disebut sebagai Ekonomi Hijau, dalam setiap dinas pemerintah kabupaten. Disarankan bahwa dengan ini, dinas dapat dirancang dengan lebih baik, dilaksanakan dan memantau program-program mereka. Oleh karenanya, pemahaman lokal yang sama dan definisi konsep ekonomi harus disepakati, sebagai titik permulaan untuk mengkonkretkan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah. Terlebih jauh, adalah baik untuk memberikan insentif untuk memotivasi implementasi inisiatif Ekonomi Hijau.
   - Perhatian khusus harus diberikan pada pengambilan keputusan, terkait dengan isu-isu pembangunan, pada tingkat mikro, yaitu pembangunan desa melalui perencanaan berbasis data. TNC telah mengembangkan pendekatan terhadap perencanaan pembangunan desa, dan menetapkan jejaring desa untuk dipelajari dan saling berbagi.
   - Terkait dengan hal ini adalah mengoptimasikan penzonaan tata guna lahan di daerah yang direncanakan untuk dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
   - Dengan berakhirnya masa jabatan bupati saat ini, hal ini akan menjadi momentum yang baik untuk membangkitkan kesadaran mengenai Ekonomi Hijau, dan memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam program pembangunan untuk pemerintah kabupaten di masa depan.

itself as a forest based economy that takes care of its environment, by showcasing achievements in applying Green Economy principles. In addition to the idea to develop a learning network between village communities, this could be applied to the level of districts with a forest based economy, within the boundaries of the country, as well as abroad. In other words, it is suggested to establish sister-cities bonds.

- With an improved marketing of the district natural, social and economic assets in balance, this could be used to attract investors in Green Economy sectors. Here, the role of financial institutions in lending money for investments could be further clarified, based on the principles of Green Economy. Also, the role of the district investment board (BPMD) could be further cleared, as during the survey they stayed out of sight.

3. Improve and promote local, non-timber, forest products

- The priority area of agriculture and ntfp should enhance local industries to flourish and improve and diversify their products. Local initiatives exist in Berau that discover and promote nutritious plants from the forests as alternatives to the main food products. Besides f00d purposes, other non-timber forest products should be identified, such as rattan. In fact, the export costs of local products can be pressed by using the outgoing containers that thus far exit the district empty.

- As market access of local products is a problem producers face, to boost their enthusiasm, they should have a clear view of the market demand, regionally,

2. Mengarusutamakan Konsep tersebut melalui Pemasaran Kabupaten

- Melalui bidang prioritas Pariwisata, kabupaten harus mampu menampilkan dirinya sebagai ekonomi berbasis hutan yang memelihara lingkungannya, dengan memperlihatkan berbagai pencapaian dalam menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau. Sebagai tambahan pada gagasan untuk mengembangkan jejaring pembelajaran di antara masyarakat desa, hal ini dapat diterapkan pada tingkat kabupaten dengan ekonomi berbasis hutan, dalam batas lingkup negara, dan juga di luar negeri. Dengan perkataan lain, disarankan untuk membentuk ikatan kota kembar.
- Dengan pemasaran yang lebih baik dari aset-aset alam, sosial dan ekonomi kabupaten tersebut secara seimbang, hal ini dapat digunakan untuk menarik para investor di berbagai sektor Ekonomi Hijau. Di sini, peran lembaga-lembaga keuangan dalam meminjamkan uang untuk investasi dapat diperjelas lebih jauh, berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau. Juga, peran Badan Penanaman Modal Daerah dapat lebih diperjelas, karena selama pelaksanaan survei mereka menyembunyikan diri.

3. Meningkatkan dan mempromosikan hasil hutan bukan kayu lokal

- Bidang prioritas pertanian dan HHBK harus mendorong industri lokal untuk berkembang dan meningkat dan mendiversifikasi produk mereka. Inisiatif lokal ada di Berau yang menemukan dan mempromosikan tumbuh-tumbuhan bergizi dari hutan sebagai alternatif dari produk pangan pokok. Selain tujuan pangan, hasil hutan bukan kayu lainnya harus diidentifikasi, seperti misalnya rotan. Bahkan, biaya ekspor produk-produk lokal dapat ditekan dengan menggunakan kontainer yang menuju keluar kabupaten, yang sejauh ini kosong.

nationally, and internationally, and learn ways how to reach them. This is started recently by trainings on value chain analysis and rapid market assessment organized by GIZ TC.

- All in all, it is important to listen to local communities and recognize as what they see as potential and need, and use existing mechanisms to concretize this into action planning.
- In this, more involvement with the ministry of Tourism and Creative Economy could be explored.

4. Greening 'Brown Economy' practices

- The presence of heavy exploitative industries in Berau in some cases are accepted as a fact to boost the economy. But, there should be a shift towards environment friendly, or friendlier, technologies that would diminish the impacts of these industries to nature. Therefore, as in Kapuas Hulu, involvement of the Agency for Development and Application of Technology (BPPT) should be forged. Also, the role of the Environment Service should be stronger in giving permits, monitoring the actual operation of extractive industries and the reclamation of used plots.
- Furthermore, instead of focusing on priority energy sources, as stated in the district plan, instead of explicitly focusing on renewable energy, it is suggested to prioritize renewable energy. Here too, achievements should be published, and possibly linked to the reduced emission levels.
- In addition, the scope of renewable energy should be widened, including the production of biogas from

- Karena akses pasar untuk produk-produk lokal merupakan masalah yang dihadapi para produsen, untuk membangkitkan antusiasme mereka, mereka harus mempunyai pandangan yang jelas mengenai permintaan pasar, secara regional, nasional, dan internasional, dan memelajari berbagai cara bagaimana menjangkau mereka. Hal ini baru-baru ini dimulai dengan berbagai pelatihan mengenai analisis rantai nilai dan penilaian pasar cepat yang diorganisir oleh GIZ TC.
- Dalam keseluruhannya, penting untuk mendengarkan masyarakat setempat dan mengenali apa yang menurut mereka potensial dan dibutuhkan, dan menggunakan berbagai mekanisme yang ada untuk mengkonkretkan ini menjadi rencana tindakan.
- Dalam hal ini, keterlibatan lebih jauh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dijajaki.

4. Menghijaukan praktik 'Ekonomi Coklat'

- Kehadiran berbagai industri berat yang eksploitatif di Berau dalam beberapa kasus diterima sebagai fakta untuk mendorong ekonomi. Tetapi, harus ada pergeseran menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan, atau lebih ramah, yang akan mengurangi dampak industri ini terhadap alam. Oleh karenanya, sebagaimana halnya di Kapuas Hulu, keterlibatan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) harus dibina. Juga, peran Dinas Lingkungan Hidup harus lebih kuat dalam memberikan berbagai perizinan, memantau operasi aktual industri ekstraktif dan reklamasi plot-plot yang telah digunakan.
- Selanjutnya, sebaliknya dari berfokus pada sumber-sumber energi prioritas, sebagaimana dinyatakan dalam rencana kabupaten, sebaliknya dari berfokus secara eksplisit pada energi terbarukan, maka disarankan untuk memrioritaskan energi terbarukan. Di sini juga, pencapaian harus dipublikasikan, dan mungkin

agricultural waste, suggested, such as from palm oil and tofu production.

- At the same time, the role of the district's potable water company, PDAM, could be further explored into the direction of conservation of water sources. Thus far, their activities are limited to technical support in the delivery of water. Though, as a district owned company, they would want to be more independently involved in the protection of their environment.

5. **Optimize CSR Resources:**

- The presence of Article 74 of law no. 40 / 2007 and government regulation no. 47 / 2012 (3.2.3) that prescribes CSR programs for companies extracting from natural resources, should become an entry point to distribute this huge source of financial sources to the District Budget for the purpose of development. Therefore, progressive ideas for implementation need to be developed and supported by political will that does not only impact directly to the impacted area, but also to the areas 'downstream'. One of the initiatives to develop a system of collecting, distributing, applying, and monitoring csr funds have been done so by one of the members of the National Committee of Indonesian Youth (KNPI) chapter Berau, since 2009. In principle, it aims for a District regulation that regulates and determines the percentage of csr funds based on investments and/ or production. In the distribution a commission should determine the feasibility and broader impact of a certain need, and continuous field support is required, that could become

dikaitkan dengan tingkat pengurangan emisi.

- Sebagai tambahan, lingkup energi terbarukan harus diperluas, termasuk produksi biogas dari limbah pertanian, yang disarankan, seperti (limbah) dari kelapa sawit dan produksi tahu.
- Pada waktu yang sama, peran perusahaan daerah air minum kabupaten, PDAM, dapat dijajaki lebih jauh ke arah konservasi sumber air. Sejauh ini, kegiatan mereka terbatas pada dukungan teknis dalam pengiriman air. Meskipun, sebagai perusahaan milik kabupaten, mereka ingin lebih bebas dan lebih banyak terlibat dalam perlindungan lingkungan.

5. Mengoptimalisasikan sumber dana CSR:

- Adanya pasal 74 undang undang no. 40 tahun 2007 dan peraturan pemerintah no. 47 tahun 2012 (3.2.3) yang mengharuskan perusahaan memiliki dana atau program CSR, harus menjadi titik masuk untuk menyalurkan sumber daya keuangan yang sangat besar ini ke anggaran kabupaten untuk tujuan pembangunan. Oleh karenanya, ide-ide progresif untuk implementasi harus dikembangkan dan didukung melalui kemauan politik yang bukan hanya akan berdampak langsung pada daerah terdampak, tetapi juga daerah 'hilir'. Salah satu upaya untuk membangun sistem penghimpunan, penyaluran dan penerapan, dan pemantauan dana CSR telah dikembangkan oleh salah satu anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Berau, sejak tahun 2009. Pada prinsipnya, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur dan menentukan persentase dana csr berdasarkan investasi dan/ atau hasil produksi. Dalam penyaluran perlu ada komisi yang menentukan kelayakan dan dampak luasnya sebuah kebutuhan, dan diperlukan pendampingan yang berkelanjutan, yang mana dapat menjadi lapangan

a labor market for youth studying outside the district.

- A similar system of CSR funds could be organized for funds from (international) NGO's flowing in the region as well. In order to have optimal impact from these funds, there should be coordination by the district government.

4.2.2 Kapuas Hulu

The survey resulted in a data base of public and private investments or initiatives of Rp 124.430.157.624,00 in the district of Kapuas Hulu, in 2012. Compared to the size of economy in 2012 (Rp 2.732.172.920.665,00), these green economy investments take up 4,6% of total.

Based on figures collected, interviews, and focused group discussions during the visit to Kapuas Hulu (see separated report chapter 3), the following findings can be summarized:

- Investments in sectors such as Economic Development, Capacity Development, Culture, and (eco-) Tourism were still relatively small (respectively 5%, 2%, 2%, and 1% of total collected figures) compared to other sectors, which brings room for development and that could be integrated into the regional planning.
- Specifically the Culture and Tourism Service stated the need for support from a consultant in developing the Regional Core Plan for Tourism, as a framework for this service. This consultant preferably brings in experience in developing ecotourism in remote areas.
- Stakeholders from the regional government such as the Mining and Energy Service (specifically related to renewable energy), Forestry Service and Plantations Service, and the Environment Agency, each held a share under 5% from total collected investments into Green

kerja bagi putra daerah yang berkuliah di luar daerah.

- Sistem serupa CSR dapat dilakukan dengan dana yang berasal dari LSM (internasional) yang mengalir ke daerah ini. Agar dapat memberi dampak optimal dari dana ini, harus ada koordinasi oleh pemerintah kabupaten.

4.2.2 Kapuas Hulu

Survei tersebut menghasilkan basis data tentang investasi pemerintah dan swasta atau inisiatif yang mendukung Ekonomi Hijau sebesar Rp 124.430.157.624,00 di kabupaten Kapuas Hulu, tahun 2012. Dibandingkan dengan ukuran ekonomi pada tahun 2012 (Rp 2.732.172.920.665,00), investasi Ekonomi Hijau ini menggunakan 4,7% dari anggaran total.

Berdasarkan angka yang terkumpul, wawancara dan diskusi terarah selama kunjungan ke Kapuas Hulu (lihat laporan terpisah, bab 3), penemuan berikut dapat diringkas:

- Investasi dalam sektor Pengembangan Ekonomi, Budaya, Pengembangan Keahlian, dan Wisata Alam terdapat nilai investasi terhadap Ekonomi Hijau yang relatif masih kurang (masing-masing 5%, 2%, 2%, and 1% dari seluruh investasi terkumpul) dibandingkan sektor lain, yang memberi peluang pengembangan yang dapat dituangkan dalam perencanaan daerah.
- Khususnya Dinas Budaya dan Pariwisata menyatakan membutuhkan dukungan konsultan dalam penyusunan Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah, untuk dijadikan kerangka kerja Dinas ini. Konsultan ini diharapkan membawa pengalaman dalam pengembangan ekowisata di daerah pelosok.
- Pemegang peran dari sisi pemerintah daerah, diantaranya Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Wisata, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,

Economy in Kapuas Hulu. Each service could improve investments into Green Economy through policies that refer to sustainable development.

- As for the spread of investments in Green Economy over the Kapuas Hulu District, the subdistrict of Putussibau Utara (center of government) received an investment (Rp 17 billion) far above the district's average (i.e. Rp 4 billion); meanwhile, 19 of 23 subdistricts received around or less then this average, with Empanang, Puring Kencana, and Seberuang with investments under Rp 1 billion. With this, these subdistrict should be taken more into consideration.
- Laws and regulations about Green Economy to be developed and applied a division of roles related development towards Green Economy, beyond the roles of tourism and forestry.
- Companies entering this district should adhere to the rules and regulations of this Kabupaten Konservasi.
- Outreach and guidance to services and community as execution in the field.
- Change techniques that so far have been wrong or damaging environment into more environment friendly techniques.
- Develop a Green Economy program into a Grand Design, with Agriculture and Tourism as the main focus, in accordance to the regional medium term plan. Looking into program development for each of these priority areas, linked to the general recommendations and to the main elements of a Green Economy .

1. ***Mainstreaming the Concept into policy making***

   In general, rules and regulations that would accelerate Green Economy development should be in place, preferable by District Head's Decree. In light of the upcoming elections of a new head of district (bupati)

masing-masing masih menyumbang dibawah 5% dari seluruh investasi dalam Ekonomi Hijau di Kapuas Hulu yang terkumpulkan. Masing-masing dinas dapat meningkatkan investasi dalam Ekonomi Hijau melalui kebijakan yang mengacu ke pembangunan lestari.

- Untuk sebaran investasi Ekonomi Hijau di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu, kecamatan Putussibau Utara (pusat pemerintahan) menunjukkan penerimaan investasi (Rp 17M) jauh diatas rata-rata kabupaten (Rp 4M); sementara, 19 dari 23 kecamatan menerima sekitar atau dibawah rata-rata ini, dengan Empanang, Puring Kencana, dan Seberuang menerima investasi dibawah Rp 1M. Dengan demikian, kecamatan tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri.
- Undang-undang dan peraturan mengenai Ekonomi Hijau harus dirumuskan dan diterapkan pembagian peran terkait pembangunan menuju Ekonomi Hijau, selain peran pariwisata dan kehutanan.
- Para investor harus disadarkan bahwa KH adalah sebuah Kabupaten Konservasi, dengan demikian, ada konsekuensinya, misalnya tidak boleh berproduksi di lahan kritis.
- Penyuluhan dan bimbingan untuk tingkat departemen dan masyarakat sebagai pelaksanaan di lapangan
- Mengubah teknik-teknik yang sejauh ini keliru atau merusak lingkungan menjadi teknik yang lebih ramah lingkungan
- Mengembangkan sebuah program Ekonomi Hijau menjadi Rancangan Akbar, dengan Pertanian dan Wisata sebagai fokus pengembangan, sesuai RPJMD.
- Secara lebih khusus ketika meninjau pengembangan program untuk masing-masing bidang prioritas ini, terkait dengan rekomendasi umum dan unsur-unsur utama Ekonomi Hijau (4.1):

1. ***Mengarusutamakan Konsep tersebut ke dalam pembuatan kebijakan***

   Secara umum, undang-undang dan peraturan yang akan mempercepat pembangunan hijau harus ada, khususnya Keputusan Bupati. Dalam semangat

in 2015, April/May 2014 would have been a good period to motivate government services to review their plans with regards to Green Economy or sustainable development, whereby GIZ could have facilitated the discussions. The outcomes of the discussions would be collected and collated by the District Planning Development Agency (BAPPEDA) and offered to the candidate head of District as input to the formulation of so called Election Papers, which would trickle down the policy making scheme: the Regional Spatial Plan (RTRW), District mid-term development plan 2015 - 2019 (RPJMD), the Strategic Plans of each service (Renstra SKPD), and the Core Work Plan (rencana kerja induk) of each service, down to the Village Mid term Development Plans (RPJMDes). These planning discussions should also have talked about financing schemes within each service dedicated to supporting developments towards Green Economy.

The head of division for Social Cultural affairs under BAPPEDA urged to take this opportunity. This support should be widened to the divisions of Infrastructure and Economy.

Furthermore, those government entities should be identified that are less involved so far, e.g.: Economic Affairs of the Regional Secretariat and of the Regional Planning Agency, the Agency for Village Development Support, Provincial bodies, and National bodies like Public Works (PU), Ministry of Remote Areas Development (KPDT).

Moreover, in line with the district's mid-term plan 2011-2015, mainstreaming should be started in the main sectors that form the pillars of development of the district, i.e. agriculture and tourism. Therefore, a more specified program

pemilihan bupati 2015, April/Mei 2014 yang lalu menjadi momentum yang baik untuk memotivasi dinas pemerintah untuk meninjau rencana mereka terkait Ekonomi Hijau atau pembangunan berkelanjutan, dengan difasilitasi oleh GIZ. Hasil diskusi ini dikumpulkan dan disusun oleh BAPPEDA dan ditawarkan kepada calon bupati sebagai masukan untuk pembentukan apa yang disebut sebagai Makalah Pemilihan, dan membumi melalui skema pembuatan kebijakan, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2019 (RPJMD), Rencana Strategis dari masing-masing dinas (Renstra SKPD), Rencana Induk dari masing-masing dinas, sampai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Diskusi perencanaan seharusnya juga membicarakan skema pembiayaan di masing-masing dinas untuk mendukung pembangunan menuju Ekonomi Hijau.

Kepala bagian Sosial Budaya BAPPEDA menyarankan untuk menggunakan kesempatan ini. Dukungan ini harus diperluas ke kedua bagian Infrastruktur dan Ekonomi.

Selanjutnya, perlu diidentifikasi entitas pemerintah yang tidak terlalu terlibat sejauh ini, misalnya: Urusan Ekonomi dari Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, , badan-badan Provinsi, dan badan-badan Nasional seperti Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pembangunan Daerah Terpencil (KPDT).

Terlebih lagi, sejalan dengan rencana jangka menengah kabupaten 2011-2015, pengarusutamaan harus dimulai di sektor utama yang membentuk pilar-pilar pembangunan kabupaten, yaitu pertanian dan pariwisata. Oleh karenanya, suatu program yang lebih terspesifikasi harus dirancang untuk memasukkan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau ke dalam berbagai kebijakan dan program sektor-sektor ini, yang akan memberi dampak langsung

should be designed to insert Green Economy principles into the policies and programs of these sectors, that would have direct or indirect impacts to other sectors and government services. Discussions can be continued based on existing documents, such as the Grand Design and the Road Map for Eco-tourism development. Related to the latter, icons of eco-tourism in the region should be further, aggressively, exposed, to develop a certain local pride.

A suggestion that came up during an interview was to present Green Economy development in a business plan, with clear targets in terms of revenue and growth in new jobs.

2. ***Mainstreaming the Concept through District Marketing***

Besides securing internal support at the district government for this concept, more awareness should be developed among its citizens, through exposure of programs and achievements, and instruments to motivate and support citizens' initiatives in support of this concept. Exposing these achievements should support the image building of Kapuas Hulu as a kabupaten konservasi, but also as a unique place with two national parks in the border areas of Indonesia. With this, a stronger communication can be applied towards resources extracting companies in that operating in a *kabupaten konservasi* has its implications.

Furthermore, it should be made clear to a wider audience that Green Economy investments resulted in a certain degree of economic improvement, in other words, capitalizing Green Economy activities, if possible against 'brown economy' activities.

Related to this, although not included in this survey due to non-response, are

ataupun tidak langsung pada sektor lain dan dinas pemerintah. Diskusi dapat dilanjutkan berdasarkan dokumen yang ada, seperti misalnya Rancangan Akbar dan pengembangan Peta Jalan untuk Eko-wisata. Terkait dengan hal kedua tadi, ikon-ikon ekowisata di daerah itu harus dipajankan lebih jauh dan agresif, untuk mengembangkan suatu kebanggaan lokal tertentu.

Sebuah saran yang muncul selama salah satu wawancara adalah untuk menyampaikan pengembangan Ekonomi Hijau dalam sebuah rencana bisnis, dengan target yang jelas dalam pengertian pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja baru.

2. ***Mengarusutamakan Konsep tersebut melalui Pemasaran Kabupaten***

Selain mengamankan dukungan internal di pemerintah kabupaten untuk konsep ini, harus dikembangkan kesadaran yang lebih tinggi di antara para warganya, melalui pemaparan berbagai program dan pencapaian, dan instrumen untuk memotivasi dan mendukung inisiatif warga dalam mendukung konsep ini. Memaparkan pencapaian ini akan mendukung pembangunan citra Kapuas Hulu sebagai sebuah kabupaten konservasi, tetapi juga sebagai tempat yang unik dengan dua taman nasional di kawasan perbatasan Indonesia. Dengan ini, komunikasi yang lebih kuat dapat diterapkan terhadap perusahaan penambang sumber daya yang beroperasi di sebuah kabupaten konservasi mempunyai implikasi.

Selanjutnya, harus diperjelas kepada audiens yang lebih luas bahwa investasi Ekonomi Hijau berakibat pada derajat peningkatan ekonomi tertentu, dengan perkataan lain, mengkapitalisasi kegiatan Ekonomi Hijau, bila memungkinkan, terhadap kegiatan 'ekonomi coklat'.

Terkait hal ini, meskipun tidak tercakup dalam konteks Kapuas Hulu karena tidak adanya respons, adalah inisiatif yang diambil oleh berbagai perusahaan

the initiatives undertaken by companies that are obliged by law to execute CSR-activities. By exposing CSR activities, more coordination can be established between the regional government, companies and communities, to improve and strengthen the impact of these initiatives towards a Green Economy development.

Furthermore, it would be good to connect the district to another district that already has some degree of development towards a Green Economy that can serve as an example and a forum for exchange. Related to this, the collection of best practices in Green Economy applications as examples from within the region, within the national, or even from other countries, could boost the motivation to actually implement a Green Economy.

3. ***Improve and promote local, non-timber, forest products***

Local products, like varieties of rice, wild honey, cocoa, rubber, fish, should be supported to be more product effective, and diversified to attract a wider market, enabled by good infrastructure and market facilities. Also, in this case, a forum for exchange with producers of similar commodities from other areas, would improve knowledge and strengthen the motivation of local communities in cultivating their local natural resources in a sustainable manner. Therefore, the local business incubator, represented by a representative of one of the Credit Unions, and supported by the Agency for Technology Analysis and Application (BPPT) should be further explored. Also the role of financial institutions should be further expressed in how they can contribute to the financing of Green Economy activities, e.g. through soft loans. With this, support does not only come as financial incentives, but also in skills improvement and even market opportunities. Programs could be

yang diwajibkan oleh hukum untuk melaksanakan berbagai kegiatan CSR. Dengan memaparkan kegiatan CSR, lebih banyak koordinasi yang dapat dibentuk antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat, untuk meningkatkan dan memperkuat dampak inisiatif ini terhadap pembangunan Ekonomi Hijau.
Selanjutnya, dipandang baik untuk menghubungkan kabupaten ini dengan kabupaten lainnya yang telah memiliki derajat pengembangan tertentu menuju Ekonomi Hijau yang dapat berperan sebagai contoh dan forum pertukaran. Terkait hal ini, pengumpulan praktik-praktik terbaik dalam penerapan Ekonomi Hijau sebagai contoh dari daerah itu sendiri, dalam lingkup nasional, atau bahkan dari negara-negara lain, dapat mendorong motivasi untuk benar-benar mengimplementasikan Ekonomi Hijau.

3. ***Meningkatkan dan mempromosikan hasil hutan bukan kayu lokal***

Produk-produk lokal, seperti berbagai varietas padi, madu hutan, coklat, karet, ikan, perlu didukung agar lebih efektif produk, dan didiversifikasi untuk menarik pasar yang lebih luas, dimampukan oleh infrastruktur dan fasilitas pasar yang baik. Juga, dalam kasus ini, suatu forum untuk pertukaran dengan para produsen komoditas sejenis dari daerah-daerah lain, akan meningkatkan pengetahuan dan memperkuat motivasi masyarakat setempat dalam membudidayakan sumber daya alam lokal mereka dengan cara yang berkelanjutan. Oleh karenanya, inkubator bisnis setempat, diwakili oleh perwakilan dari salah satu Koperasi simpan pinjam, dan didukung oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) harus dijajaki lebih jauh. Juga peran berbagai lembaga keuangan harus diekspresikan lebih jauh bagaimana mereka dapat berkontribusi pada pendanaan kegiatan Ekonomi Hijau, misalnya melalui kredit lunak.

Dengan ini, dukungan tidak hanya datang sebagai insentif keuangan, tetapi juga

developed from the Agriculture and Ecotourism perspective.

4. ***Greening 'Brown Economy' practices***
Besides the CSR initiatives by companies operating in Kapuas Hulu, it would be good to also review and monitor the practices of these companies, into more energy efficient and environment friendly processes through waste management and rejuvenation of used plots of lands (closed circles); with this contributing to the reduction of GHG emissions. The results and achievements should also be communicated to a wider audience to motivate and raise awareness.

4.2.3 Malinau

The survey resulted in a data base of public and private investments of Rp 323.877.837.428,73 in the district of Malinau, in 2012. Compared to the size of economy in 2012 (Rp 2.771.690.240.000,00), these green economy investments take up 3,0% of total.

Based on figures collected, interviews, and focused group discussions during the visit to Malinau (see separated report chapter 3), the following findings can be summarized:

- Investments in sectors such as Infrastructure, Food Security, Renewable Energy, Economic Development, were still relatively small (respectively 5%, 5%, 4%, and 3% of total collected figures), and Ecotourism even less than 1%, compared to other sectors. These sectors gain specific attention to develop Green Economy.
- Stakeholders such as the Plantation, Mining and Energy, and Forestry Services, each held a share under 5% from total collected investments into Green Economy in Malinau. Therefore, the role of these services could be improved through the development of policies towards Green Economy.

dalam peningkatan keterampilan dan kesempatan pemasaran. Program-program dapat dikembangkan dari sudut pandang Pertanian dan Ekowisata.

4. ***Menghijaukan praktik-praktik 'Ekonomi Coklat'***
Selain inisiatif CSR oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di Kapuas Hulu, baik juga untuk juga meninjau dan memantau praktik-praktik perusahaan ini, ke arah berbagai proses yang lebih efisien energi dan ramah lingkungan melalui pengelolaan limbah dan peremajaan plot-plot yang telah digunakan (lingkaran tertutup), dengan cara ini berkontribusi pada pengurangan emisi GRK. Berbagai hasil dan pencapaian harus dikomunikasikan juga kepada audiens yang lebih luas untuk membangkitkan semangat dan kesadaran.

4.2.3 Malinau

Survei tersebut menghasilkan basis data tentang investasi pemerintah dan swasta atau inisiatif yang mendukung Ekonomi Hijau sebesar Rp 323.877.837.428,73 di kabupaten Malinau, pada tahun 2012. Dibandingkan dengan ukuran ekonomi pada tahun 2012 (Rp 2.771.690.240.000,00), investasi Ekonomi Hijau ini menggunakan 3,0% dari anggaran total.

Berdasarkan angka yang terkumpul, wawancara dan diskusi terarah selama kunjungan ke Malinau (lihat laporan terpisah, bab 3), rekomendasi berikut dapat diringkas:

- Investasi dalam sektor Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Energi Terbarukan, Perkembangan Ekonomi terdapat Ekonomi Hijau relatif masih kurang (masing-masing 5%, 5%, 4%, and 3% dari seluruh investasi terkumpul) dan Ekowisata bahkan kurang dari 1%. Sektor-sektor ini menjadi perhatian tersendiri untuk mengembangkan Ekonomi Hijau.
- Pemegang peran dari sisi pemerintah daerah, diantaranya Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Dinas Kehutanan, masing-masing masih menyumbang dibawah 5% dari seluruh

- As for the spread of investments in Green Economy over the Malinau District, the subdistrict of Malinau Utara (center of government) received an investment (Rp 76_billion) far above the district's average (i.e. Rp 20 billion); meanwhile, 6 out of 12 subdistricts received around or less then this average, with the lowest receiving Rp 11 billion in Kayan Hulu. With this, the spread over the district can be said to be more equal, compared to the other districts.
- Need to link up CSR initiatives to District Government policies and programs through a forum of CSR initiative takers, while also pointing at the obligation to practice CSR as stated in the law on Limited Enterprises (Perseroan Terbatas, PT)
- Improve working systems from traditional/non-technical to more efficiency using the appropriate technology, depending on the variable conditions within the District.
- Need for harmonization in agroforestry between forestry and agriculture, and the challenges in packaging and marketing forest and agriculture products.
- Need to clarify the profits from Green Economy for the economy and society.

Looking into program development for each of these priority areas, linked to the general recommendations and to the main elements of a Green Economy (4.1):

1. ***Mainstreaming the Concept into policy making***
   When talking about mainstreaming Green Economy, it is of importance to connect with (the language of) existing initiatives that support the principles of Green Economy. As mentioned in the related part, the two main concepts of Kabupaten Konservasi and Gerdema do cover a great part of these principles.

investasi dalam Ekonomi Hijau di Malinau yang terkumpulkan. Maka, peran dinas tersebut dapat ditingkatkan melalui pengembangan kebijakan yang mengarah ke investasi Ekonomi Hijau.

- Untuk sebaran investasi Ekonomi Hijau di seluruh Kabupaten Malinau, kecamatan Malinau Utara (pusat pemerintahan) menunjukkan penerimaan investasi (Rp 70 M) jauh diatas rata-rata kabupaten (Rp 20 M); sementara, 6 dari 12 kecamatan menerima sekitar atau dibawah rata-rata ini, dengan penerima terendah Rp 11 M di Kayan Hulu. Dengan demikian, sekiranya sebaran investasi Ekonomi Hijau bisa dikatakan cukup merata, dibandingkan di dua kabupaten lain.
- Perlu mengaitkan inisiatif CSR dengan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten melalui forum pengambil inisiatif CSR, sementara juga menunjuk pada kepatuhan dalam mempraktikkan CSR sebagaimana dinyatakan dalam hukum mengenai Perseroan Terbatas (PT).
- Meningkatkan sistem kerja dari tradisional/non-teknis menjadi efisiensi lebih baik dengan menggunakan teknologi yang sesuai,tergantung dari kondisi variable dalam Kabupaten.
- Perlu adanya keselarasan dalam penerapan agroforestri antara kehutanan dan pertanian,
- Perlunya ada pengembangan dalam pengemasan dan pemasaran hasil hutan dan pertanian.
- Perlu diperjelas keuntungan yang didapatkan dari Ekonomi Hijau bagi ekonomi dan masyarakat.

Secara lebih khusus ketika meninjau pengembangan program untuk masing-masing bidang prioritas ini, terkait dengan rekomendasi umum dan unsur-unsur utama sebuah Ekonomi Hijau (4.1):

1. ***Mengarusutamakan Konsep tersebut ke dalam pembuatan kebijakan***
   Ketika berbicara mengenai

Nevertheless, the two existing concepts seem not to make reference to each other, rather being applied and communicated separately. Here is an opportunity with the introduction of the Green Economy concept to serve as the overarching concept that connects both concepts in a comprehensive approach of regional development. Green Economy can offer a framework either to evaluate achievements under these existing concepts, or to design for developments within these concepts. On the other hand, Green Economy as a globally accepted concept can place the achievements under these existing concepts in a wider, global context.

Therefore, to GIZ, it is important to communicate clearly about the purpose, position, and added value of the Green Economy concept, in relation to existing concepts in the district. For this purpose of communication, it would be good to tailor the language and terminology in order to be able to connect to a wide and varied audience (Annex 3. Headline Indicators of Green Economy), and keep away from difficult formulations of concepts.

Furthermore, GIZ should facilitate the actual harmonization of the Green Economy concept, not just with the earlier mentioned existing concepts, but also with the actual documents related regional planning covering all services.

2. ***Mainstreaming the Concept through District Marketing:***
In line with the issue of communication about concepts, it is equally important that the district government communicates about achievements and current objectives and executions of these concepts. If not, momentum will be lost to actually give meaning to the concepts. By communicating about progress and

pengarusutamaan Ekonomi Hijau, dianggap penting untuk dihubungkan dengan (bahasa) gagasan yang sudah ada yang mendukung berbagai prinsip Ekonomi Hijau. Sebagaimana disebutkan dalam bagiannya, dua konsep utama yaitu Kabupaten Konservasi dan Gerdema memang mencakup sebagian besar dari prinsip-prinsip ini. Namun demikian, kedua konsep yang ada tersebut tampaknya tidak saling mengacu, dan lebih cenderung diterapkan dan dikomunikasikan secara terpisah. Di sini ada peluang untuk memperkenalkan konsep Ekonomi Hijau untuk berperan sebagai konsep yang menyeluruh yang menghubungkan kedua konsep menjadi pendekatan yang terpadu dalam pembangunan daerah. Ekonomi Hijau dapat menawarkan suatu kerangka kerja baik untuk mengevaluasi berbagai pencapaian melalui kedua konsep yang ada ini, atau untuk merancang pembangunan dalam kerangka konsep-konsep tadi. Sebaliknya, Ekonomi Hijau sebagai konsep yang diterima secara global, dapat menempatkan berbagai pencapaian melalui konsep yang ada di daerah, dalam konteks yang lebih luas dan global.

Oleh karenanya, untuk GIZ, penting untuk mengomunikasikan dengan jelas mengenai tujuan, posisi, dan nilai tambah dari konsep Ekonomi Hijau, dalam kaitannya dengan berbagai konsep yang sudah ada di kabupaten tersebut. Untuk tujuan komunikasi, akan baik untuk menata bahasa dan terminologinya agar dapat berhubungan dengan audiens yang luas dan bervariasi (Lampiran 3. Indikator Utama Ekonomi Hijau), dan menghindari perumusan konsep yang sulit.

Selanjutnya, GIZ harus memfasilitasi penyelarasan aktual konsep Ekonomi Hijau, bukan hanya dengan konsep-konsep yang sudah ada yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga dengan dokumen aktual terkait perencanaan daerah yang mencakup semua dinas.

2. ***Mengarusutamakan Konsep tersebut melalui Pemasaran Kabupaten:***
Sejalan dengan masalah komunikasi

proceedings, it could contribute to a local pride, away from perceptions of hollow concepts. Therefore, a solid data base of achievements is important, and the collection of this could be coordinated by the Malinau Bureau of Statistics. Again, Green Economy could offer a framework for this, and the data collected during this survey could be a stepping stone. But, therefore, the district government should embrace the concept and mainstream it as an overarching concept. Moreover, it should be made aware of the benefits of the concept and the programs in line with this concept, e.g. REDD Demonstration Activities and Carbon Counting.

Furthermore, to GIZ, it is important to update the data annually in order to monitor the trends in investments in Green Economy, to see whether the targeted rise of 10% is achieved by 2016, and to continue supporting the district government in necessary adjustments in mainstreaming strategies.

The stakeholders that have been investing in Green Economy related initiatives need to be connected with each other on a regular base, to learn from each other, what initiatives are being undertaken, and how they could join forces to optimize the development towards a Green Economy. Therefore, it is suggested to involve a wider audience, taken into account that Green Economy not only touches upon

mengenai konsep, sama pentingnya bagi pemerintah kabupaten untuk mengomunikasikan pencapaian dan sasaran saat ini dan pelaksanaan konsep-konsep tersebut. Bila tidak dilakukan, momentum untuk benar-benar memberikan arti pada konsep-konsep tadi akan hilang. Dengan mengomunikasikan kemajuan dan tata cara, hal tersebut dapat berkontribusi pada kebanggaan lokal, jauh dari persepsi konsep-konsep yang hampa. Oleh karenanya, suatu basis data yang kuat mengenai pencapaian merupakan hal penting, dan pengumpulan basis data ini dapat dilakukan oleh Biro Pusat Statistik Malinau. Sekali lagi, Ekonomi Hijau dapat menawarkan kerangka kerja untuk hal ini, dan data yang dikumpulkan selama survei ini dapat menjadi batu loncatan. Tetapi, dengan demikian, pemerintah kabupaten harus merangkul konsep tersebut dan mengarusutamakannya sebagai konsep yang menyeluruh. Terlebih lagi, pemerintah kabupaten harus digugah kesadarannya mengenai manfaat konsep dan program yang sejalan dengan konsep ini, misalnya Kegiatan Demonstrasi REDD dan Penghitungan Karbon.

Selanjutnya, untuk GIZ, merupakan hal penting untuk memutakhirkan data setiap tahun untuk dapat memantau tren/kecenderungan dalam investasi dalam Ekonomi Hijau, untuk melihat apakah peningkatan yang ditargetkan sebesar 10% tercapai pada tahun 2016, dan untuk melanjutkan dukungan untuk pemerintah kabupaten dalam penyesuaian yang dibutuhkan dalam strategi pengarusutamaan berbagai strategi

Para pemangku kepentingan yang telah berinvestasi dalam kegiatan terkait Ekonomi Hijau harus saling berhubungan secara teratur, untuk saling mempelajari kegiatan apa yang sedang dilakukan, dan bagaimana mereka dapat memadukan kekuatan untuk mengoptimalisasi pembangunan menuju Ekonomi Hijau. Oleh karenanya, disarankan untuk melibatkan audiens yang lebih luas,

forests, but also (urban) settlements. GIZ could support the District Government to connect the wider range of stakeholders to coordinate in prioritization and planning of future investments in Green Economy.

4.2.4 Peer review

Participants of IES-workshop

As a side event to the Training course on 'Integrating Ecosystem Services (IES) into Development Planning' (Bogor, 17-20 March 2014), the preliminary results of the three surveys have been presented to peer who participated in this training (March 19, 2014). The following remarks and recommendations were conveyed:

- Human resources also need to be taken into account, for example through trainings
- Present the correlation between the Regional Government Budget (APBD) with the investments in Green Economy
- Present investments that are not directly visible, such as the process towards protected lakes
- Determine Green Economy indicators within each division of regional governments' services as a guidance and to measure outputs
- In each district the understanding of Green Economy should be discussed and a definition determined
- Limit the focus or scope of work, with the risk of having recommendations that are only focused on the scope that is being measured, to determine the direction of development.
- It needs to be reassessed wether investments are specifically for (Green Economy) activities, or that much of the budget is spent on items that are not directly related.

dengan memerhatikan bahwa Ekonomi Hijau tidak hanya menyentuh hutan, tetapi juga pemukiman (urban). GIZ dapat mendukung Pemerintah Kabupaten untuk menghubungkan jangkauan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk berkoordinasi dalam pemrioritasan dan perencanaan investasi dalam Ekonomi Hijau di masa depan.

4.2.4 Tinjauan sesama profesi (peer review)

Peserta Loka Karya IES

Sebagai acara sampingan dari kursus-kursus Pelatihan mengenai 'Memadukan Layanan Ekosistem (IES) dengan Perencanaan Pembangunan' (Bogor, 17-20 Maret 2014), hasil sementara dari ketiga survei sudah dipresentasikan kepada sesama rekan kerja yang berpartisipasi dalam pelatihan ini (19 Maret, 2014).

Berikut disampaikan beberapa komentar dan rekomendasi:

- Sumber daya manusia juga harus diperhatikan, misalnya melalui berbagai pelatihan.
- Mengemukakan korelasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan investasi Ekonomi Hijau.
- Mengemukakan investasi yang tidak terlihat secara langsung, misalnya berbagai proses menuju danau lindung.
- Menentukan indikator Ekonomi Hijau dalam setiap divisi/bagian dinas pemerintah daerah (SKPD) sebagai panduan dan untuk mengukur keluaran.
- Di setiap kabupaten pemahaman tentang Ekonomi Hijau harus dibicarakan dan definisi ditetapkan.
- Membatasi fokus atau lingkup kerja, dengan risiko mendapat rekomendasi yang hanya berfokus pada lingkup yang sedang diukur, untuk menentukan arah pembangunan.
- Perlu dilakukan penilaian kembali apakah investasi ditujukan khusus untuk kegiatan (Ekonomi Hijau), atau sedemikian besar bagian dari anggaran itu dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung.

- Expose those respondents that have been reached, to be able to see who have not responded yet to this survey.

Participants Presentation of Final Results

In order to 'give back' the final results of the survey to the 'owners' of this data, i.e. stakeholders in the districts, a round of presentations was executed. As a closure, a peer presentation was held at the Ministry of Forestry in Jakarta, on June 21 2014.

The points for follow up during the final results workshop were more or less in line with the input in the first round of workshops. In addition, main points from the discussions are the issue of accuracy of the data, the definition and scope of Green Economy, references to relevant researches from other institutions (ILO, etc.), and the need of a law to enforce the implementation of Green Economy.

4.2.5 Outlook

The main challenge would be to actually harmonize the Green Economy concept with regional plans by connecting existing concepts in the districts, such as Kabupaten Konservasi and Gerdema and upgrade them to become a comprehensive approach for the whole region. To come to this point, several steps need to be undertaken, to eventually approach the highest ranks of the district government to make sure it trickles down to the executing layers, as well as upwards to the levels of the provinces. Therefore, to follow up this survey and its results (i.e. database of investments) GIZ should further strategize how to make this database applicable in regional decision making.

These steps require consistent communication to different levels of government representatives, motivating them to come with proposals for prioritization and concretization for mainstreaming into regional planning.

- Mengeskpos responden yang telah dijangkau, untuk dapat melihat siapa yang belum memberi tanggapan terhadap survei ini.

Peserta Presentasi Hasil Akhir Ekonomi Hijau

Dalam rangka 'mengembalikan' hasil akhir survei kepada 'pemilik' data ini, yakni pemegang peran di kabupaten, sebuah putaran presentasi diselenggarakan. Sebagai penutup, sebuah presentasi sesame rekan kerja diadakan di Kementerian Kehutanan di Jakarta, pada tanggal 21 juni 2014.

Masukan untuk tindak lanjut pada loka karya hasil akhir kurang lebih sama dengan masukan pada putaran loka karya pertama. Sebagai tambahan, hal utama yang muncul dari diskusi adalah masalah akurasi data, definisi dan lingkup Ekonomi Hijau, referensi ke penelitian terkait dari lembaga lain (ILO, dll), dan kebutuhan payung hukum untuk menegakkan penerapan Ekonomi Hijau.

4.2.5 Pandangan

Tantangan utamanya adalah untuk benar-benar menyelaraskan konsep Ekonomi Hijau dengan rencana (pembangunan) daerah dengan menghubungkan konsep-konsep yang sudah ada di kabupaten, seperti Kabupaten Konservasi dan Gerdema dan meningkatkannya untuk menjadi pendekatan komprehensif untuk seluruh daerah. Untuk tiba pada titik ini, perlu diambil beberapa langkah, untuk akhirnya mendekati peringkat tertinggi pemerintah kabupaten, untuk memastikan bahwa konsep ini mengalir turun ke jajaran eksekutif, dan juga naik ke atas ke tingkat provinsi. Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti survei ini dan hasilnya (yaitu basis data tentang investasi) GIZ harus menstrategikan lebih jauh untuk menjadikan basis data ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan tingkat kabupaten.

Langkah-langkah ini memerlukan komunikasi konsisten ke berbagai perwakilan

A next step would be to present the final results of the development of these baselines in the three pilot districts, and trigger ideas for follow up, both in terms of data collection to be able to analyze trends towards 2016, as well as for integration into regional planning. Preferably, annual data collection would be facilitated and coordinated by the districts´ government, more specifically through their Bureau of Statistics, by which they could take a more pro-active role in analyzing and presenting data for planning purposes.

In the meantime, progress through initiatives and investments in support of Green Economy, should be communicated to a wider audience, through local and regional media, at national and international forums, to gain feedback, but also to gain (self-) trust about the successes of the approaches applied in the district. Also, local platforms, e.g. a CSR Platform, or a School for Rubber Plantation, would be initiatives taken up by community groups that support the trends towards Green Economy.

In summary, the recommendations are:

- Mainstream the concept of Green Economy into policy development and district marketing:
  - Harmonize GE-concept with district planning and existing concepts (as in respecting local wisdom/knowledge)
  - Improve communication among stakeholders
  - Improve communication about GE-concept
- Improve quality and promotion of non-timber forest products
- Greening 'Brown Economy' activities > innovate and implement on environment friendly technologies.
- Improve data collection as a basis to determine targets for development, trends analysis, and measurement of achievement of targets

pemerintah, memotivasi mereka untuk membuat proposal untuk pemrioritasan dan pengkonkretan untuk pengarusutamaan dengan perencanaan daerah.

Langkah berikutnya adalah untuk menyajikan hasil-hasil akhir dari pengembangan rona awal ini di ketiga kabupaten perintis, dan memicu berbagai gagasan untuk tindak lanjut, baik dalam pengertian pengumpulan data untuk dapat menganalisis tren/ kecenderungan menuju tahun 2016, maupun untuk pengintegrasian dengan perencanaan daerah. Lebih disukai, pengumpulan data tahunan difasilitasi dan dikoordinasi oleh pemerintah kabupaten, lebih khususnya melalui Biro Pusat Statistik mereka, dengan demikian mereka dapat bersikap lebih proaktif dalam menganalisis dan menyajikan data untuk keperluan perencanaan.

Sementara itu, kemajuan melalui berbagai inisiatif dan investasi yang mendukung Ekonomi Hijau, harus dikomunikasikan kepada audiens yang lebih luas, melalui media lokal dan regional, di forum-forum nasional dan internasional, untuk mendapat umpan balik, tetapi juga untuk memperoleh rasa percaya diri mengenai keberhasilan berbagai pendekatan yang diterapkan di kabupaten tersebut. Juga, berbagai panggung (platform) lokal, seperti Platform CSR, atau Sekolah Penanaman Karet, akan menjadi inisiatif yang diambil berbagai kelompok masyarakat yang mendukung tren menuju Ekonomi Hijau.
Sebagai ringkasan, rekomendasinya adalah sebagai berikut:

- Mengarusutamakan konsep Ekonomi Hijau ke dalam kebijakan pembangunan dan pemasaran kabupaten:
  - Menyelaraskan konsep EH dengan perencanaan kabupaten dan konsep-konsep yang ada (seperti misalnya pengetahuan/kearifan lokal)
  - Meningkatkan komunikasi di antara para pemangku kepentingan
  - Meningkatkan komunikasi mengenai konsep EH

- Strengthen institutions, starting at the village level through the mid-term Village Plans to determine their own destiny
- Strenghten the concept of hilirisasi or a development approach that is inclusive of upstream and downstream areas, that would be accommodated in the 'Integrating Ecosystem Services' approach
- Avoid further saturation among stakeholders in the region towards data collection, without prospects of concrete, real actions
- Increase attention towards sustainable sectoral development of agriculture, tourism, renewable energy, small- and medium enterprises.
- Clarify the role of financial institutions / banks and of companies and their obligation to implement corporate social responsibility (Indonesian Law No. 40/2007).
- Identify other important players and their possible roles on all levels of administration e.g.: Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT), Investment Agency (BPM), Chamber of Commerce.

Within these recommendations, steps towards concrete action can be identified, in which both district governments and GIZ, can take an important role to move ahead in achieving a Green Economy.

- Meningkatkan kualitas dan promosi hasil hutan bukan kayu
- Menghijaukan kegiatan 'Ekonomi Coklat' > berinovasi dan menerapkan teknologi ramah lingkungan
- Meningkatkan pengumpulan data sebagai dasar untuk menentukan target pembangunan, analisis tren/ kecenderungan, dan pengukuran pencapaian target
- Memperkuat berbagai lembaga, dimulai di tingkat desa melalui Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa untuk menentukan nasib mereka sendiri.
- Memperkuat konsep hilirisasi atau pendekatan pembangunan yang mencakup daerah hulu dan hilir, yang akan diakomodasikan dalam pendekatan 'Mengintegrasikan Layanan Lingkungan'.
- Menghindari kejenuhan lebih jauh di antara para pemangku kepentingan di daerah terhadap pengumpulan data, tanpa prospek tindakan yang konkret dan nyata.
- Meningkatkan perhatian kepada pembangunan berkelanjutan sektor pertanian, pariwisata, energi terbarukan, usaha kecil dan menengah.
- Memperjelas peran lembaga keuangan / bank dan perusahaan dan kewajiban mereka untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan (Undang-undang N. 40/2007).
- Mengidentifikasi para pemain penting lainnya dan kemungkinan mereka untuk berperan di semua tingkatan administrasi, misalnya: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Penanaman Modal (BPM), Kamar Dagang Indonesia.

Dalam rekomendasi ini, langkah-langkah menuju tindakan konkret dapat diidentifikasi, sehingga baik pemerintah kabupaten maupun GIZ dapat menjalankan peran penting untuk maju terus dalam mencapai Ekonomi Hijau.

4.3 Observations and Lessons Learned

Following are notes of observations and lessons learned during the process of survey in the three districts.

4.3.1 Berau

- Most of the representatives approached for interviews and data were cooperative, and would deliver compiled data as requested through the template, or through the LAKIP, the Accountability Report of Government Institutions' Performance. Nevertheless, the latter needs further clarification on where programs and projects took place. Thus, a combination of this LAKIP and the 'Realisasi Anggaran' (budget realization) in the previous assignments (Malinau dan Kapuas Hulu) would be a good data base for this survey. Moreover, this cooperativeness was perceived positive, taken into account that during this period, many representatives from all services went down to the subdistricts to attend the annual development planning meeting (musrenbang) at the subdistricts level.

- Besides the general notion that there should be real action, incentives, and rewards for their greening efforts so far instead of just data collection, district government representatives showed willingness to think along and give constructive feedbacks during the interviews and FGD's. Main issue that recurred was the fact that not all layers of the government share a common understanding about Green Economy. A massive campaign, as suggested by Salim (2012), should be organized to build a sense of belonging among the decision makers as well as practitioners within the government, for which can be refered to OECD's narrowing down to headline indicators (Annex 3) for purposes of wide audience communication.

4.3 Observasi dan Pelajaran

Berikut adalah catatan observasi dan pelajaran selama proses survei di tiga kabupaten.

4.3.1 Berau

- Sebagian besar perwakilan yang didekati untuk wawancara dan data bersikap kooperatif, dan bersedia memberikan kompilasi data sebagaimana diminta melalui templatnya, atau melalui LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, laporan yang terakhir disebutkan memerlukan klarifikasi lebih jauh mengenai di mana dilaksanakannya program dan proyeknya. Dengan demikian, kombinasi daripada LAKIP dan Realisasi Anggaran dalam tugas-tugas sebelumnya (Malinau dan Kapuas Hulu) akan menjadi basis data yang baik untuk survei ini. Terlebih lagi, sikap kooperatif ini dialami secara positif, dengan memperhitungkan bahwa selama masa survei, banyak perwakilan dari berbagai dinas berkunjung ke setiap kecamatan untuk menghadiri acara tahunan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan.

- Selain gagasan umum bahwa harus ada tindakan nyata, insentif, dan penghargaan untuk usaha penghijauan mereka sejauh ini dan bukan hanya sekadar pengumpulan data, para perwakilan pemerintah kabupaten menunjukkan kesediaan untuk berpikir bersama dan memberikan umpan balik konstruktif selama wawancara dan FGD. Masalah utama yang berulang muncul ialah fakta bahwa tidak semua lapisan pemerintah memiliki pemahaman yang sama mengenai Ekonomi Hijau. Suatu kampanye masif, sebagaimana disarankan oleh Salim (2012), harus diselenggarakan untuk membangun rasa kepemilikan di antara para pengambil keputusan dan juga para

4.3.2 Kapuas Hulu

- The timing of the field visit, at the end of the year, is not optimal to gain optimal results: many government representatives are occupied with 'closing the books' and traveling outside the district for 'last-minute' trainings and seminars.
- The district government showed a welcoming attitude towards the survey, more in general to the aid and attention during the visit from the delegation from the German Ministry of Environment (BMZ). Nonetheless, they stated clearly that the district government does not want to be tied to any contract or agreement. This was expressed by the head of the district, as well as by several heads of services, who would want to express their impatience with 'just data collection' without real action and prospects to profiting from their efforts in conservation so far, referring to their status as kabupaten konservasi.
- At the same time, at lower levels of the services, a highly positive energy could be felt to move the development of the district towards a more sustainable one. Unfortunately, their motivation is not optimally accommodated yet in the current system.

4.3.3 Malinau

- Green Economy is a concept that is being introduced in a district that already uses the concept of Kabupaten Konservasi: to develop the district taking into account the natural resources that it possesses. This concept is backed by a long standing tradition of Dayaks protecting their Tanah Olen. More recently, another concept has been introduced to boost the development of the district, with focused attention to village communities through the concept of Independent Village Communities (Gerdema), stressing the importance of

praktisi dalam lingkup pemerintah, yang dapat mengacu pada OEC penyempitan menjadi indikator utama (Lampiran 3) untuk tujuan komunikasi audiens luas.

4.3.2 Kapuas Hulu

- Penentuan waktu kunjungan lapangan, pada akhir tahun, tidak optimal untuk mendapatkan hasil optimal: banyak perwakilan pemerintah yang sedang sibuk 'tutup buku' dan keluar daerah untuk mengikuti pelatihan dan seminar pada "menit terakhir."
- Pemerintah kabupaten menunjukkan sikap menyambut terhadap survei ini, lebih umum dalam bantuan dan perhatian selama kunjungan utusan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jerman (BMZ). Namun, mereka menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah kabupaten tidak ingin terikat dengan kontrak atau kesepakatan mana pun. Hal ini dikemukakan oleh bupati, dan juga oleh beberapa kepala dinas, yang ingin mengemukakan ketidaksabaran mereka dengan 'hanya pengumpulan data' tanpa tindakan nyata dan prospek untuk mendapat keuntungan dari berbagai usaha konservasi mereka sejauh ini, mengacu pada status mereka sebagai kabupaten konservasi.
- Pada waktu yang sama, di tingkatan dinas yang lebih rendah, suatu energi positif tinggi dapat dirasakan untuk menggerakkan pembangunan kabupaten ke arah yang lebih berkelanjutan. Sayangnya, motivasi mereka belum tertampung secara optimal dalam system yang berlaku.

4.3.3 Malinau

- Ekonomi Hijau adalah suatu konsep yang sedang diperkenalkan di kabupaten yang telah menggunakan konsep Kabupaten Konservasi: membangun kabupaten dengan memperhitungkan sumber daya yang dimilikinya. Konsep ini didukung oleh tradisi turun-temurun

capacity building of its human capital. With these existing concepts applied more or less intensively, the components of Green Economy are covered. Nevertheless, although respondents seem to be aware of the concept of Kabupaten Konservasi, but they do not know what it actually means, as they do not see the actual embodiment of this, or, 'there is no icon' that shows the achievements of a Kabupaten Konservasi.

- With the concept of Gerdema, the responsibility of improving the well-being and prosperity of its citizens, is shared and transferred to lower levels of policy and decision making. The model pushes communities in the 109 villages to learn by doing: how to prioritize developments in the village, according to what principles, with what resources. Although vast distances need to be crossed from the administrative center of activities in the capital of Malinau district to the remote areas in the subdistricts, it looks as though this model works, as far as I can judge. The district government realizes there is still much to win in the development of skills and capacities of the village communities, but better now than never, taking room to learn. An extensive evaluation report was being discussed by the Regional Planning Board, with input

suku Dayak yang mempertahankan Tanah Olen mereka. Baru-baru ini, konsep lain diperkenalkan untuk mendorong pembangunan kabupaten tersebut, dengan perhatian terfokus pada masyarakat desa melalui konsep Gerdema, menggarisbawahi pentingnya pembangunan kapasitas modal manusianya. Dengan penerapan konsep-konsep yang sudah ada ini secara cukup intensif, komponen-komponen Ekonomi Hijau sudah tercakup. Meskipun demikian, walau para responden tampaknya sadar mengenai konsep Kabupaten Konservasi, tetapi mereka tidak tahu apakah yang dimaksud konsep itu, karena mereka tidak melihat pewujudan aktualnya, atau, 'tidak ada ikon' yang menunjukkan pencapaian dari suatu Kabupaten Konservasi.

- Dengan konsep Gerdema, tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya, dibagikan dan dialihkan ke tingkat kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih rendah. Model tersebut mendorong masyarakat di ke-109 desa tersebut untuk belajar dengan melakukannya: bagaimana memprioritaskan pembangunan di desa, menurut prinsip-prinsip apa, dengan sumber daya apa. Meskipun perlu melintasi jarak yang sangat jauh dari pusat kegiatan administratif di ibukota Kabupaten Malinau ke berbagai daerah terpencil di kecamatan, tampaknya model ini dapat berfungsi, sejauh penilaian saya. Pemerintah kabupaten menyadari bahwa masih ada banyak hal yang harus dimenangkan dalam pembangunan keterampilan dan kapasitas masyarakat desa, tetapi lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali, memberi ruang untuk belajar. Sebuah laporan evaluasi yang ekstensif sedang dibicarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan masukan yang diterima dari semua desa, dan kecamatan, mengenai bagaimana konsep ini dipahami di berbagai desa tersebut. Pada tahun 2014 direncanakan evaluasi mengenai

coming from all villages, and sub-districts (kecamatan) about how this concept is being perceived in the villages. In 2014 an evaluation is scheduled about the development progress in skills, capacities, and attitudes of the village authorities related this program. The people in the villages also seem to be positive about the implementation of this model, that brings governance closer to them.

- By connecting the concept of Green Economy to Kabupaten Konservasi and Gerdema, it became easier to respondents to understand this concept of Green Economy. To further clarify, it should be underlined that Green Economy goes beyond the protection of forests. To some people this is surprising, though not strange, in that understanding that care for environment does not stop at the border of the forest, but also includes the areas where people live, work and produce. Or in other words, attention should be paid dari hulu sampai hilir, from the upstream to the downstream.
- Besides during the individual interviews, the discussion came to live during the workshop, where connections were made, for example between BTNKM, Tourism Service, and WWF. The need for further communication was expressed, through existing working groups like DP3K, but also on REDD and Carbon Counting. Furthermore, there is a call to set up a forum of those companies that practice CSR and to develop a learning site about rubber plantations.
- Lastly, there seems to be a fatigue among government representatives regarding consultants coming in and going out of district government services asking for data. Some of these representatives could consider Green Economy as a new task on top of their daily job, rather than in line with existing concepts, making them

kemajuan pembangunan dalam keterampilan, kapasitas dan sikap para pemuka desa terkait program ini. Rakyat pedesaan juga tampaknya bersikap positif terhadap implementasi model ini, yang mana model ini mendekatkan tata kelola sebuah kawasan kepada rakyat.

- Dengan menghubungkan konsep Ekonomi Hijau dengan Kabupaten Konservasi dan Gerdema, para responden lebih mudah untuk memahami hal-hal tentang konsep Ekonomi Hijau. Sebagai penjelasan lebih lanjut perlu digarisbawahi bahwa Ekonomi Hijau bergerak lebih dari sekadar perlindungan hutan. Untuk beberapa orang, hal ini mengejutkan, meskipun tidak aneh, namun memahami bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup tidak berhenti di perbatasan hutan, tetapi juga mencakup daerah di mana rakyat hidup, bekerja dan berproduksi. Atau dengan kata lain, perhatian harus diberikan dari hulu sampai hilir.
- Selain selama wawancara terpisah, diskusi menjadi hidup selama lokakarya, ketika hubungan dibentuk, misalnya antara BTNKM, Dinas Pariwisata, dan WWF. Kebutuhan dikemukakan untuk komunikasi lebih jauh melalui kelompok-kelompok kerja yang ada seperti DP3K, tetapi juga mengenai REDD dan Penghitungan Karbon. Selanjutnya, ada panggilan untuk menata forum yang terdiri dari berbagai perusahaan yang menerapkan CSR, dan untuk mengembangkan suatu lokasi pembelajaran mengenai perkebunan karet.
- Terakhir, tampaknya ada kelelahan di antara para perwakilan terkait datang-perginya para konsultan ke berbagai dinas pemerintah kabupaten untuk meminta data. Beberapa di antara para perwakilan tersebut dapat menganggap Ekonomi Hijau sebagai tugas baru di atas pekerjaan sehari-hari, dan bukan sejalan dengan konsep-konsep yang ada, yang membuat mereka enggan untuk bekerja sama. Dalam beberapa kasus, permintaan untuk pengumpulan data ditolak karena

reluctant to cooperate. In some cases the request for data collection is refused because there is no instruction from the head of the district, while in other cases, they are willing to share, though questioning what the purpose of all this is.

- Therefore, it should be expressed more clearly that this data is theirs to have, for the purpose of prioritization and planning. A representative of the District Planning Board suggested to have it harmonized to the regional planning, RTRW. By giving back the data as promised, based on their consultations and inputs, the results of this assignment could be better acknowledged.
- Introducing a new term, of which people are not clear about the content, can create 'allergic' reactions. Therefore, it is important to talk in easy to understand terms, and rather use synonyms for Green Economy, such as sustainable development or perkembangan yang memperhitungkan lingkungan, or a 'development taking into account environment'. Moreover, the word investment may be misleading when it involves program activities by government services, as these do not necessarily gain direct profits. Therefore, using the term realisasi kegiatan, or activity execution would be more suitable.
- Local knowledge is precious and should not be taken for granted by any means or for any purpose, as projects can fail if not taking this wisdom into consideration. Therefore, it is very important to listen about and to get to know local understandings and concepts first, prior to introducing concepts from outside.
- Green jobs: it should be further explicated what is considered as such, in order to have a more complete picture of the Green Economy condition in the district. This could be of guidance to the Labor Service what green skills to look for, and with that design their programs. More in general,

tidak ada instruksi dari bupati, sementara dalam kasus lain, mereka bersedia berbagi, meskipun mempertanyakan apa tujuan dari semua ini.

- Oleh karenanya, harus dikemukakan dengan lebih jelas bahwa data ini adalah milik mereka, untuk tujuan pemrioritasan dan perencanaan. Seorang wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyarankan agar data ini diselaraskan dengan perencanaan regional, RTRW. Dengan mengembalikan data tersebut sebagaimana yang dijanjikan, berdasarkan konsultasi dan masukan mereka, hasil tugas ini dapat diterima dengan lebih baik.
- Memperkenalkan sebuah istilah baru, yang bagi rakyat tidak jelas mengenai isinya, dapat menciptakan reaksi 'alergi'. Oleh karenanya, perlu untuk berbicara dengan istilah yang mudah dipahami, dan lebih baik menggunakan sinonim untuk Ekonomi Hijau, seperti pembangunan berkelanjutan atau 'perkembangan yang memperhitungkan lingkungan'. Selain itu, kata investasi mungkin menyesatkan bila hal tersebut melibatkan kegiatan program oleh berbagai dinas pemerintah, karena hal tersebut tidak selalu mendapat keuntungan secara langsung. Oleh karenanya, menggunakan istilah realisasi kegiatan, akan lebih cocok.
- Selanjutnya, pengetahuan lokal berharga dan tidak boleh dianggap ringan dengan cara bagaimana pun atau tujuan apa pun, karena proyek-proyek akan gagal bila tidak mempertimbangkan kearifan lokal ini. Oleh karenanya, sangat penting untuk mendengarkan dan mengenali pemahaman dan konsep lokal terlebih dahulu, sebelum memperkenalkan berbagai konsep dari luar.
- Lapangan pekerjaan hijau: harus dijelaskan lebih jauh apa yang dianggap sebagai pekerjaan hijau, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi Ekonomi Hijau di kabupaten tersebut. Hal ini dapat menjadi panduan ke Dinas Tenaga Kerja tentang

for each service it should be determined what activities can be considered as Green Economy activities, based on the Districts' Budgets. This would ease service staff to note the execution and realization of activities that are included as Green Economy.

- Private sector, specifically the companies in wood, palm oil and mining: it would need an adjusted approach, as most of their offices are not in the district, or are difficult to trace. Moreover, these companies should not only be asked about their CSR programs, but also about their efforts 'to green their brown activities'.
- Field support: assistance in executing the survey, e.g. collecting data through interviews, should be selected very careful, considering the political sensitivity of such survey. These people also need to be neutral, and preferably do not have personal ties with people from the government. Moreover, briefing takes time, and the risk of having to interpret the collected data by field support, in a short time span is better spent on visiting the services directly.
- In addition, time frame: dealing with government representatives is dealing with a tight frame of actual available time they are able to dedicate to requests like this.

keterampilan hijau apa yang dicari, dan dengan hal tersebut merancang program mereka. Lebih umum, untuk setiap dinas perlu ditetapkan kegiatan apa yang bisa dianggap sebagai kegiatan Ekonomi Hijau, berdasarkan APBD. Ini akan mempermudah pegawai untuk mencatat pelaksanaan dan realisasi kegiatan yang termasuk Ekonomi Hijau.

- Sektor swasta, khususnya perusahaan kayu, minyak kelapa sawit dan pertambangan: ini akan memerlukan penyesuaian pendekatan, karena sebagian besar kantor mereka tidak berlokasi di kabupaten tersebut, atau sulit untuk dilacak. Selain itu, perusahaan ini tidak hanya perlu ditanya mengenai program CSR mereka, tetapi juga tentang usaha mereka untuk 'menghijaukan aktivitas coklat' mereka.
- Dukungan lapangan: bantuan dalam melakukan survei, misalnya mengumpulkan data melalui wawancara, harus dipilih dengan sangat hati-hati, mengingat kepekaan politik dari survei semacam ini. Pendukug di lapangan ini harus bisa bersikap netral, dan sebaiknya tidak mempunyai ikatan pribadi dengan orang-orang dari pemerintahan. Selain itu, briefing memerlukan waktu, dan risiko untuk harus menafsirkan data terkumpul oleh pendukung lapangan, dengan rentang waktu yang singkat lebih baik digunakan untuk mengunjungi berbagai dinas tersebut secara langsung.
- Sebagai tambahan, kerangka waktu: berurusan dengan perwakilan pemerintah berarti berurusan dengan kerangka waktu yang ketat daripada waktu yang disediakan oleh perwakilan tersebut menjawab permintaan seperti ini.

References / *Daftar Pustaka*

General / *Umum*

Akib, M. (2014), Hukum lingkungan: perspektif global dan nasional. Jakarta: Rajawali Pers 2014

BAPPENAS (2011), Green Economy di Indonesia: Sekarang dan Prospek ke depan Sebagai Upaya Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional. Semiloka Green Economy – BAPPENAS, 22 November 2011; disampaikan pada Diklat Green Economy, Universitas Trunojoyo, 9 – 19 September 2013, Madura.

BAPPENAS (2013a), Sejarah Green Economy; Diklat Green Economy Universitas Trunojoyo, 9 – 19 September 2013 Kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura dan Pusdiklatren Bappenas.

BAPPENAS (2013b), Konsep Green Economy; Diklat Green Economy Universitas Trunojoyo, 9 – 19 September 2013 Kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura dan Pusdiklatren Bappenas.

Brundtland, G.H. (1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. www.un-documents.net/our-common-future.pdf

BPS Indonesia (2012), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Berita Resmi Statistik, No. 13/02/Th. XV, 6 Februari 2012. Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id/pdb_06feb12.pdf

DepNakerTrans, www.m.depnakertrans.go.id/?show=faq&id=18

Gajimu.com (2012), Upah Minimum Provinsi Tahun 2012. www.gajimu.com/main/gaji/Gaji-Minimum/ump-2012

GGI (2013), GGGI and Government of East Kalimantan in Partnership for Regional Green Growth. Green Growth Institute, 30/07/2013. www.gggi.org/gggi-and-government-of-east-kalimantan-in-partnership-for-regional-green-growth/

GIZ FORCLIME (2013), Draft Strategic Plan 2013 – 3016. Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / Forests and Climate Change Programme - Technical Cooperation Module: Jakarta

GIZ FORCLIME (2013), Positioning Paper Green Economy – concept. Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / Forests and Climate Change Programme - Technical Cooperation Module: Jakarta

GIZ FORCLIME (__), About FORCLIME Financial Cooperation. www.FORCLIME.org/en/about-FORCLIME/financial-cooperation

GGKP (2013), Moving towards a common approach on green growth indicators; A Green Growth Knowledge Platform Scoping Paper. Green Growth Knowledge Platform

Hasan, A. (2013), Mengidentifikasi langkah-langkah untuk sebuah "ekonomi hijau" di Kalimantan Timur. Wawancara dengan Dr. Retno Mulyandari dari Kelompok Kerja untuk Pembangunan Ekonomi di Kalimantan Timur, CIFOR, 9/4/2013. www.blog.cifor.org/14941/mengidentifikasi-langkah-langkah-untuk-sebuah-ekonomi-hijau-di-kalimantan-timur#.U0TzsFfQ7qg

HoB (__),Investing in Nature for a Green Economy. www.hobgreeneconomy.org/en/people-nature-and-economy

HoB (2014), Strategy of HoB. www.heartofborneo.or.id/en/about/understanding-heart-of-borneo

Ishak, A.F. (2010), Rencana aksi antisipasi pemanasan global dan mitigasi perubahan iklim melalui Kaltim Hijau 2010-2014. www.awangfaroekishak.info/artikel-13-kaltim-green.htm

Kadin Kaltim (2010),Deklarasi Kalimantan Timur Hijau. Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur, Kaltim Summit 2010, Samarinda. http://www.kadinkaltim.com/?p=781

Kaltim (2013), Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, 18/10/2013. http://www.kaltimprov.go.id/berita-2243-wujudkan-pertumbuhan-ekonomi-hijau.html

Kamal, M. (2012), CSR Tidak Lagi Wajib, 17/07/2012. www.hukumonline.com/berita/baca/lt502d8a41c9e04/csr-tidak-lagi-wajib-broleh--miko-kamal--phd

Kehl, N. and S. Sekartjakrarini (2013), Potential for Ecotourism in Kapuas Hulu and Malinau; Opportunities for Green Economy Development in the Heart of Borneo. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Forests and Climate Change Programme (FORCLIME): Jakarta

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (2008), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2027. www.kalbarprov.go.id/file/dokumen/profil/RPJPD_bab3.pdf

Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan (2012), Prosiding Pertemuan Stakeholder tentang penanganan isu perubahan iklim; Memahami konsep Ekonomi Hijau & Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Implementasinya di Indonesia. Jakarta, Mei 2012

Salim, E. (2012), Peranan Kehutanan dalam Pola Kebijakan "Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, Pro Green"; Prosiding Pertemuan Stakeholder tentang penanganan isu perubahan iklim; Memahami konsep Ekonomi Hijau & Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Implementasinya di Indonesia. Jakarta, Mei 2012: Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan

Schumacher, I. (2013), Article discussion: Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress.www.ingmarschumacher.wordpress.com/2013/07/10/article-discussion-beyond-gdp-measuring-and-achieving-global-genuine-progress/

Setiawati, S. (2012), Membangun Ekonomi Hijau di Heart of Borneo. Kementerian Riset dan Teknologi, 3/11/2012. http://ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/12273

Sukadri, D., B. Widyantoro, I. Yasman, and Y. Septiani (2014), Toward Green Economy in Forestry Sector in Indonesia: An Assessment Report. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Forests and Climate Change Programme (FORCLIME): Jakarta.

Sukandar (2013), Rumusan Kaltim Summit II 2013. www.bappedakaltim.com/headlines/531-kaltimsummit2.html, Humas Bappeda Kaltim

Sukhdev, P. (2012), Green Economy in Indonesia. GIST Advisory

TaRu (2012), Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2012 tentang rencana tata ruang pulau Kalimantan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang: Jakarta. www.sikumtaru.penataanruang.net/file/produkhukum/Perpres%20No%20%203%20Thn%20%202012%203c3c5697014dbd195417b435bd592d3e.pdf

UNDP (2012), Indonesia Climate Change Trust Fund, External Report 2010 - 2011. UNDP Indonesia: Jakarta. www.undp.or.id/factsheets/2012/ENV/Final_Report_ICCTF.PDF

UNEP (__), Green Economy Initiative. United Nations Environment Program. www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx

UNSDKP (2012), Green Growth. United Nations Sustainable Development Knowledge Platform. www.sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1447

Van Paddenburg, A., Bassi, A. Buter, E. Cosslett C. & Dean, A. 2012. Heart of Borneo: Investing in Nature for a Green Economy. WWF Heart of Borneo Global Initiative, Jakarta.

Worldbank (2012), Inclusive Green Growth; The Pathway to Sustainable Development. www.siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_Growth_May_2012.pdf

WWF (2012), Membangun Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat dan Wilayah Perbatasan Heart of Borneo. 4/12/2012: www.wwf.or.id/?26700/Membangun-Ekonomi-Hijau-di-Kalimantan-Barat-dan-Wilayah-Perbatasan-Heart-of-Borneo

WWF (2012), Towards a Greener Economy in the Heart of Borneo. 20/11/2013: www.wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/borneo_forests/?212501/Towards-a-Greener-Economy-in-the-Heart-of-Borneo

Yusuf (2009), Economics and Finance Indonesia, 58 (2) in: Konsep Green Economy, Diklat Green Economy Universitas Trunojoyo, 9 – 19 September 2013 Kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura dan Pusdiklatren Bappenas.

Berau

BPS Indonesia (2012), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Berita Resmi Statistik, No. 13/02/Th. XV, 6 Februari 2012. Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id/pdb_06feb12.pdf

BPS Berau (2013), Berau Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Berau, Kalimantan Barat. www.beraukab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=1

BPS Berau (2013), Statistik Daerah Kabupaten Berau 2013. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Berau, Kalimantan Barat. www.beraukab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=2

Pemerintah Kabupaten Berau (2003), Keputusan Bupati Berau nomer 144 tahun 2003 tentang penetapan Kabupaten Berau sebagai Kabupaten Konservasi.

Pemerintah Kabupaten Berau (2009), Peraturan Daerah Kabupaten Berau, nomor 8 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengawasan konservasi sumber daya ikan di perairan umum kabupaten Berau. www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2009/KabupatenKapuasHulu-8-2009.pdf

Pemerintah Kabupaten Berau (2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2011 – 2015. Pemerintah Kabupaten Berau: Tanjung Redeb.

Pemerintah Kabupaten Berau (2013), Kabupaten Berau Dalam Angka 2013. Biro Pusat Statistik Kabupaten Berau: Tanjung Redeb. http://beraukab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=2

Kapuas Hulu

BPK RI (2010), Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan Di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 02/09/2010: www.pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/09/Microsoft-Word-KAPUAS-HULU-PERDA-IKAN-NO.-8-TH-09.pdf

BPS Kapuas Hulu (2013), Kapuas Hulu Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Fauna & Flora International (2014), Indonesia. www.fauna-flora.org/explore/indonesia

Jaringan Madu Hutan Indonesia (2011), Visi misi JMHI. www.jmhi.info/?cat=9

Komunitas Pecinta Alam Kapuas Hulu (Kompakh, 2006), About KOMPAKH. www.tatunet.ddo.jp/kompakh/en/about_us.php

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (2003), Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomer 144 tahun 2003 tentang penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (2009), Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor 8 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengawasan konservasi sumber daya ikan di perairan umum kabupaten Kapuas Hulu. www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2009/KabupatenKapuasHulu-8-2009.pdf

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2011 – 2015. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu: Putussibau.

People Resources and Conservation Foundation (2014), Forest Recovery, biodiversity, ikat weavings, and livelihoods. www.prcfoundation.org/countries/indonesia-country

Riak Bumi (2012), Riak Bumi, to create a balance between the welfare of local communities and their environment. www.riakbumi.or.id

WWF (2012), About WWF. www.wwf.or.id/en/about_wwf

Malinau

Angi, E.M., Santoso, K.D. and P. Gunarso (2009), Kebijakan Kabupaten Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat, Studi Kasus Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Tropenbos International Indonesia Programme, Balikpapan.

BPS (2013), Malinau Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Kabupaten Malinau (2010), Profil Malinau. www.malinau.go.id/statis-1-profil.html

Rain, E. (2009), Interelasi konservasi sumber daya hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal; Studi Kasus Desa-desa: Setulang, Tanjung Lapang dan Punan Bengalun di Kabupaten Malinau, www.rain-linda.blogspot.com/2009/10/interelasi-konservasi-sumber-daya-hutan.html

GTZ FORCLIME (__), Briefing Paper No. 3: The Role of the Indigenous Peoples Alliance of Kayan Mentarang in the Collaborative Management of the Kayan Mentarang National Park. www.awsassets.wwf.or.id/downloads/brief_paper3_peran_forum_masy_adat_tnkm_eng.pdf

Annex 1.
Vision and mission statements of governments in the three pilot districts 2010 – 2016

Lampiran 1.
Pernyataan visi dan misi pemerintah ketiga kabupaten perintis 2010-2016

Vision *Visi*	**Mision – General** *Misi - Umum*	**Mision – focus on Society** *Misi - fokus pada Masyarakat*	**Mision – focus on environment** *Misi - fokus pada lingkungan hidup*	**Mision – focus on economy** *Misi -- fokus pada ekonomi*	
MALINAU					
Safe, comfortable, and peaceful district through the Village Development Movement (Gerdema)	1. Quality and quantity of infrastructural development 2. Supremacy of law; clean, effective, and efficient government 3. Right to religious practice and tolerant attitude	4. Quality of human resources 5. Participation and empowerment of society 6. Role of youth and women 7. Arts, culture, and tourism		8. Quality living environment; effectiveness and efficiency in use of natural resources; dimension of *Kabupaten Konservasi*	9. Economy of the people 10. Agriculture
Kabupaten yang aman, nyaman dan damai melalui Gerakan Desa Membangun (Gerdema)	*1. Kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur* *2. Supremasi hukum, pemerintah yang bersih, efektif, serta efisien* *3. Kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama dan sikap toleransi.*	*4. Kualitas sumber daya manusia* *5. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat* *6. Peran pemuda dan perempuan* *7. Seni, budaya dan pariwisata*		*8. Kualitas lingkungan hidup, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam; dimensi Kabupaten Konservasi.*	*9. Ekonomi kerakyatan* *10. Pertanian*
KAPUAS HULU					
Professional governance for a prosperous, progressive, smart, healthy and productive society through acceleration of participative development, based on an economy of the people. One that is environment oriented	1. Professional, credibel, responsive and responsible bureaucracy 2. Facilities and infrastructure for accessibility to remote, isolated, and boundary areas.	3. Quality of human resources, pious, smart, and healthy		4. Balance between environment and sustainable development	5. Economy of the people based on local potentials and resources
Pemerintahan yang profesional untuk masyarakat sejahtera, maju, cerdas, sehat, produktif melalui akselerasi pembangunan partisipatif berbasiskan ekonomi kerakyatan Yang berwawasan lingkungan.	*1. Birokrasi yang profesional,kredibel, responsif dan bertanggung jawab* *2. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta aksesibilitas ke daerah terpencil terisolir dan perbatasan.*	*3. Kualitas sumber daya manusia yang bertakwa, cerdas dan sehat*		*4. Keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan*	*5. Ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi dan sumber daya lokal*
BERAU					
Excellent in Agrobusiness and as a tourist destination Independent and religious towards a prosperous society	1. Religion 2. Quality of facilities, infrastructure and housing 3. Clean governance with a vision	4. Tourism and cultural diversity 5. Quality of human resources through education and health care 6. Participative community institutions		7. Sustainable natural resources with an environmental dimension	8. Production centres 9. Quality in trade and services handling
Unggul di bidang Agribisnis dan sebagai tujuan wisata Mandiri dan religius menuju masyarakat sejahtera	*1. Agama* *2. Kualitas sarana, prasarana dan permukiman* *3. Penyelenggaraan pemerintah dengan wawasan*	*4. Objek wisata dan keragaman budaya daerah* *5. Kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan* *6. Kelembagaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif*		*7. Sumber daya alam berkelanjutan dan berwawasan lingkungan*	*8. Sentra-setra produksi* *9. Kualitas layanan perdagangan dan jasa*

Annex 2.
Headline Indicators of Green Economy

As proposed by OECD, taken from 'Moving towards a common approach on green growth indicators; A Green Growth Knowledge Platform Scoping Paper', released by Green Growth Knowledge Platform, 2013.

Lampiran 2.
Indikator Utama Ekonomi Hijau

Sebagaimana diajukan oleh OECD, diambil dari 'Moving towards a common approach on green growth indicators; A Green Growth Knowledge Platform Scoping Paper', diedarkan oleh Green Growth Knowledge Platform, 2013.

Headline 1: Natural asset indicators ***Judul 1: Indikator aset alamiah***	
Theme *Tema*	**Indicators** *Indikator*
Aquatic Resources *Sumber daya Akuatik*	Proportion of fish stocks within safe biological limits *Proporsi stok ikan dalam batas-batas aman biologis*
Forest Resources *Sumber daya Hutan*	• Areas and volume of forests • Area restored or re/afforested • Forest area brought under management • *Luas dan volume hutan* • *Daerah yang dipulihkan atau re/aforestasi* • *Daerah hutan yang dimasukkan dalam pengelolaan*
Minerals and Energy Resources *Sumber daya Mineral dan Energi*	• Available stocks/reserves of minerals • Volume and value of natural resource stocks • *Stok/cadangan mineral yang tersedia* • *Volume dan nilai stok sumber daya alam*
Land and soil resources *Sumber daya lahan dan tanah*	• Land cover types, conversions, and cover changes • Degree of top soil losses on agricultural land, other land • Land area where sustainable land management practices have been adopted • *Jenis tutupan lahan, konversi, dan perubahan tutupan* • *Tingkat kehilangan top soil pada lahan pertanian, lahan lain* • *Area lahan di mana telah diadopsi praktik-praktik pengelolaan lahan berkelanjutan*
Water resources *Sumber daya air*	Volume and quality of available renewable resources *Volume dan kualitas sumber daya terbarukan yang tersedia*
Biodiversity *Keanekaragaman hayati*	• Area under effective protected area status (including marine protected areas) • Areas of forest, agricultural and aquaculture ecosystems under sustainable management • Trends in abundance and extinction risk of selected species • *Daerah dengan status daerah lindung yang efektif (termasuk daerah lindung laut)* • *Daerah ekosistem hutan, pertanian dan akuakultur di bawah pengelolaan berkelanjutan* • *Kecenderungan kelimpahan dan risiko kepunahan spesies-spesies tertentu*

Headline 2: Environmental and resource productivity/intensity indicators *Judul 2: Lingkungan hidup dan indikator produktivitas/intensitas sumber daya*	
Theme *Tema*	**Indicators** *Indikator*
Innovation *Inovasi*	• R&D expenditure of importance to GG • Patents of importance to GG • Environment-related innovation in all sectors • R&D investment • Multifactor productivity, traditional and "green" • *Biaya litbang yang penting bagi PH* • *Paten yang penting bagi PH* • *Inovasi terkait lingkungan di semua sektor* • *Investasi litbang* • *Produktivitas multifaktor, tradisional dan "hijau"*
Energy *Energi*	• GDP per unit of TPES (or the inverse) • Energy consumption per capita • Energy productivity • *PDB per satuan TPES (atau sebaliknya)* • *Konsumsi energi per kapita* • *Produktivitas energi*
Material *Material*	• Domestic material productivity (GDP/DMC) • Material productivity at appropriate level of aggregation • *Produktivitas material domestik (PDB/KMD)* • *Produktivitas material pada tingkat agregasi yang sesuai*
Carbon *Karbon*	• GDP per unit of energy-related CO2 emitted (or the inverse) • Renewable energy (share of electricity power generation) • *PDB per satuan CO2 teremisi terkait energi (atau sebaliknya)* • *Energi terbarukan (penggunaan bersama daya listrik yang dihasilkan)*
Water *Air*	• Water productivity • *Produktivitas air*
Waste *Limbah*	• Waste collection • Waste recycling and reuse • Waste generation or landfill area • *Pengumpulan limbah* • *Daur ulang dan pemanfaatan ulang limbah* • *Penghasilan limbah atau area landfill*

Headline 3: Environmental life quality and safety indicators ***Judul 3: Indikator kualitas hidup dan keamanan lingkungan***	
Theme *Tema*	**Indicators** *Indikator*
Health Risks *Risiko Kesehatan*	• Population exposure to harmful levels of air pollution • Number of people hospitalised due to air pollution • *Pemaparan populasi terhadap tingkat pencermaran udara yang berbahaya* • *Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit akibat polusi udara*
Water *Air*	• Proportion of total freshwater resources used • Proportion of the population using improved water services • Water quality in aquatic ecosystems used for drinking water provision • Population connected to sewage treatment • Population with sustainable access to safe drinking water • Level of harmful chemicals in drinking water • Volume (mass) of BOD pollution loads removed by the treatment plant supported • *Proporsi sumber daya air tawar total yang digunakan* • *Proporsi populasi yang menggunakan layanan air yang ditingkatkan* • *Kualitas air di ekosistem akuatik yang digunakan untuk penyediaan air minum* • *Populasi yang terhubung dengan pengolahan air limbah* • *Populasi dengan akses berkelanjutan pada air minum yang aman* • *Tingkat berbahaya kandungan zat kimia dalam air minum* • *Volume (massa) dari beban polusi BOD yang dihilangkan melalui unit penjernihan yang didukung*
Ecosystem services *Layanan ekosistem*	• Trends in benefits that humans derive from ecosystem services • *Tren dalam manfaat yang didapat manusia dari layanan ekosistem*

Headline 4: GG/GE policies and opportunities indicators ***Judul 4: Kebijakan PH/EH dan indikator peluang***	
Theme *Tema*	**Indicators** *Indikator*
Employment *Lowongan pekerjaan*	• Green job skill training expenditure • Number of people trained • *Pengeluaran pelatihan keterampilan pekerjaan hijau* • *Jumlah orang yang dilatih*
Policy Instruments *Instrumen Kebijakan*	• Level of environmentally related tax revenues • Energy pricing (share of taxes in end-use prices) • Water pricing and cost recovery • Environmentally related subsidies • Fossil fuel, agricultural, water and fishery subsidies • Fossil fuel taxation • Renewable energy incentives • *Tingkat pendapatan pajak terkait lingkungan hidup* • *Penetapan harga energi (bagian pajak pada harga penggunaan akhir)* • *Penetapan harga air dan biaya pemulihan* • *Subsidi terkait lingkungan hidup* • *Subsidi bahan bakar minyak, pertanian dan perikanan* • *Perpajakan bahan bakar minyak* • *Insentif energi terbarukan*
International cooperation *Kerja sama internasional*	International financial flows of importance to GG (ODA, carbon market financing, FDI) *Aliran dana internasional yang penting untuk GG (Pertumbuhan Hijau)* *(ODA, pendanaan pasar karbon, FDI)*

Headline 5: socio-economic indicators ***Judul 5: indikator sosio-ekonomi***	
Theme *Tema*	**Indicators** *Indikator*
Macro-economy, Trade and Regulation *Ekonomi makro Perdagangan dan Peraturan*	• GDP growth and structure • Net Disposal income • Relative importance of trade • Product market regulation • *Pertumbuhan dan struktur PDB* • *Pendapatan bersih yang siap dibelanjakan* • *Kepentingan relatif perdagangan* • *Pengaturan pasar produk*
Distribution *Distribusi*	• Income inequality: GINI coefficient • *Ketidaksetaraan penghasilan: Koefisien GINI*
Labor market *Pasar tenaga kerja*	• Labor productivity • Labor force participation & unemployment rates • *Produktivitas tenaga kerja* • *Partisipasi tenaga kerja & tingkat pengangguran*
Education *Pendidikan*	• Education attainment: level of and access to education • *Tingkat pencapaian pendidikan dan akses ke pendidikan*
Health and Sanitation *Kesehatan dan Sanitasi*	• Health adjusted life expectancy • Access to sanitation • Access to health care • People provided with access to improved sanitation facilitates • *Harapan hidup berdasar usia* • *Akses untuk sanitasi* • *Akses untuk layanan kesehatan* • *Orang yang mendapat akses pada fasilitas sanitasi yang lebih baik*
Development *Pembangunan*	• Access to transportation • Access to electricity • *Akses pada angkutan* • *Akses kelistrikan*